

# **Perempuan DAN KEKUASAAN POLITIK**



---

# PEREMPUAN DAN KEKUASAAN POLITIK

---



Umaimah Wahid



## **Perempuan dan Kekuasaan Politik**

© Umaimah Wahid, 2014

Penulis : Umaimah Wahid  
Editor : A. Rachmatullah  
Tata Letak : Indigo Media  
Design Cover : Indigo Media

Diterbitkan oleh :  
Empat Pena Publishing  
Jl. Kalipasir No. 36 Sukasari  
Tangerang, Banten 15118  
Mobile : 0812-1000-7656  
Email : empatpena@gmail.com

xvi + 214 halaman  
ISBN : 978-602-17908-7-8  
Cetakan I : Mei 2014

### **Katalog Dalam Terbitan**

Umaimah Wahid  
Perempuan dan Kekuasaan Politik  
Tangerang : Empat Pena Publishing, 2014  
(xvi + 214 hlm; 14 x 21 cm)  
ISBN 978-602-17908-7-8

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# Kata Pengantar

PEREMPUAN sebagai salah satu *stakeholder* di wilayah DKI Jakarta dipandang mengalami diskriminalisasi posisi dibanding kaum laki-laki sehingga sangat mungkin kondisi tersebut berakibat pada semakin mengkrystalnya nilai-nilai budaya patriarki. Kaum perempuan terkadang turut mendukung dominasi laki-laki atas perempuan serta menerima proses tersebut sebagai sesuatu yang integral dalam keseharian. Salah satu contoh tidak adanya saling dukung di antara sesama perempuan adalah tidak adanya sebuah gerakan yang mendukung kaum perempuan lainnya untuk mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat yang dikelola dengan terencana. Salah satu hak perempuan adalah maju sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan daerah 2012. Tidak adanya kandidat perempuan baik yang dicalonkan oleh partai politik ataupun melalui jalur independen tampak ironis bila dibanding

kondisi provinsi lainnya di Indonesia seperti Banten, Jawa Tengah, Surabaya, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia maka sangat logis jika beragam perubahan dimulai dari Jakarta. Taraf hidup masyarakat Jakarta juga lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Jakarta adalah pusat pemerintah, ekonomi, politik, sosial, dan pusat perkembangan media massa. Sebagai sentral dari kehidupan di Indonesia, Jakarta memegang peran yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

Apabila dilihat dari sudut pandang demokrasi dan keadilan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara adil dalam kehidupan yang mereka jalani, maka kondisi marjinal tampak jelas dalam politik DKI Jakarta. Diskriminasi yang dimaksud tampak jelas pada sektor publik sebenarnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan DKI Jakarta sudah cukup memadai, namun tetap belum memadai jika dibandingkan keterwakilan kaum laki-laki. Pada level birokrasi, yaitu pemerintahan DKI Jakarta, keterwakilan dan representasi kaum perempuan sudah cukup memadai, yaitu berdasarkan pemilihan umum 2009. Anggota parlemen perempuan DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 sejumlah 22% atau 22 orang. Dilihat dari jumlah tersebut sebenarnya jumlah tersebut sudah cukup memadai, yaitu 22% dari keseluruhan jumlah anggota DPRD 2009-2014. Namun jumlah yang besar itu belum memenuhi ketentuan kuota keterwakilan 30% perempuan. Dan yang paling ironis adalah tidak ada satu pun kandidat baik wakil partai politik maupun calon independen perempuan sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam pilgub 2012.

Realitas tidak adanya keterwakilan atau representasi perempuan pada pemilihan gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta sebenarnya bukan hanya pada tahun 2012 ini saja, melainkan dari pertama pemilihan umum dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta hingga abad millenium ini,

yaitu pemilu pada 2012 tidak terlihat satu pun kandidat perempuan dari lima pasangan calon gubernur atau wakil gubernur yang mendaftarkan diri ke KPU.

Kemajuan Jakarta di segala bidang berimplikasi secara jelas bagi kaum perempuan Jakarta. Kondisi kaum perempuan Jakarta dinyatakan sudah cukup memadai dibandingkan daerah-daerah lainnya. Kemajuan tersebut ditunjang oleh perkembangan kota Jakarta yang lebih terbuka dengan perubahan-perubahan baru. Kondisi tersebut ditunjang juga kondisi pendidikan dan ekonomi yang lebih baik dibanding sebagian kota-kota lainnya di Indonesia. Artinya, sangat wajar jika perempuan Jakarta lebih maju baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial maupun budaya dalam pemahaman pada umumnya.

Meskipun perempuan mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, namun dalam bidang politik ternyata perempuan DKI Jakarta kurang mempunyai minat untuk aktif di politik sebagai pemimpin DKI Jakarta atau gubernur dan wakil gubernur. Dalam sejarah perpolitikan, Provinsi DKI Jakarta sejak awal kemerdekaan tahun 1945 belum terdengar satu pun perempuan Jakarta yang pernah memimpin Jakarta. Bahkan menjadi kandidat gubernur atau wakil gubernur pun belum pernah ada.

Diakui atau tidak realitas tersebut mampu memunculkan diskriminasi gender dalam politik Provinsi DKI Jakarta yang berimplikasi pada tidak meratanya distribusi kekuasaan dalam struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Minimnya keterwakilan perempuan pada proses politik pemimpin nomor satu di Jakarta telah berlangsung sepanjang Provinsi DKI Jakarta berdiri hingga saat ini. Walau Provinsi DKI Jakarta berada di era kosmopolitan, perempuan tetap mengalami marginalisasi dalam kekuasaan. Hal itu sudah integral, kuat dan mendalam mengkonstruksi pemikiran bawah sadar di Provinsi DKI Jakarta, sehingga kondisi termarginalkannya perempuan berlangsung terus dan parahnya

hal itu hampir tidak dipertanyakan, bahkan oleh kaum perempuan itu sendiri.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dinyatakan telah berlangsung dominasi yang sangat kuat dan mengakar oleh kaum laki-laki dalam lingkungan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Dominasi tersebut semakin kuat karena tanpa sadar juga didukung oleh kaum perempuan Jakarta yang sulit mendukung perempuan lainnya yang hendak maju atau berkeinginan menjadi kandidat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam suatu pemilihan pejabat yang berlangsung, kaum perempuan menjadi bagian yang memelihara dominasi kaum laki-laki karena sikap *common sense* mereka terhadap kondisi perempuan yang dikonstruksi laki-laki sehingga secara tidak langsung kaum perempuan justru menjadi bagian dari proses sistem patriarki, yaitu sebagai sistem yang memihak dominasi laki-laki. Menurut kaum feminis radikal, hal itu merupakan penyebab ketidakadilan gender dan berakibat buruk pada realitas kehidupan perempuan di beragam faktor kehidupan mereka. Menurut A. Nunuk Murniati (2004: 12) pemahaman tersebut membawa implikasi lahirnya kelompok dominan yang kemudian diteguhkan oleh budaya, agama dan politik sehingga tidak tergoyahkan. Peneguhan yang berlangsung juga didukung oleh struktur sosial dan budaya. Mendukung konsep tersebut, Saidah dan Khatimah (2003: 39) mengungkapkan bahwa gejala ketidakadilan tersebut dapat dilihat melalui fenomena dengan menggunakan terminologi ketimpangan, ketidakadilan dan disparitas gender telah menyebabkan terciptanya *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, serta kekerasan atas perempuan yang menjadi azas terbangunnya mekanisme kontrol patriarki di masyarakat dalam semua aspek kehidupan.

Kontrol budaya inilah yang kemudian sangat mendiskreditkan aktivitas politik perempuan sehingga diskriminasi terhadap peran politik perempuan muncul. Diskriminasi tersebut sangat kuat mempengaruhi



dinamika perempuan di wilayah publik yang berlangsung. Kuatnya pengaruh budaya dalam mengkonstruksi realitas politik perempuan disebabkan oleh nilai dan persepsi budaya, baik pada tataran konseptual maupun implementasi praktis. Kesemuanya merupakan aturan dan norma yang sangat berpihak kepada kepentingan laki-laki dan sekaligus menentukan pertimbangan baik dan buruk atas realitas perempuan. Sementara laki-laki sebagai anggota komunitas atas dasar pertimbangan budaya patriarki mempunyai keleluasaan dan kontrol yang kemudian menentukan dan menguasai aktivitas publik seperti politik. Menurut pandangan kaum feminis radikal, subordinasi perempuan dari hegemoni laki-laki secara signifikan telah mengakibatkan perempuan jarang aktif dan tidak memilih aktivitas politik sebagai aktivitas utama. Diskriminasi telah dialami kaum perempuan baik pada tataran ideal, konseptual maupun tataran material dan praktis. Pemahaman ini kemudian berakibat pada minimnya jumlah perempuan yang aktif dalam politik. Kondisi ini seakan tak terelakkan dan berakibat pada kurangnya jumlah perempuan yang memilih aktivitas politik sebagai aktivitas serius dan penting.

Sebenarnya kondisi tersebut menyalahi kaidah dan nilai-nilai demokrasi modern di mana semua komponen memiliki hak untuk terwakili, kecuali memang perempuan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada. Demokrasi modern yang dimaksud di sini tentu bukan hanya untuk memajukan kepentingan individu-individu, namun bagi kaum perempuan demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan komunal kaum perempuan. Dengan kata lain, kekuatan *bersama-sama* yang akan mampu memberikan kekuatan kepada gerakan kaum perempuan untuk mengubah secara drastis dan berkesinambungan. Diperlukan 'revolusi sistemik' di Provinsi DKI Jakarta yang akan lebih memperhatikan kepentingan politik kaum perempuan.

Perempuan sejatinya harus berjuang untuk memperoleh kekuasaan dalam politik karena kekuasaan merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perjuangan ke arah yang lebih baik bagi kaum perempuan dan semua pihak yang selama ini termarginalkan. Pentingnya kekuasaan dalam suatu perjuangan karena kekuasaan mampu mengarahkan arah perjuangan, tentunya kekuasaan yang humanis bagi kemaslahatan masyarakat. Selama ini perjuangan bagi keterwakilan kepentingan perempuan terabaikan dan bahkan terkooptasi oleh kepentingan pihak dominan karena perempuan cenderung bagian dari kelompok yang berkuasa atau terkuasai oleh sistem yang dominan.

Menurut *Oxford English Dictionary Helliwel* dan Hindes (dalam Taylor, 1999: 73), terdapat beberapa makna tentang kata kekuasaan: "Kekuasaan adalah memiliki kontrol dan kekuatan memerintah terhadap pihak lain. Para sosiolog memahami kekuasaan dalam konteks ini sebagai kapasitas untuk mendapatkan pihak lain tersebut mau melakukan apa yang diharapkan atau diminta dilakukan oleh pihak lain dimaksud. Seperti presiden terhadap populasi rakyatnya dan orang tua atas anak-anak mereka dan sebagainya".

Kekuasaan bagi perempuan menjadi penting karena dengan kekuasaan sebagai kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan diharapkan perempuan akan menemukan jalan bagi persoalan-persoalan yang selama ini membelenggu mereka dan kaum marjinal lainnya. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau memengaruhi sesuatu atau apa pun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan *agency*, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan/perbedaan di dunia (Taylor, 1997: 73).

Oleh karenanya, perjuangan untuk mempunyai kekuasaan yang humanis sangat diperlukan, karena perjuangan tersebut merupakan salah satu cara untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan gender dalam politik yang merupakan perjuangan terus menerus dan harus dilakukan dengan memelihara kesinambungan perjuangan sehingga diharapkan mampu mengubah persepsi politik perempuan serta masyarakat. Perempuan memiliki kekuasaan juga kemampuan bertindak sebagai kekuatan kelompok penyeimbang dengan mengusung ide perubahan dan ideologi baru. Dalam bahasa Gramsci, kelompok subordinat, dalam hal ini gerakan perempuan, harus memiliki '*authonomy dan independent*', yaitu kedewasaan dan kemandirian ideologi dan politik, sehingga dapat menggerakkan ide-ide bersama melalui aliansi kelompok subordinat lainnya, dan aliansi ini menumbuhkan apa yang dinamakan Gramsci sebagai *collective will*. *Collective will* sangat diperlukan untuk merebut kesempatan dengan melihat kondisi yang sedang '*in*' pada saat itu. Upaya perjuangan ketidakadilan gender dalam politik memerlukan strategi khusus seperti ketentuan sementara kuota. Hal itu atas dasar terjadinya beberapa hal. *Pertama*, adanya amandemen UUD 1945 pasal 28 bahwa warga negara dengan keadaan khusus dapat memperoleh perlakuan khusus. Keadaan khusus perempuan adalah warga negara dan pemilih yang lebih banyak dibandingkan laki-laki akan tetapi hak-hak politiknya selama ini terpinggirkan karena dominasi negara (*penguasa*) sehingga menyebabkan adanya konstruksi yang kuat tentang aktivitas politik dan wilayah publik bersaing dengan laki-laki dianggap sebagai aktivitas yang buruk dan kotor. Semua itu menjadikan keterwakilan perempuan minim di berbagai lembaga negara, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Jadi, kekuasaan dan politik sejatinya bukan hanya hak dan kewajiban kaum laki-laki melainkan merupakan ruang bersama. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama di tampuk kekuasaan dan

cenderung menjadi *'single fighter'* dalam pemerintahan DKI Jakarta. Penelitian yang menggunakan landasan kerangka pemikiran kritis yang dalam hal ini analisis kritis berdasarkan pemikiran komunikasi politik, subjektivitas dan otonomi perempuan, kekuasaan politik perempuan dan pemiluakada diharapkan mampu mengungkapkan interaksi dinamis antara keberadaan dan sekaligus realitas real berkaitan dengan minimnya kandidat perempuan dalam pemiluakada. Perempuan acapkali mengalami ketidakadilan dan marginalisasi dalam proses politik dalam proses perjuangan memperoleh kekuasaan politik. Dengan menggunakan paradigma kritis diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan realitas tersembunyi yang menyebabkan sulitnya kandidat perempuan bersaing dalam memperebutkan tampuk pimpinan di DKI Jakarta.

Salah satu indikator yang dapat dilihat secara jelas di bidang politik, yang mana perempuan berada dalam posisi terpinggirkan, marginal, dan anti demokratis dari proses politik yang berlangsung. Proses politik diyakini oleh kaum perempuan berkaitan dengan keterwakilan dan aktivitas politik merupakan sarana yang mampu mengubah realitas sosial, ideologi, dan hegemoni termasuk beragam kebijakan publik. Hal itu semua disadari atau tidak adalah bagian dari hegemoni dominan dan ideologi dominan laki-laki yang selama ini sangat menguasai realitas dunia khususnya politik dan kekuasaan. Hegemoni budaya patriarki yang telah berlangsung sepanjang proses sejarah kehidupan kaum perempuan sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Kondisi tersebut dengan lebih tegas diperkuat dan diteguhkan oleh negara terhadap realitas hidup kaum perempuan yang disebut penindasan sistemik. Pada hakikatnya, negara berkewajiban melindungi warganya tanpa memandang laki-laki atau perempuan, namun faktanya kepentingan spesifik perempuan terabaikan, baik di parlemen, pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.

DKI Jakarta yang merupakan provinsi yang berstatus daerah khusus, sebagai ibu kota adalah pusat negara Indonesia, kota metropolitan dengan tingkat pendidikan yang paling maju. Tingkat kualitas hidup yang baik, dan pengembangan masyarakat yang pesat. Kondisi DKI Jakarta tersebut seharusnya menjadikan masyarakat Jakarta khususnya kaum perempuan selayaknya muncul menjadi pionir dalam perubahan Jakarta termasuk dalam politik. Dengan kondisi tersebut, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencari kandidat pemimpin perempuan.

Perempuan, dalam konteks ini adalah kelompok subordinat, merupakan bagian masyarakat sipil yang dalam tataran konseptual dan praktisnya didominasi oleh pemikiran atau konsep kelompok dominan. Perempuan, sampai detik ini masih memahami diri mereka sebagai bagian dari struktur masyarakat yang mereka anggap lebih tinggi, yaitu laki-laki dan negara. Kelompok dominan, yang didukung oleh budaya, sosial dan hubungan sosial bahkan negara, memiliki kekuasaan dan memperlakukan perempuan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai dan ideologi kelompok penguasa dan negara. Hal inilah yang disebut negara dan kelompok penguasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Marjinalisasi dan kekerasan negara yang dialami oleh perempuan dalam segala bidang, khususnya politik, salah satunya merupakan hasil dukungan persepsi budaya sebagaimana diterangkan di atas. Perempuan merasa bahwa pemahaman budaya itulah yang lazim dan sesuai untuk mereka, sehingga kondisi partisipasi perempuan dalam politik menjadi kecil, dan inilah yang terus dijaga oleh kelompok dominan dan penguasa sehingga perempuan selalu berada dalam kondisi marjinal dalam politik.

Hal itu ditegaskan oleh Arivia dalam *Aspirasi Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan* (Jurnal Perempuan, 1999: 5) bahwa akibat dari konstruksi sosial dan budaya patriarki, perempuan menjadi manusia apolitis, dipandang sebagai kelompok yang tidak mempunyai kepentingan atas politik melainkan hanya sebagai kelompok penjaga gawang

moral. Sepanjang sejarah politik Indonesia, perempuan berada dalam kondisi marginal. Hal itu dapat dilihat dengan partisipasi dan keterwakilan mereka yang rendah di parlemen dan lembaga-lembaga negara lainnya. Arivia menyatakan bahwa situasi yang dialami perempuan bisa dipahami dengan memakai *fraternalisme* yang mengakibatkan eksklusivitas perempuan di dalam ruang publik. Politik adalah dunia publik yang didominasi laki-laki karena dalam pemahaman yang diberikan, politik adalah dunia yang cocok dan diperuntukkan bagi laki-laki.

Politik berkarakter laki-laki, yaitu rasional, independen, kuat, memperhatikan kepentingan umum dan lain-lain. Sedangkan perempuan ada di ruang domestik/privat, menjalankan fungsi reproduksi, lemah, irasional, dependen, hanya memperhatikan diri sendiri, dan lain sebagainya. Semua pemahaman ini adalah bangunan budaya patriarki yang sangat mendukung laki-laki dan menempatkan laki-laki pada struktur utama dibandingkan perempuan yang dianggap makhluk level kedua. Padahal sebagai warga negara, perempuan sudah seharusnya memperoleh perlakuan yang sama, baik dalam undang-undang maupun dalam kehidupan praktis serta tidak boleh mengalami diskriminasi politik di mana negara terlibat dalam proses tersebut. Realitas tersebut harus segera diubah oleh perempuan, dan perempuan juga perlu mengubah pemikiran kaum laki-laki dan masyarakat secara umum termasuk perempuan untuk mendukung perjuangannya dengan lebih melihat kualitas mereka. Dukungan juga diperlukan dari partai politik, karena partai politik merupakan institusi yang memiliki kewenangan dalam menentukan seorang kandidat lolos sebagai calon pemimpin.

Pamulang, 3 Februari 2014

Penulis

# Daftar Isi

Kata Pengantar—v

Daftar Isi—xv

## BABI

Pendahuluan—1

A. Latar Belakang—1

B. Identifikasi Masalah—9

C. Rumusan Masalah—9

D. Tujuan Penelitian—11

E. Manfaat Penelitian—11

## BAB II

Kekuasaan Politik Perempuan—15

- A. Komunikasi Politik—26
- B. Kekuasaan Subyektivitas Politik Perempuan—35
- C. Pemilu—45
- D. Teori Feminist Radikal dalam Memahami Marginalisasi Perempuan—50
- E. Kerangka Pemikiran—61

### **BAB III**

#### **Metodologi Penelitian—63**

- A. Paradigma Penelitian—63
- B. Pendekatan Penelitian—68
- C. Metode Penelitian—69
- D. Unit Analisis—71
- E. Definisi Konseptual—72
- F. Teknik Pengumpulan Data—74
- G. Analisis Refleksi Data—77

### **BAB IV**

#### **Refleksi Kekuasaan Politik Perempuan—81**

- A. Peta kekuasaan perempuan politik di Provinsi DKI Jakarta—115
- B. Representasi Perempuan sebagai Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012—138
- C. Dukungan Partai Politik dan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Perempuan Dalam Politik—162

### **BAB V**

#### **Penutup—191**

#### **Daftar Pustaka—203**

#### **Biografi Penulis—211**



# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

DKI Jakarta adalah ibukota negara Indonesia dan sering disebut sebagai kota metropolitan dikarenakan perkembangan dan perubahan kota Jakarta yang meliputi semua aspek kehidupan, dan sekaligus menemukan beragam suku, etnis, kelompok masyarakat, organisasi, tujuan dan kepentingan di dalamnya. Sebagai ibu kota negara Republik Indonesia maka sangat logis jika beragam perubahan dimulai dari Jakarta. Taraf hidup masyarakat Jakarta juga lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Jakarta adalah pusat pemerintah, ekonomi, politik, sosial, dan pusat perkembangan media massa. Sebagai sentral dari kehidupan di Indonesia, Jakarta memegang peranan yang penting bagi masyarakat Indonesia.

Apabila dilihat dari sudut pandang demokrasi dan keadilan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara adil dalam kehidupan yang mereka jalani, kondisi marjinal tampak jelas dalam politik DKI Jakarta. Diskriminasi yang dimaksud tampak jelas pada sektor publik sebenarnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan DKI Jakarta sudah cukup memadai, namun tetap belum memadai jika dibandingkan keterwakilan kaum laki-laki.

Pada level birokrasi yaitu pemerintahan DKI Jakarta, keterwakilan dan representasi kaum perempuan sudah cukup memadai yaitu berdasarkan pemilihan umum 2009. Anggota Parlemen perempuan DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 sejumlah 22 persen yaitu 22 orang. Dilihat dari jumlah tersebut sebenarnya jumlah tersebut sudah cukup memadai yaitu 22 persen dari keseluruhan jumlah anggota DPRD 2009-2014. Namun jumlah yang besar itu belumlah dapat memenuhi ketentuan kuota yaitu keterwakilan 30 persen perempuan. Dan yang paling ironis adalah tidak ada satupun kandidat baik wakil partai politik maupun calon independen perempuan sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan umum 2012.

Realitas akan tidak adanya keterwakilan atau representasi perempuan pada pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta sebenarnya bukan hanya pada tahun 2012 ini saja, melainkan dari pertama pemilihan umum dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta hingga abad millenium ini yaitu Pemilu 2012 tidak terlihat ada satupun kandidat perempuan dari lima pasangan calon Gubernur atau Wakil Gubernur yang mendaftarkan diri ke KPU.

Kemajuan Jakarta di segala bidang berimplikasi secara jelas bagi kaum perempuan Jakarta. Kondisi kaum perempuan Jakarta dinyatakan sudah cukup memadai dibandingkan daerah-daerah lainnya. Kemajuan tersebut ditunjang oleh perkembangan kota Jakarta yang lebih terbuka dengan perubahan-perubahan baru. Kondisi tersebut ditunjang juga

oleh kondisi pendidikan dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan sebagian kota-kota lainnya di Indonesia. Artinya sudah sangat wajar jika perempuan Jakarta lebih maju baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya dalam pemahaman umumnya.

Kemajuan kaum perempuan Jakarta dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya termasuk bidang politik. Namun dalam bidang politik, ternyata perempuan DKI Jakarta kurang mempunyai minat untuk aktif di politik sebagai pemimpin DKI Jakarta atau Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam sejarah perpolitikan, Provinsi DKI Jakarta sejak awal kemerdekaan tahun 1945 belum terdengar satupun perempuan Jakarta yang pernah memimpin Jakarta. Bahkan menjadi kandidat gubernur atau wakil gubernur pun belum pernah ada.

Dengan mengusung Visi Rencana Pembangunan jangka panjang Jakarta adalah: “Menjadikan Jakarta sederajat dengan kota-kota besar lain di dunia dan dihuni oleh penduduk yang sejahtera”. Ada dua makna penting dalam perumusan ini, yaitu: (1) Sederajat dengan kota-kota besar lain di dunia. Ini berarti kota Jakarta harus mampu memenuhi standar kota dunia baik dari segi fisik maupun peradaban. Dalam hal ini Jakarta harus selalu menyejajarkan diri dengan kota-kota dunia termasuk dalam usaha mencari pola peradaban kota yang lebih ideal di masa depan. (2) Penduduk yang sejahtera. Ini menunjukkan kesadaran bahwa kemakmuran fisik dan ekonomi semata belum cukup. Cita-cita kota yang tertinggi adalah kesejahteraan, yaitu suatu kondisi di mana ada keseimbangan ideal antara aspek lahiriah dan batiniah.

Tidak adanya calon pemimpin puncak provinsi DKI Jakarta semakin mengherankan dikarenakan peluang untuk mencalonkankan diri sebagai kandidat bukannya melalui partai politik, melainkan juga tahun ini untuk yang pertama sekali calon kandidat Gubernur atau Wakil Gubernur dapat menempuh pintu ‘calon independen’. Artinya jalan

semakin terbuka bagi kandidat perempuan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat karena bukan hanya melalui partai politik yang selama ini dianggap cenderung '*maskulin*'.

Namun nyatanya peluang yang semakin terbuka dan besar tetap tidak meningkatkan niat perempuan yang ada di DKI Jakarta khususnya untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Maka berdasarkan kondisi yang ada, patut dipertanyakan apa sebenarnya yang menyebabkan perempuan enggan maju sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur.

Diakui atau tidak realitas tersebut mampu memunculkan diskriminasi gender dalam politik Provinsi DKI Jakarta yang berimplikasi pada tidak meratanya distribusi kekuasaan dalam struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Minimnya keterwakilan perempuan pada proses politik pemimpin nomor satu di Jakarta telah berlangsung sepanjang Provinsi DKI Jakarta berdiri hingga saat ini. Walau Provinsi DKI Jakarta berada di era kosmopolitan, perempuan tetap mengalami marginalisasi dalam kekuasaan.

Hal itu sudah integral, sudah sangat kuat dan mendalam mengkonstruksi pemikiran bawah sadar di Provinsi DKI Jakarta, sehingga kondisi termarginalnya perempuan berlangsung terus dan parahnya hal itu hampir tidak dipertanyakan, bahkan oleh kaum perempuan itu sendiri.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dinyatakan telah berlangsung dominasi yang sangat kuat dan mengakar oleh kaum laki-laki dalam lingkungan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Dominasi tersebut semakin kuat karena tanpa sadar juga didukung oleh kaum perempuan Jakarta sulit mendukung perempuan lainnya yang hendak maju atau berkeinginan menjadi kandidat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam suatu pemilihan pejabat yang berlangsung. Kaum perempuan menjadi bagian yang memelihara dominasi kaum laki-laki

karena sikap '*common sense*' mereka terhadap kondisi perempuan yang dikonstruksi oleh laki-laki. Sehingga secara tidak langsung perempuan justru menjadi bagian dari proses pemeliharaan *status quo* kaum laki-laki dalam mempertahankan kekuasaan mereka di Provinsi DKI Jakarta yang didasarkan pada sistem patriarkhi yang sangat dinikmati oleh kaum laki-laki sebagai sesuatu yang integral dalam proses budaya.

Sistem patriarkhi adalah sistem yang memihak pada dominasi laki-laki, menurut kaum feminis radikal, hal itu merupakan penyebab ketidakadilan gender dan berakibat buruk pada realitas kehidupan perempuan di beragam faktor kehidupan mereka. Menurut A. Nunuk Murniati (2004:12), bahwa pemahaman tersebut membawa implikasi lahirnya kelompok dominan yang kemudian diteguhkan oleh budaya, agama dan politik, sehingga tidak tergoyahkan. Peneguhan yang berlangsung juga didukung oleh struktur sosial dan budaya.

Mendukung konsep tersebut Saidah dan Khatimah (2003: 39) mengungkapkan bahwa gejala ketidakadilan tersebut dapat dilihat melalui fenomena dengan menggunakan terminologi ketimpangan, ketidakadilan dan disparasi gender telah menyebabkan terciptanya *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, serta kekerasan atas perempuan yang menjadi azas terbangunnya mekanisme kontrol patriarkhi di masyarakat dalam semua aspek kehidupan.

Kontrol patriarkhi ini telah mengakibatkan pembatasan dan pemilahan ruang bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan sebagai anggota masyarakat dan budaya tertentu yang dikontrol, lalu diselaraskan dengan aktivitas kawasan domestik (rumah tangga), sedangkan laki-laki diidentikkan dengan aktivitas ruang publik. Kontrol budaya inilah yang kemudian sangat mendiskreditkan aktivitas publik termasuk aktivitas politik perempuan sehingga diskriminasi terhadap peran politik perempuan muncul. Diskriminasi tersebut sangat kuat memengaruhi dinamika perempuan di wilayah publik yang berlangsung.

Kontrol patriarkhi dari kaum yang lebih kuat yaitu laki-laki terhadap kaum yang lemah yaitu perempuan dalam politik dipraktekkan oleh partai politik. Partai politiklah yang memegang kewenangan berdasarkan UU Partai Politik 2008 untuk menentukan kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kuatnya pengaruh budaya dalam mengkonstruksi realitas politik perempuan, disebabkan nilai dan persepsi budaya, baik pada tataran konseptual maupun implimentasi praktis. Kesemuanya merupakan aturan dan norma yang sangat berpihak kepada kepentingan laki-laki dan sekaligus menentukan pertimbangan baik dan buruk atas realitas perempuan. Sementara laki-laki sebagai anggota komunitas atas dasar pertimbangan budaya patriarkhi mempunyai keleluasaan dan kontrol yang kemudian menentukan dan menguasai aktivitas di kawasan publik seperti politik. Aktivitas kawasan publik ini lalu memberi ruang dan peluang bagi laki-laki untuk menjadi kelompok atau kelas dominan yang memaknai realitas berdasarkan sudut pandang dan kepentingan laki-laki itu sendiri, termasuk dalam memaknai realitas perempuan. Sebaliknya perempuan menjadi kaum yang kebebasannya dikontrol dan menjadi subordinat dari hegemoni laki-laki. Hal itu lalu dikonsepsi dan dikonstruksi untuk memihak kepentingan laki-laki yang pada akhirnya menumbuhkan asumsi jika ruang yang tepat bagi perempuan menurut konklusi alur pikir patriarkhi adalah kawasan domestik.

Menurut pandangan kaum feminis radikal, subordinasi perempuan dari hegemoni laki-laki secara signifikan telah mengakibatkan perempuan jarang aktif dan tidak memilih aktivitas politik sebagai aktivitas utama. Diskriminasi telah dialami kaum perempuan, baik pada tataran ideal dan konseptual maupun tataran material dan praktis. Bahkan dalam beberapa kasus; diskriminasi yang disebabkan hegemoni dominan telah diperkuat oleh interpretasi sebagian ahli agama dan kalangan perempuan itu sendiri. Pemahaman ini kemudian berakibat pada minimnya jumlah

perempuan aktif di ruang publik khususnya di politik. Kondisi ini seakan tak terelakkan dan berakibat pada kurangnya jumlah perempuan yang memilih aktivitas publik (politik) sebagai aktivitas serius dan penting. Hal itulah yang mengakibatkan keterwakilan perempuan di politik dan parlemen tidak memadai dari segi kualitas dan kuantitas, padahal keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting untuk mendorong perubahan terhadap berbagai undang-undang dan kebijakan agar lebih berpihak dan mengakomodir kepentingan perempuan yang selama ini termarginalkan.

Sebenarnya kondisi tersebut menyalahi kaidah dan nilai-nilai demokrasi modern, di mana seharusnya semua komponen memiliki hak untuk terwakili kecuali memang perempuan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada. Demokrasi modern yang dimaksud di sini tentu bukan hanya untuk memajukan kepentingan individu-individu, tapi bagi kaum perempuan demokrasi yang harus diperjuangkan adalah demokrasi yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan komunal perempuan. Dengan kata lain kekuatan '*bersama-sama*' yang akan mampu memberikan kekuatan kepada gerakan kaum perempuan untuk mengubah secara drastis dan berkesinambungan. Diperlukan 'revolusi sistemik' di Provinsi DKI Jakarta yang akan lebih memperhatikan kepentingan politik kaum perempuan.

Dalam ketentuan baru, sistem politik Indonesia pun telah diatur bahwa perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam suatu kepemimpinan, yaitu ketentuan kuota 30 persen. Aturan ini memang masih terbatas bagi anggota parlemen, namun tidak buruk jika diadaptasi dalam setiap lembaga publik lainnya apalagi dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi yang seharusnya berada dalam posisi pemahaman yang netral atas jenis kelamin.

Perjuangan memperoleh keadilan dan kesetaraan gender dalam politik merupakan perjuangan yang terus menerus harus dilakukan dengan memelihara kesinambungan perjuangan, sehingga diharapkan mampu mengubah persepsi politik perempuan serta masyarakat; perempuan memiliki kekuasaan juga kemampuan bertindak sebagai kekuatan kelompok penyeimbang dengan mengusung ide perubahan dan ideologi baru. Dalam bahasa Gramsci, kelompok subordinat, dalam hal ini gerakan perempuan, harus memiliki '*authonomy dan independent*' yaitu kedewasaan dan kemandirian ideologi dan politik, sehingga bisa menggerakkan ide-ide bersama melalui aliansi kelompok subordinat lainnya, dan aliansi ini menumbuhkan apa yang dinamakan Gramsci sebagai '*Collective Will*'. (Stillo; Antonio Gramsci, <http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm>, 1998-1999: 1-15).

*Collective will* diperlukan untuk merebut kesempatan dengan melihat kondisi yang sedang '*in*' pada saat itu. Isu pentingnya kuota berdasarkan rekomendasi Konferensi Perempuan di Beijing pada tahun 1995, menyetujui perjuangan peningkatan jumlah perempuan di legislatif. Salah satu cara yang harus dilakukan ialah membangun kebersamaan (*Collective Will*) untuk melakukan perubahan, memperkuat kerjasama jaringan antar organisasi perempuan serta lembaga-lembaga lain terkait yang sangat diperlukan untuk mempermudah perjuangan. Kerjasama antara jaringan akan membentuk kesamaan kebutuhan dan persepsi positif tentang pentingnya keterwakilan perempuan yang proporsional dengan jumlah perempuan di birokrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai pimpinan.

Upaya perjuangan ketidakadilan gender dalam politik Pemilu pada memerlukan sebuah strategi khusus seperti ketentuan sementara kuota. Hal itu atas dasar terjadinya beberapa hal, yaitu: pertama, adanya amandemen UUD 1945 pasal 28 bahwa warga negara dengan keadaan khusus dapat memperoleh perlakuan khusus. Keadaan khusus perem-



puan adalah warga negara dan pemilih yang lebih banyak dibandingkan laki-laki akan tetapi hak-hak politiknya selama ini terpinggirkan karena dominasi negara (penguasa) sehingga menyebabkan adanya konstruksi yang kuat tentang aktivitas politik dan wilayah publik bersaing dengan laki-laki dianggap sebagai aktivitas yang buruk dan kotor. Semua itu menjadikan keterwakilan perempuan minim di berbagai lembaga negara, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Kesempatan jabatan di birokrasi bukan hanya kesempatan untuk laki-laki, namun juga kesempatan untuk perempuan memperjuangkan keadilan gender di wilayah publik, sehingga memiliki persepsi, akses dan kesempatan yang sama dengan kelompok manapun lainnya berkiprah secara terbuka pemilihan Pemilukada DKI Jakarta 2012. Kiprah secara terbuka ini harus juga dilengkapi dengan dukungan yang memadai dari semua pihak dalam wilayah DKI Jakarta yang hal itu mampu memunculkan kesadaran praktis perempuan untuk terbiasa memiliki ruang publik dan sekaligus mempunyai cukup kekuasaan.

Jadi, kekuasaan dan politik bukan hanya milik kaum laki-laki melainkan ruang bersama. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam Pemilukada. Laki-laki yang selama ini telah nyaman di tampuk kekuasaan dan cenderung menjadi *'single fighter'* dalam pemerintahan DKI Jakarta. Semestinya semua pihak dalam era demokrasi memberikan hak yang lebih kepada kaum perempuan untuk menjadi bagian dari proses demokrasi Provinsi DKI Jakarta, terlebih pemilih perempuan lebih banyak dibanding jumlah pemilih laki-laki. Dukungan juga dibutuhkan dari kaum perempuan sendiri yang seharusnya memberi dukungan yang memadai dalam perjuangan kaum perempuan dalam politik. Perjuangan tersebut berat, namun harus dijadikan upaya bersama dengan membangun jaringan kerja dan ideologi bersama karena tantangan yang dihadapi sangat berat dan meluas di semua kalangan termasuk kalangan perempuan sendiri.

## **B. Identifikasi Masalah**

Perempuan sebagai salah satu *stockholder* di wilayah DKI Jakarta dipandang mengalami diskriminalisasi posisi dibandingkan kaum laki-laki sehingga sangat mungkin kondisi tersebut berakibat pada semakin mengkristal nilai-nilai budaya patriarkhi. Kaum perempuan terkadang turut mendukung dominasi laki-laki atas perempuan serta menerima proses tersebut sebagai suatu yang integral dalam keseharian. Salah satu contoh tidak adanya saling dukung di antara sesama perempuan; adalah tidak ada sebuah gerakan yang mendukung kaum perempuan lainnya untuk mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat yang dikelola dengan terencana. Atau juga menciptakan keberanian kaum perempuan untuk mempertanyakan hak-hak mereka yang selama ini didominasi oleh laki-laki, sekaligus adanya upaya yang konsisten untuk menyatukan kaum perempuan sehingga memunculkan spirit untuk melakukan perjuangan bersama-sama agar tidak lagi mengalami marginalisasi atas dasar budaya dan ketidakadilan dalam politik di Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu hak perempuan adalah maju sebagai kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan daerah 2012. Tak adanya kandidat perempuan baik yang dicalonkan oleh partai politik ataupun melalui jalur independen. Tampak ironis bila dibandingkan kondisi provinsi lainnya di Indonesia seperti Banten, Jawa Tengah, Surabaya, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemikiran tersebut, permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peta kekuasaan politik di Provinsi DKI Jakarta khususnya kaum perempuan?

2. Mengapa representasi perempuan sebagai kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur minim bahkan tidak ada dalam pemilihan umum daerah Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaimana dukungan partai politik dan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kesadaran perempuan berpartisipasi dalam politik praktis?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Melakukan pemetaan dan menganalisis peta kekuasaan politik di Provinsi DKI Jakarta khususnya kaum perempuan.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis representasi perempuan sebagai kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur minim bahkan tidak ada dalam pemilihan umum daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Menjelaskan, mengkritisi dan melakukan evaluasi dukungan partai politik dan pemerintahan DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kesadaran perempuan berpartisipasi dalam politik praktis.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **Signifikansi Teoritis**

Penelitian yang menggunakan landasan kerangka pemikiran kritis yang dalam hal ini analisis kritis berdasarkan pemikiran komunikasi politik, subyektifitas dan otonomi perempuan, kekuasaan politik perempuan dan PemiluKada diharapkan bisa mengungkapkan interaksi dinamis antara keberadaan dan sekaligus realitas real berkaitan dengan minimnya kandidat perempuan dalam PemiluKada. Perempuan acap kali mengalami ketidakadilan dan marginalisasi dalam proses politik dalam proses perjuangan memperoleh kekuasaan politik. Dengan menggunakan paradigma kritis diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan realitas

tersembunyi yang menyebabkan sulitnya kandidat perempuan bersaing dalam memperebutkan tampuk pimpinan di DKI Jakarta.

Penggunaan metode studi kasus dan pendekatan *feminish research* serta didukung oleh pemahaman analisis dan kajian perempuan. Sebagai kandidat politik diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran alternatif, sehingga semakin memperkaya pemikiran ilmu komunikasi politik khususnya, termasuk dalam kajian kritis; sekaligus dapat memberikan asumsi-asumsi baru dalam proses pengembangan perempuan dalam politik yang dianggap selama ini termarginalkan oleh budaya dengan sistem *patriarchal* dan struktur partai politik, negara dan partai politik yang maskulin. Untuk mempercepat pemahaman dan tindakan praktis dalam waktu singkat, maka dengan penelitian ini dapat menghasilkan alternatif konsep dan metode pemberdayaan perempuan di politik, dengan mengedepankan kualitas dan kesadaran subyektif perempuan, sehingga mereka dapat menjadi kandidat dan anggota parlemen yang memberi kontribusi maksimal bagi pengembangan kaum perempuan, kaum marginal, dan bangsa secara umum.

### **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif pandangan dalam memahami dan menyelesaikan konflik sosial dan komunikasi politik di masyarakat umumnya, khususnya bagi para kandidat perempuan, partai politik, dan negara. Pemikiran ini dapat menjadi alternatif konsep gerakan *civil society* sehingga memunculkan kesadaran bahwa segala bentuk tirani dapat dilawan dengan perjuangan yang didasarkan pada kekuatan kolektif masyarakat sipil. Secara singkat penelitian ini bermanfaat secara praktis pada:

1. Kaum perempuan, sebagai alternatif pemahaman dan tindakan praktis kaum perempuan dalam mencalonkan diri sebagai kandidat calon gubernur.

2. Partai politik, menjadi masukan dalam mempertimbangkan kandidat calon gubernur agar lebih memberikan kepercayaan kepada perempuan, yang selama ini hanya diberikan kepercayaan kepada kaum laki-laki.



## **BAB II**

# **Kekuasaan Politik Perempuan**

KEKUASAAN dan Subyektivitas Perempuan dalam Gerakan *Counter Hegemoni*. Menurut *Oxford English Dictionary* Helliwel dan Hindes (dalam Taylor, ed. 1999: 73), terdapat beberapa makna tentang kata kekuasaan, yaitu:

“Kekuasaan adalah memiliki kontrol dan kekuatan memerintah terhadap pihak lain. Para sosiologis memahami kekuasaan dalam konteks ini sebagai kapasitas untuk mendapatkan pihak lain tersebut mau melakukan apa yang diharapkan atau diminta dilakukan oleh pihak lain dimaksud. Seperti Presiden terkait populasi rakyatnya dan orangtua atas anak-anak mereka dan sebagainya”.

Kekuasaan adalah kemampuan legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apa pun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan *agency*, yaitu kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan/perbedaan di dunia. (Taylor, 1997: 73).

Heliwel dan Hindes menjelaskan bahwa kekuasaan (*Power*) adalah beberapa entitas yang bersifat kuantitas, untuk memperoleh lebih banyak atau lebih kurang. Dalam pemahaman ini kekuasaan selalu dilihat sebagai kapasitas-kapasitas untuk memperoleh yang diinginkan sesuai dengan jalan atau cara yang dimiliki. (dalam Taylor, ed, 1997: 73)

Persoalan yang sangat penting dalam kekuasaan adalah distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan dipahami sebagai analogi kesejahteraan. Distribusi kekuasaan yang merata akan mampu memunculkan hubungan yang harmonis antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik (dalam Taylor, 1997: 76) Lebih Lanjut Lukes, (dalam Taylor, 1997: 76), menyatakan bahwa kekuasaan memiliki tiga aspek atau dimensi yaitu; Pertama, dimensi yang berlaku untuk menentukan hasil konflik langsung. Kedua, dimensi yang berlangsung dibalik layar, seperti kepentingan tertentu dari konflik publik langsung. Ketiga, dimensi yang berlangsung atas pikiran orang dan semangat mereka.

Sedangkan Talcott Parson menyatakan kekuasaan adalah '*sense*' dari kapasitas untuk melakukan kontrol atau perintah atas yang lain, sifatnya memaksa (*coercion*). Kekuasaan adalah kontrol atas pihak lain dan sebagai kapasitas legal atau kewenangan untuk bertindak. (1997: 80). Terdapat empat tipe kekuatan sosial yaitu; ekonomi, ideologi, militer, dan politik. Michael Foucault menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan



individual atau kelompok untuk bertindak terhadap yang lain. Bagi Antony Giddens, kekuasaan memiliki hubungan yang saling memahami dalam pikiran ketika terlibat dalam tindakan. Sebaliknya konsep kekuasaan menurut Foucault adalah kemampuan untuk mengontrol dan memerintah tindakan satu atas yang lainnya. Kekuasaan berjalan tidak secara langsung pada individu, tapi melalui struktur sosial dan pola-pola budaya. Dengan kata lain, Lukes menyatakan bahwa proses sosialisasi adalah bagian dari berlangsungnya kekuasaan dalam berbagai masyarakat. Analisa Lukes tentang kekuasaan membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam interaksi sosial yang dipahami sebagai sesuatu yang potensial dari bekerjanya kekuasaan.

Roger Simon mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan kontrol atau kemampuan mengontrol (1999: 83). Kekuasaan, dalam konteks politik, oleh para ahli politik khususnya Machiavelli, merupakan sesuatu yang cenderung dipertahankan. Pemahaman ini seringkali menyebabkan penguasa tidak memperdulikan cara yang ditempuh untuk mempertahankan kekuasaan. Nyatanya memang para penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaannya menggunakan banyak cara termasuk menghalalkan kekerasan. Politik seperti inilah yang dicurigai dipergunakan selama orde baru, termasuk apa yang dialami kaum perempuan di politik.

Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan adalah cara membina hubungan-hubungan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat sipil dan bukan justru mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat sipil. Namun, jika kondisi kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi dialami masyarakat sipil yang disebabkan hegemoni kelompok penguasa dan kaum borjuis termasuk kaum intelektual, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Antonio Gramsci dalam konsep hegemoninya bahwa akan selalu ada

kekuatan-kekuatan yang dipergunakan untuk melawan tekanan dan sikap represif penguasa. Dipercayai juga akan ada cara-cara politik yang kreatif dan cerdas dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mau menerima hegemoni ideologi yang menindas.

Menurut Gramsci, kekuasaan tidak hanya dapat diperoleh dan dipertahankan dengan cara kekerasan, namun juga mampu diperoleh dan dipertahankan dengan *cara soft*, yang disebutnya dengan hegemoni. Kelompok yang selama ini dianggap subordinat penguasa atau bahkan menentang penguasa dapat saja membangun aliansi baru guna menciptakan hegemoni baru. Kelas dominan, sebagaimana paham Marxisme yang dipergunakan untuk menjelaskan relasi kekuasaan di masyarakat borjuis, adalah kelompok dominan yang menggunakan hegemoni negara dan sumber daya ekonomi serta produksi yang berakibat terjadinya subordinasi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan produksi bagi kelas pekerja.

Atas dasar pertimbangan itu, Gramsci menolak pandangan bahwa jalan untuk memiliki kekuasaan hanya dengan menguasai kapital dan sistem produksi semata. Ia juga tidak menerima teori konspirasi sebagaimana dijalankan oleh kaum kapitalis untuk membangun hegemoni, dan mengontrol kelas pekerja yang berada di bawah kekuasaannya, dengan cara-cara kekerasan. Gramsci melihat bahwa pertarungan kekuasaan harus lebih dipahami sebagai pertarungan ide-ide. Kekuatan ide-ide dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku orang untuk menggerakkan perjuangan dengan cara-cara yang lebih manusiawi, termasuk dalam politik (*soft politics*).

Berkaitan dengan pemahaman di atas, Yasraf Amir Piliang dalam bukunya, "Sebuah Dunia yang Menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagat Raya Chaos" (2001: 84), mengumpamakan pemikiran Pemilukada seperti pertarungan di dunia iklan. Beragam ide muncul, bahkan sangat banyak, namun tidak ada pretensi untuk mendominasi

ide-ide yang lain. Ide-ide tersebut bersaing memperebutkan pengaruh dominan di masyarakat. Ide-ide yang lalu dominan adalah ide-ide yang paling kuat menancap pada calon konsumen. Kondisi tersebut merupakan proses penguatan masyarakat sipil.

Gramsci melihat bahwa *civil society* adalah masyarakat di mana dominasi politik dapat dilakukan melalui pertarungan ide-ide. Masyarakat Madani menurut Gramsci adalah masyarakat yang di dalamnya terjadi penciptaan hegemoni politik lewat cara-cara pertarungan ide-ide, bukan pertarungan memperebutkan kekuasaan dengan kekerasan. Pertarungan hegemoni politik seperti yang dinyatakan Gramsci mensyaratkan sebuah masyarakat yang cerdas, memiliki kebebasan dan menganggap kekuasaan bukan akhir dari pertarungan tapi merupakan wacana ideal dan praktis dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan bagi semua anggota kelompok hegemoni.

Perdebatan ide-ide sangat memerlukan kemampuan bahasa dan komunikasi. Dalam pemahaman ini, perempuan sebagai kelompok masyarakat sipil yang hendak melakukan perdebatan dan memperjuangkan ideologi mereka, yaitu terciptanya ideologi keberpihakan atas perjuangan keterwakilan 30 persen perempuan di legislatif, juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan bahasa yang baik. Kemampuan komunikasi dan bahasa akan mampu melahirkan kekuasaan bahasa, sehingga bukan lagi sesuatu yang sulit untuk mengkonstruksi realitas perempuan sebagaimana yang diharapkan kaum perempuan itu sendiri.

Kekuasaan menjadikan perempuan berani bicara untuk menyatakan dan memperdebatkan apa yang mereka inginkan dan harapkan terjadi. Dalam konteks ini diperlukan kemampuan mereka untuk mengoptimalkan kekuatan bahasa dalam mengkonstruksi realitas, sebagaimana dinyatakan oleh *Castell*, (1997: 359) bahwa kekuasaan sampai kapanpun tetap merupakan aturan sosial, yang membentuk, dan mendominasi kehidupan sosial itu sendiri. Lebih lanjut menegaskan bahwa kekuasaan

adalah arsitek dunia sosial. Kekuasaan yang merancang kesesuaian peran dalam interaksi dan struktur sosial (Weatwood, 2002: 5).

Atas alasan tersebut, maka perempuan harus memiliki kekuasaan dan kesempatan menjalankan kekuasaan tersebut sehingga dapat memperoleh pemahaman yang sama dan kekuasaan yang seimbang dengan laki-laki. Kekuasaan yang dimiliki akan menyebabkan distribusi kekuasaan dapat seimbang dan merata bagi perempuan dan laki-laki. Namun, pada kenyataannya kekuasaan hanya ada pada kelompok tertentu yaitu laki-laki yang sangat dominan sehingga berakibat buruk pada realitas perempuan. Dominasi laki-laki dan subordinasi atas perempuan juga karena distribusi kekuasaan yang tidak sama. Laki-laki dengan dukungan sistem *patriarchal* yang selama ini secara sosial dan budaya mendukung mereka dengan leluasa menciptakan realitas yang tetap merugikan perempuan. Pemahaman dan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan atas perempuan kekal dengan beragam bentuk yang kadang upaya itu tanpa sadar didukung oleh perempuan sendiri, keluarga bahkan kekuasaan negara.

Dalam buku *Gender in Political Theory*, Judith Squires (1999: 23) menyatakan pentingnya politik bagi perempuan dengan ungkapan yang sangat terkenal yaitu "*personal is politics*". Politik harus dipahami oleh perempuan sebagai suatu unsur yang sama pentingnya dengan unsur lain dalam kehidupan perempuan, karena pada dasarnya semua hal yang berkaitan dengan kehidupan perempuan selalu berkaitan dengan politik. Politik adalah ide dan sekaligus *power* (kekuasaan). Pemahaman tersebut dikatakan lebih lanjut oleh Judith Squires (1999: 23), bahwa politik tidak bisa dibedakan lagi dari segala sesuatu yang lain. Politik sama pentingnya dengan urusan domestik dan kosmetik, dan bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti sehingga menjadi alasan bagi perempuan untuk menyerahkan urusan politik

kepada pihak laki-laki yang justru kemudian melakukan diskriminasi terhadap perempuan.

Menyerahkan urusan politik kepada pihak laki-laki sebagai kelompok dominan yang selama ini menghegemoni perempuan dan melakukan dominasi ideologi sehingga menyebabkan diskriminasi *gender* dan ketidakadilan bagi konstruksi pemahaman dan perilaku terhadap perempuan di segala bidang diperkuat oleh pemahaman budaya patriarkhi. Menurut Gadis Arivia (1999: 40), pemahaman demikian rupa bahkan terjadi diseluruh dunia termasuk Indonesia yang menjalani politik patriarkhi. Politik patriarkhi merupakan turunan dari karakteristik negara patriarkhi yang mengedepankan kepentingan laki-laki yang juga bekerja atas dasar nilai-nilai patriarkhi. Dominasi laki-laki terjadi dalam semua bidang kehidupan, baik politik, sosial, budaya, agama, dan lain-lain.

Pemahaman patriarkhi tersebut menyebabkan konstruksi konsep tentang perempuan menjadi diskriminatif dan menguntungkan laki-laki. Konstruksi sosial kita, menurut Affan Gaffar (2001: 4), membutakan perempuan (wanita dalam bahasa Affan Gaffar) dan tidak memungkinkannya untuk berperan secara aktif dalam politik. Kekuasaan laki-laki sangat kuat dan didukung oleh sistem sosial dan budaya membuat keikutsertaan perempuan dalam politik sangat jarang mencapai puncak, dan seandainya ada maka lebih banyak karena realitas di luar mereka atau larangan oleh sistem yang melingkupi dan menguasai mereka. Realitas tersebut membuat perempuan harus keluar dan berontak serta tidak mau hanya sekedar dijadikan instrumen politik, pendukung setia partai politik atau dimanfaatkan kenafian mereka untuk mencapai tujuan kelompok yang memiliki kekuasaan atas perempuan tersebut. Sebagai alat mobilisasi politik, perempuan hanya menjadi kendaraan bagi seseorang, kelompok bahkan negara.

Atas alasan tersebut, perempuan harus memiliki *power* untuk mengubah realitas yang merugikan mereka dan menciptakan realitas baru yang adil dan setara. Perubahan dapat dilakukan dengan aktif di politik dan memperoleh kekuasaan serta menjadi bagian dari politik praktis, bagian dari proses pengambilan keputusan, memastikan beragam kebijakan dan undang-undang tidak diskriminatif serta mendukung realitas perempuan, dan yang terpenting adalah mampu melakukan kampanye dan sosialisasi pemahaman bahwa realitas perempuan selama ini merupakan konstruksi laki-laki adalah bukan realitas perempuan yang sesungguhnya. Semua konstruksi tersebut dapat diubah perempuan dan kekuatan sosial lainnya.

Dalam buku *Women and Power* (Weswoods, 1999:1) dinyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan melakukan apa yang diinginkan. Namun *realnya* tidak setiap orang memiliki kekuasaan, dan bagi yang telah memiliki tidak jarang melakukan '*Abuse of Power*' (1999:19) yang terjadi hampir pada semua sektor kehidupan. Kekuasaan pada taraf operasional dalam buku "*Gender, Power and Organization*" by Susan Halford and Pauline Leonard (2001: 27) menjelaskan bahwa 'kekuasaan adalah ketika seseorang mampu merealisasikan keinginan mereka terhadap satu orang atau lebih'. Pernyataan ini mencakup empat hal yaitu:

Kekuasaan dipahami menjadi persoalan individu dalam bertindak di mana seseorang tahu apa yang diinginkan dan mampu untuk meraih keinginan tersebut dengan cara-cara tertentu. Kekuasaan itu mengandung tujuan yang jelas. Kekuasaan dapat dipahami dalam tindakan yang bisa diobservasi. Kekuasaan selalu ada dan penting pada saat konflik terjadi.

Sebagaimana uraian di atas, maka kekuasaan (*power*) bagi seseorang sangatlah penting, dan ini berarti perempuan mesti memiliki kekuasaan agar mampu melakukan apa yang diinginkan serta tahu cara untuk meraih apa yang diinginkan tersebut. Akan tetapi, sebagaimana kon-

struksi sosial telah dalam waktu lama dan terus menerus mengalami subordinasi kekuasaan, perempuan justru menjadi bagian dari dominan *power*. Kondisi tersebut menurut Kamla Bhasin sangat merugikan perempuan terutama dalam bidang politik. Kondisi tersebut menurut Townsend (1999: 19) harus segera diubah dan upaya perubahan tersebut memerlukan kesadaran perempuan untuk melakukan pemberdayaan diri mereka di politik. Perubahan tersebut kemudian diharapkan bukan hanya mampu mengubah relasi *gender* secara hirarki, tapi juga mampu mengubah semua hubungan hirarki di masyarakat, kelompok, kasta, dan suku apapun. Perubahan diperlukan di level manapun dalam sebuah negara, lembaga negara atau pun dalam konteks ini di dalam lembaga kampus sekalipun.

Terdapat beberapa konsep *Power* dalam upaya pemberdayaan perempuan yaitu: Pertama, *Power Over*; Kekuasaan yang nyata/jelas, yaitu kekuasaan seseorang atau *group* untuk mempengaruhi orang atau *group* lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. *Power Over* ini sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan dan juga mampu memenangkan konflik. *Power Over* acapkali dilakukan melalui kekerasan dan menimbulkan ketakutan atau dapat juga melalui kekuatan aturan-aturan sosial yang memaksa kelompok lemah untuk menerima kemauan kelompok lebih kuat dalam perlakuan di kehidupan sehari-hari.

Judith Squieres (1999:32), menyatakan bahwa pusat perdebatan tentang hakikat politik adalah "*nation of power*". Politik digambarkan sebagai sesuatu yang dimiliki, diobservasi dan dapat diukur. Pemahaman inilah yang mempengaruhi konsep *Power over*, yaitu salah satu karakter tentang pandangan dimensional tentang *power*, pandangan ini memfokuskan pada perilaku kekuasaan dalam membuat keputusan atas isu-isu yang mengandung konflik kepentingan secara subyektif. Konsep kapasitas *power* terletak pada bagaimana seseorang atau sebuah kelompok juga

negara mampu mengontrol, mengendalikan, mengarahkan pihak lain sebagai kelompok subordinatnya sehingga mematuhi aturan atau undang-undang yang diterapkan

Sri Latha Batliwata (1999:26) menjelaskan jika seseorang memiliki *power* maka seseorang tersebut memiliki kekuasaan yang akan berlaku sebagai kemampuan melakukan kontrol bukan hanya pada badan/fisik manusia sumber-sumber finansial tapi juga ideologi sehingga kelompok *Power Over* mampu menciptakan aturan-aturan. Sylvia Walby (1999: 26), menyatakan *Power Over* sifatnya *Oppressive, Decisive, dan Destructive* seperti sistem patriarki yang mengusung nilai dominasi oleh laki-laki dan membuat aturan kehidupan perempuan.

Kedua, *Power from Within*, kekuasaan dalam diri perempuan pada dasarnya ada dan harus dimunculkan sebagai sebuah kekuatan diri perempuan tersebut. *Power from Within* ini muncul dari upaya pengenalan diri, melihat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan juga kekuatan agar perempuan mampu mengetahui kapasitas dirinya dalam upaya meningkatkan kekuatan internal dan kepercayaan diri. (Dalam Tonwsend dan Downing, 1996: 4). Hal ini sangat fundamental jika perempuan hendak mengembangkan diri agar memiliki kemampuan menangan sistem *patriarchal* dan kapital mereka. (1999: 30).

Ketiga, *Power With*, Kekuasaan atau kapasitas untuk berkembang dengan yang lain. Seseorang tidak dapat berkembang hanya dengan mengandalkan diri sendiri tapi mereka membutuhkan pihak lain untuk mendukung mereka sehingga semakin memiliki jalan untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan kehidupan sosial yang sangat kompetitif terutama di politik perempuan membutuhkan pihak lain seperti partai politik, organisasi perempuan dan organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintah, media massa, organisasi lawan politik dan *follower/pemilih* atau masyarakat umum. Dalam *power with* diperlukan kemampuan bersosialisasi dengan pihak lain yang akan mendukung kinerja politik



perempuan tersebut. Kekuasaan ini mensyaratkan keterlibatan orang lain yang akan memperkaya kekuasaan *power with*. Karena pada kenyataannya hampir tidak mungkin seseorang tidak membutuhkan orang lain jika aktif di politik.

Keempat, *Power to*, Kekuasaan melakukan hal baru yang bermakna *political power*. Kekuatan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mampu berkata dan mengambil keputusan. Kekuatan untuk mampu melakukan kerja dalam aktivitas mereka. Kekuatan ini diperlukan karena ini merupakan potensi manusia. Potensi yang dimiliki seseorang menyebabkan kemungkinan seseorang tersebut dapat melakukan sesuatu.

Kekuasaan perempuan dalam bahasa Gramsci adalah kesadaran subyektif. Kesadaran subyektif inilah menjadi kekuatan individu-individu untuk melakukan perlawanan terhadap tirani yang berlangsung baik dalam konteks pemikiran maupun realitas praktis. Pada dasarnya yang harus disadari adalah bahwa setiap manusia adalah individu mandiri dan berhak memiliki ruang yang memadai untuk berargumentasi dan menganut pendapat mana saja yang diyakini, walau tetap rasional terhadap adanya kemungkinan dominasi ideologi sebagai bentuk hegemoni baru yang tidak boleh menutup perspektif mana pun untuk menciptakan hubungan-hubungan satu dengan yang lainnya.

Memiliki kesadaran subyektif akan mampu menggerakkan kekuatan dan kekuasaan masyarakat sipil sehingga negara tidak lagi sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan dan kekuatan *collective will* kaum perempuan sebagai kekuatan baru yang semestinya ada dan menjadi bagian dari proses perdebatan yang berlangsung. Ketika masyarakat sipil kuat maka kekuasaan negara berkurang. Gramsci menyatakan bahwa sosialisme dibangun dengan cara memperluas berbagai hubungan yang bersifat otonom dan memerintah diri (*self-governing*). Cara tersebut dilakukan dalam masyarakat sipil secara terus menerus, seiring semakin merosotnya unsur-unsur penekanan, hirarkis dan birokrasi negara.

## A. Komunikasi Politik

Maswadi Rauf (dalam Rochayat: 2006) melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai sebuah kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah. Komunikasi sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain, kegiatan ini bersifat empirik karena dilakukan secara nyata di dalam kehidupan sosial. Sedangkan sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.

Sementara menurut Rochayat Harun (2006), komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti.

Komunikasi ditinjau dari perspektif politik merupakan suatu proses yang menyatu dengan fenomena politik. Walaupun secara teoritis, komunikasi bukan semata-mata hanya sebagai akibat dari fenomena politik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pengamatan, hasil studi telah menunjukkan bahwa adanya pengaruh komunikasi terhadap perilaku pemilihan umum di Amerika Serikat, juga dibuktikan adanya peran komunikasi (massa) dalam mengubah opini (politik) masyarakat. Sehingga pandangan struktural fungsional, yang mengasumsikan bahwa institusi komunikasi melaksanakan peran atau fungsi sesuai dengan yang diharapkan oleh institusi politik sudah mulai ditinggalkan. Kini, perspektif itu terbalik yaitu bagaimana melihat fenomena politik dari perspektif komunikasi. (Arifin Rahman: 1998).

Canggara (2009), menyatakan bahwa komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin keilmuan yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dengan demikian, komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses pengoperan lambang-

lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok (lembaga politik) kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir serta memengaruhi sikap dan perilaku khalayak yang menjadi target politik.

Dalam kamus analisa politik komunikasi politik diartikan sebagai kegiatan penyebaran aksi, makna, atau pesan yang berhubungan dengan sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Sementara Kran S. dan David (1976), menggambarkan komunikasi politik sebagai proses komunikasi massa dan elemen-elemen di dalamnya yang mungkin mempunyai dampak terhadap perilaku politik.

Ilmuwan komunikasi A. Muis (dalam Arifin: 2003), menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada hakikatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik.

### **Unsur-unsur Komunikasi Politik**

Untuk dapat memahami proses komunikasi dalam komunikasi politik maka perlu untuk memahami unsur-unsur yang ada dalam komunikasi, seperti yang digambarkan oleh Harold D. Lasswell (*the founding fathers of communications*) bahwa proses komunikasi adalah “*Who says what whith what channel to whom whith what effect*”. Sesuai dengan definisi ini maka terdapat lima unsur di dalam komunikasi, yaitu; 1. Sumber (*source*) yang biasa disebut sebagai komunikator atau pengirim pesan, 2. Pesan yang dikirim baik verbal maupun non verbal, 3. Saluran atau media sebagai alat penyampai pesan, 4. Komunikan atau penerima pesan, 5. Efek yaitu perubahan perilaku dan sikap sebagai akibat dan pengaruh dari komunikasi (Mulyana: 2007).

Kita coba lihat pemaparannya satu per satu sebagai berikut:

**a. Komunikator Politik**

Dalam komunikasi politik yang dimaksud komunikator adalah individu-individu yang menduduki struktur kekuasaan, individu-individu yang berada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa dan tokoh-tokoh masyarakat (Rochajat: 2006). Komunikator politik yang berada dalam struktur kekuasaan disebut sebagai elit berkuasa, sedangkan elit yang tidak duduk pada struktur kekuasaan disebut elit masyarakat, dengan jumlah terbesar karena elit ini berada dalam berbagai asosiasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan aspek kehidupan.

Menurut Dan Nimmo (2004), terdapat tiga kategori komunikator politik, yaitu; 1) politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, 2) komunikator profesional dalam politik, dan 3) aktivis atau komunikator paruh waktu (*part-time*). Adapun jenis komunikator politik yang akan menjadi bahan analisa pada tulisan ini adalah politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, yaitu orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintahan, baik eksekutif, legeslatif maupun yudikatif. Politikus mencari pengaruh melalui komunikasi politik terutama dalam proses pemilihan umum untuk mendapatkan dukungan dan suara dalam rangka meraih jabatan pemerintahan.

**b. Pesan Politik**

Pesan politik merupakan pernyataan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik secara lisan maupun tulisan, verbal maupun nonverbal, dengan tersembunyi atau terang-terangan, disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya, pidato politik, UU kepartaian, UU pemilu, pernyataan politik, artikel, brosur, buku dan berita surat kabar, ra-

radio, televisi yang berisi ulasan maupun muatan politik dan pemerintahan, puisi politik, spanduk atau baliho, iklan politik, propaganda politik, juga perang urat syaraf (Canggara: 2009).

Membangun pesan politik berarti membangun citra (*image*) politik dan menciptakan opini publik, salah satu pendekatan yang digunakan adalah komunikasi persuasif, yaitu sebuah cara di mana komunikasi dilakukan dengan cara membujuk, mengajak, meyakinkan, dan memberi pemahaman kepada khalayak yang dituju agar mereka melakukan suatu kegiatan atau tindakan sebagaimana yang diinginkan komunikator. Komunikasi persuasif dalam kehidupan politik, khususnya bagi partai politik maupun kandidat dalam Pilkada merupakan hal yang penting untuk diterapkan karena ia menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah kampanye politik (Venus: 2007).

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan politik yang bersifat persuasif, adalah menentukan tema pesan tersebut harus mampu membangkitkan perhatian, selain keinginan khalayak untuk menyaksikan politikus yang akan menyajikan pesan-pesan politik tersebut (Anwar Arifin: 2003). Bertolak dari paradigma khalayak aktif di negara demokrasi, sesungguhnya khalayaklah yang menentukan pesan politik yang harus disampaikan para politikus dalam kampanye politiknya, sehingga pesan politik disusun setelah mengetahui kondisi khalayak, hal itulah baru yang disebut sebagai persuasi dalam arti yang sesungguhnya (*positif*).

### c. Saluran Komunikasi Politik

Saluran komunikasi politik adalah merupakan sarana atau alat dalam menyampaikan pesan politik. Penggunaan media massa dalam komunikasi politik, sangat sesuai dalam upaya membentuk citra diri para politikus dan partai politik untuk memperoleh dukungan pendapat umum. Meskipun penggunaan media massa dalam

proses komunikasi politik tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, namun cenderung mempengaruhi cara manusia mengorganisasikan citra politik, hal itulah yang akan mempengaruhi cara manusia berpendapat dan berperilaku (Anwar Arifin: 2003).

Aspek lain dari media massa adalah kemampuannya dalam membentuk pendapat umum. Adanya pendapat umum dengan *snowball effect* akan sangat mungkin untuk mendorong terbentuknya sikap dan perilaku khalayak atas isu dan pesan politik yang disampaikan (Anwar Arifin: 2003).

Komunikasi politik dengan menggunakan media massa, dinamakan komunikasi massa. Secara singkat Bittner (1980: 10) menyatakan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah orang. Yang dipertegas oleh Maletzke (1963) bahwa komunikasi massa diartikan sebagai tiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah kepada publik yang tersebar.

Media massa memiliki sejumlah fungsi sosial yang berkaitan dengan politik, yaitu: 1) fungsi informasi, 2) fungsi mendidik, 3) fungsi hiburan, 4) fungsi menghubungkan, 5) fungsi kontrol sosial, dan 6) fungsi membentuk pendapat umum. (Arifin: 2003). Itulah sebabnya komunikasi massa sangat erat kaitannya dengan politik dan komunikasi politik.

#### d. Khalayak Politik sebagai Komunikan

Khalayak politik sebagai penerima pesan di sini adalah masyarakat pemilih pada proses pemilu. Pemilih sendiri diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan (partai politik atau kandidat peserta pemilu) untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberi suaranya. (Firmanzah: 2008).

Downs (1957), dalam bukunya '*An economic theory of democracy*', menjelaskan bahwa keputusan memilih selama proses pemilihan umum dapat dianalogikan sebagai perilaku pembelian (*purchasing*) dalam dunia bisnis dan komersial. Di mana dalam dunia bisnis, keputusan pembelian yang salah akan berdampak langsung terhadap subjek/pembeli dengan kehilangan utilitas barang atau jasa yang dibelinya. Sementara keputusan yang salah dalam pemilihan umum tidak memberikan efek langsung bagi pemilih atau pemberi suara kecuali dalam jumlah besar, karena keputusan pemilih adalah bagian kecil dari keputusan kolektif.

Menurut Firmanzah (2008), tipologi pemilih dibedakan berdasarkan pertimbangan dari dalam diri masing-masing pemilih. Terdapat dua orientasi didalam menentukan pilihan dalam pemilu, yaitu; 1) Orientasi '*policy-problem-solving*', di mana pemilih menentukan pilihan berdasarkan pada sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja dan solusi atas persoalan yang ada. 2) Orientasi '*ideology*', adalah pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan kepada faktor ideologi, di mana mereka lebih mementingkan aspek-aspek subyektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis.

Selanjutnya Firmanzah menjelaskan bahwa pertimbangan (*judgment*) pemilih dalam menentukan pilihannya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu; 1) Kondisi awal pemilih, diartikan sebagai karakteristik yang melekat pada diri setiap individu pemilih, seperti sistem nilai dan kepercayaan yang diwarisinya, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, lokasi geografis ataupun lingkungan sosial yang berbeda-beda pula; 2) Media massa, yaitu sejauh mana kemampuan media massa mendistribusikan informasi untuk membangun opini publik tentang partai politik atau kontestan.; 3) Kontestan (partai politik atau kandidat), yaitu bagaimana tentang image, citra, latar

belakang, ideologi, dan kualitas kandidat atau para peserta pemilihan akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pemilih.

Secara umum tipe perilaku pemilih seperti yang dikemukakan oleh Firmanzah (2007), adalah: 1) Pemilih rasional (*rational voter*) yaitu merupakan tipe pemilih yang memiliki orientasi tinggi pada *policy-problem-solving*, di mana mereka lebih mengutamakan pada kemampuan, kinerja dan program-program kerja yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang ada. Pemilih tipe ini biasanya akan lebih mudah untuk 'pindah ke lain hati' ketika penilaian program yang ada tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan. 2) Pemilih kritis, merupakan tipe pemilih yang memiliki perpaduan antara tingginya orientasi pada program dan ideologi, di mana program yang ditawarkan diharapkan sejalan dengan ideologi yang menjadi dasar keyakinan dan nilai-nilai partai politik. 3) Pemilih tradisional, merupakan pemilih yang memiliki orientasi tinggi pada ideologi, dan tidak terlalu melihat kebijakan maupun program yang ditawarkan. Sehingga pemilih tradisional lebih mengutamakan pada kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, faham dan agama sebagai ukuran untuk menentukan pilihan, seperti kekuatan figur kontestan, kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis partai politik atau kandidat. 4) Pemilih skeptis, merupakan tipe pemilih dengan orientasi rendah baik terhadap ideologi maupun terhadap program, sehingga tipe pemilih ini cenderung 'golput' atau tidak menggunakan hak suaranya pada Pemilu, karena mereka beranggapan bahwa proses pemilihan tidak akan banyak membawa perubahan.

**e. Efek Komunikasi Politik**

Media massa mempunyai kemampuan untuk membentuk pendapat umum, komunikasi politik melalui media massa (komunikasi massa) akan sangat mungkin dapat mendorong terbentuknya sikap



dan perilaku khalayak atas suatu isu atau pesan politik yang disampaikan oleh media massa.

Perilaku yang diharapkan sebagai efek dari proses komunikasi politik salah satunya (terutama dalam kampanye politik) adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, karena pemberian suara akan sangat menentukan terpilih atau tidaknya seorang kandidat untuk menempati posisi sebagai Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota, sampai tingkat Kepala Desa (Cangara: 2009).

### **Bentuk-bentuk Komunikasi Politik**

Menurut Anwar Arifin (2003) terdapat berbagai bentuk komunikasi politik yang biasa dilakukan oleh politikus atau aktivis politik untuk mencapai tujuan politiknya dalam upaya untuk mencari, mempertahankan dan meningkatkan dukungan politik. Teknik komunikasi yang dilakukan diarahkan untuk mencapai dukungan-legitimasi (otoritas sosial), yang meliputi tiga tingkatan yaitu, pengetahuan, sikap sampai dengan perilaku khalayak.

Beberapa bentuk komunikasi politik yang sudah lama dikenal dan dilakukan oleh para politikus diantaranya adalah:

1. Retorika politik
2. Agitasi politik
3. Propaganda politik
4. *Public Relations* (PR) politik
5. Lobi politik
6. Kampanye politik

Kegiatan komunikasi politik yang paling semarak dan melibatkan banyak orang adalah kampanye politik, kegiatan ini dilakukan menjelang pemilihan anggota legislatif dan jabatan politik lainnya seperti Presiden, Gubernur, dan Bupati.

Dalam kampanye politik, biasanya semua bentuk komunikasi politik dikembangkan seperti, agitasi politik, propaganda politik, PR politik, dan retorika politik. Namun, di era demokrasi saat ini penggunaan agitasi dan propaganda politik yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, etika, dan moral sudah ditinggalkan (Anwar Arifin: 2003).

Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Kampanye politik diatur dengan peraturan tersendiri baik yang menyangkut waktu, tata cara, pengawasan, dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran, dengan demikian kampanye politik adalah kegiatan yang bersifat formal sebagai ajang perebutan jabatan-jabatan politik.

Agar kampanye politik mencapai sasaran seperti yang diinginkan, diperlukan manajemen kampanye yang baik yang mampu mengembangkan sebuah konsep kampanye total. Dimulai dengan perumusan gagasan vital atau tema kampanye yang persuasif, kemudian disusun perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Jenis kampanye politik terdiri atas; kampanye massa, kampanye tatap muka (antarpersona), dan kampanye organisasi. Jenis yang banyak digunakan oleh para politikus adalah kampanye massa, yaitu kampanye politik yang ditujukan kepada massa (orang banyak). Persuasi kepada massa dilakukan baik melalui tatap muka maupun menggunakan berbagai media, media cetak ataupun media elektronik, dan juga media luar ruang seperti spanduk, baliho, poster, dan baner, juga ada yang

menggunakan *folder* serta selebaran dan bahkan mulai digunakan juga saluran dunia maya atau internet (Anwar Arifin: 2003).

## **B. Kekuasaan Subyektivitas Politik Perempuan**

Menurut *Oxford English Dictionary* Helliwel dan Hindes (dalam Taylor, ed. 1999: 73), terdapat beberapa makna tentang kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan adalah memiliki kontrol dan kekuatan memerintah terhadap pihak lain. Para sosiologis memahami kekuasaan dalam konteks ini sebagai kapasitas untuk mendapatkan pihak lain tersebut mau melakukan apa yang diharapkan/diminta dilakukan oleh pihak lain dimaksud. Seperti Presiden terhadap populasi rakyatnya dan orangtua atas anak-anak mereka dan sebagainya.
2. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.
3. Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan *agency*, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. (Taylor, 1997: 73).

Helliwel dan Hindes menjelaskan bahwa kekuasaan (*Power*) adalah beberapa entitas yang bersifat kuantitas, untuk memperoleh lebih banyak atau lebih kurang. Dalam pemahaman ini kekuasaan selalu dilihat sebagai kapasitas-kapasitas untuk memperoleh yang diinginkan sesuai dengan jalan atau cara yang dimiliki. (dalam Taylor, ed. 1997: 73)

Persoalan yang sangat penting dalam kekuasaan adalah distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan dipahami sebagai analogi kesejahteraan. Distribusi kekuasaan yang merata akan mampu memunculkan hubungan yang harmonis antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik (dalam Taylor, 1997: 76) Lebih Lanjut Lukes (dalam Taylor, 1997: 76), menyatakan bahwa kekuasaan memiliki tiga aspek atau dimensi yaitu:

1. Dimensi yang berlaku untuk menentukan hasil konflik langsung
2. Dimensi yang berlangsung dibalik layar, seperti kepentingan tertentu dari konflik publik langsung.
3. Dimensi yang berlangsung atas pikiran orang dan semangat mereka.

Sedangkan Talcott Parson menyatakan kekuasaan adalah 'sense' dari kapasitas untuk melakukan kontrol atau perintah atas yang lain, sifatnya memaksa (*coercion*). Kekuasaan adalah kontrol atas pihak lain dan sebagai kapasitas legal atau kewenangan untuk bertindak. (1997: 80). Terdapat empat tipe kekuatan sosial yaitu ekonomi, ideologi, militer, dan politik. Michael Foucault menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan individual atau kelompok untuk bertindak terhadap yang lain. Bagi Antony Giddens, kekuasaan memiliki hubungan yang saling memahami dalam pikiran ketika terlibat dalam tindakan. Konsep kekuasaan menurut Foucault adalah kemampuan untuk mengontrol dan memerintah tindakan satu atas yang lainnya. Kekuasaan berjalan tidak secara langsung pada individu, tapi melalui struktur sosial dan pola-pola budaya. Dengan kata lain Lukes menyatakan bahwa proses sosialisasi adalah bagian dari berlangsungnya kekuasaan dalam berbagai masyarakat. Analisa Lukes tentang kekuasaan membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam interaksi sosial yang dipahami sebagai sesuatu yang potensial dari bekerjanya kekuasaan.

Roger Simon mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan kontrol atau kemampuan mengontrol (1999: 83). Kekuasaan, dalam konteks politik, oleh para ahli politik khususnya Machiavelli, merupakan sesuatu yang cenderung dipertahankan. Pemahaman ini seringkali menyebabkan penguasa tidak memperdulikan cara yang ditempuh untuk mempertahankan kekuasaan. Dan nyatanya memang para penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaannya menggunakan banyak cara termasuk menghalalkan kekerasan. Politik seperti inilah yang dicurigai dipergunakan selama orde baru, termasuk apa yang dialami kaum perempuan di politik.

Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan adalah cara membina hubungan-hubungan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat sipil dan bukan justru mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat sipil. Namun jika kondisi kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi dialami masyarakat sipil yang disebabkan hegemoni kelompok penguasa dan kaum borjuis termasuk kaum intelektual, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Antonio Gramsci dalam konsep hegemoninya bahwa akan selalu ada kekuasaan-kekuatan yang dipergunakan untuk melawan tekanan dan sikap represif penguasa. Dipercayai juga akan ada cara-cara politik yang kreatif dan cerdas dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mau menerima hegemoni ideologi yang menindas.

Menurut Gramsci, kekuasaan tidak hanya dapat diperoleh dan dipertahankan dengan cara kekerasan, namun juga mampu diperoleh dan dipertahankan dengan *cara soft*, yang disebutnya dengan hegemoni. Kelompok yang selama ini dianggap subordinat penguasa atau bahkan menentang penguasa dapat saja membangun aliansi baru guna menciptakan hegemoni baru. Kelas dominan, sebagaimana paham Marxis yang dipergunakan untuk menjelaskan relasi kekuasaan di masyarakat

borjuis, adalah kelompok dominan yang menggunakan hegemoni negara dan sumber daya ekonomi serta produksi yang berakibat terjadinya subordinasi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan produksi bagi kelas pekerja.

Atas dasar pertimbangan itu, Gramsci menolak pandangan bahwa jalan untuk memiliki kekuasaan hanya dengan menguasai kapital dan sistem produksi semata. Ia juga tidak menerima teori konspirasi sebagaimana dijalankan oleh kaum kapitalis untuk membangun hegemoni, dan mengontrol kelas pekerja yang berada di bawah kekuasaannya, dengan cara-cara kekerasan. Gramsci melihat bahwa pertarungan kekuasaan harus lebih dipahami sebagai pertarungan ide-ide. Kekuatan ide-ide dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku orang untuk menggerakkan perjuangan dengan cara-cara yang lebih manusiawi, termasuk dalam politik (*soft politics*).

Gramsci melihat bahwa *civil society* adalah masyarakat dimana dominasi politik dapat dilakukan melalui pertarungan ide-ide. Masyarakat Madani menurut Gramsci merupakan masyarakat yang didalamnya terjadi penciptaan hegemoni politik lewat cara-cara pertarungan ide-ide, bukan pertarungan memperebutkan kekuasaan dengan kekerasan. Pertarungan hegemoni politik seperti yang dinyatakan Gramsci mensyaratkan sebuah masyarakat yang cerdas, memiliki kebebasan dan menganggap kekuasaan bukan akhir dari pertarungan tapi merupakan wacana ideal dan praktis dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan bagi semua anggota kelompok hegemoni.

Perdebatan ide-ide sangat memerlukan kemampuan bahasa dan komunikasi. Dalam pemahaman ini, perempuan sebagai kelompok masyarakat sipil yang hendak melakukan perdebatan dan memperjuangkan ideologi mereka, yaitu terciptanya ideologi keberpihakan atas perjuangan keterwakilan 30 persen perempuan di legislatif, juga harus memiliki kemampuan komunikasi dan bahasa yang baik. Kemampuan

komunikasi dan bahasa akan mampu melahirkan kekuasaan bahasa, sehingga bukan lagi sesuatu yang sulit untuk mengkonstruksi realitas perempuan sebagaimana yang diharapkan oleh kaum perempuan itu sendiri.

Kekuasaan menjadikan perempuan berani bicara untuk menyatakan dan memperdebatkan apa yang mereka inginkan dan harapkan terjadi. Dalam konteks ini diperlukan kemampuan mereka untuk mengoptimalkan kekuatan bahasa dalam mengkonstruksi realitas, sebagaimana dinyatakan oleh *Castell*, (1997: 359) bahwa kekuasaan sampai kapanpun tetap merupakan aturan sosial, yang membentuk, dan mendominasi kehidupan sosial itu sendiri. Lebih lanjut menegaskan bahwa kekuasaan adalah arsitek dunia sosial. Kekuasaan yang merancang kesesuaian peran dalam interaksi dan struktur sosial (Weatwood, 2002: 5).

Atas alasan tersebut maka perempuan harus memiliki kekuasaan dan kesempatan menjalankan kekuasaan tersebut sehingga dapat memperoleh pemahaman yang sama dan kekuasaan yang seimbang dengan laki-laki. Kekuasaan yang dimiliki akan menyebabkan distribusi kekuasaan dapat seimbang dan merata bagi perempuan dan laki-laki. Namun pada kenyataannya kekuasaan hanya ada pada kelompok tertentu yaitu laki-laki yang sangat dominan sehingga berakibat buruk pada realitas perempuan. Dominasi laki-laki dan subordinasi atas perempuan juga karena distribusi kekuasaan yang tidak sama. Laki dengan dukungan sistem *patriarchal* yang selama ini secara sosial dan budaya mendukung mereka dengan leluasa menciptakan realitas yang tetap merugikan perempuan. Pemahaman dan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan atas perempuan kekal dengan beragam bentuk yang terkadang upaya itu tanpa sadar didukung oleh perempuan sendiri, keluarga bahkan kekuasaan negara.

Dalam buku *Gender in Political Theory*, *Judith Squires* (1999: 23) menyatakan pentingnya politik bagi perempuan dengan ungkapan yang

sangat terkenal yaitu "*personal is politics*". Politik harus dipahami oleh perempuan sebagai suatu unsur yang sama pentingnya dengan unsur lain dalam kehidupan perempuan, Karena pada dasarnya semua hal yang berkaitan dengan kehidupan perempuan selalu berkaitan dengan politik. Politik adalah ide dan sekaligus *power* (kekuasaan). Pemahaman tersebut dikatakan lebih lanjut oleh Judith Squires (1999: 23) bahwa politik tidak bisa dibeda-bedakan lagi dari segala sesuatu yang lain. Politik sama pentingnya dengan urusan domestik dan kosmetik, dan bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti sehingga menjadi alasan bagi perempuan untuk menyerahkan urusan politik kepada pihak lain yaitu laki-laki.

Menyerahkan urusan politik kepada pihak lain yaitu laki-laki sebagai kelompok dominan yang selama ini menghegemoni perempuan dan melakukan dominasi ideologi sehingga menyebabkan diskriminasi gender dan ketidakadilan bagi konstruksi pemahaman dan perilaku terhadap perempuan di segala bidang diperkuat pemahaman budaya patriarkhi. Menurut Gadis Arivia (1999: 40), pemahaman demikian rupa bahkan terjadi diseluruh dunia termasuk Indonesia yang menjalani politik patriarkhi. Politik patriarkhi merupakan turunan dari karakteristik negara patriarkhi yang mengedepankan kepentingan laki-laki yang juga bekerja atas dasar nilai-nilai patriarkhi. Dominasi laki-laki terjadi dalam semua bidang kehidupan, baik politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain.

Pemahaman patriarkhi tersebut menyebabkan konstruksi konsep tentang perempuan menjadi diskriminatif dan menguntungkan laki-laki. Konstruksi sosial kita, menurut Affan Gaffar (2001: 4), membutakan perempuan (wanita dalam bahasa Affan Gaffar) dan tidak memungkinkan mereka untuk berperan secara aktif dalam politik. Kekuasaan laki-laki sangat kuat dan didukung oleh sistem sosial dan budaya membuat keikutsertaan perempuan dalam politik sangat jarang mencapai puncak, dan seandainya ada maka lebih banyak karena realitas diluar



mereka atau larangan oleh sistem yang melingkupi dan menguasai mereka. Realitas tersebut membuat perempuan harus keluar dan berontak serta tidak mau hanya sekedar dijadikan instrumen politik, pendukung setia partai politik atau dimanfaatkan kenaiifan mereka untuk mencapai tujuan kelompok yang memiliki kekuasaan atas perempuan tersebut. Sebagai alat mobilisasi politik, perempuan hanya menjadi kendaraan bagi seseorang, kelompok bahkan negara.

Konstruksi yang sama tentang perempuan juga terjadi di media massa. Pippa Norris dalam buku *Women, Politics and The Media* (1997: 2) mengutip Kahn bahwa media membedakan antara kandidat laki-laki dan kandidat perempuan dalam liputan kampanye dan juga aktiitas politik mereka. Berita media lebih responsif pada pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat laki-laki. Agenda media juga lebih menyempurnai agenda atau isu kandidat laki-laki dalam acara TV. Media selalu melihat perempuan dengan kehidupan domestik mereka, dan ini yang menjadikan media memiliki *frame* yang berbeda antara kandidat laki-laki dan kandidat perempuan.

Atas alasan tersebut, perempuan harus memiliki *power* untuk mengubah realitas yang merugikan mereka dan menciptakan realitas baru yang adil dan setara. Perubahan dapat dilakukan dengan aktif di politik dan memperoleh kekuasaan serta menjadi bagian dari politik praktis, bagian dari proses pengambilan keputusan, memastikan beragam kebijakan dan undang-undang tidak diskriminatif serta mendukung realitas perempuan, dan yang terpenting adalah mampu melakukan kampanye dan sosialisasi pemahaman bahwa realitas perempuan selama ini merupakan konstruksi laki-laki adalah bukan realitas perempuan yang sesungguhnya. Semua konstruksi tersebut dapat diubah oleh perempuan dan kekuatan sosial lainnya.

Dalam buku *Women and Power* (Weswoods, 1999: 1), dinyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan melakukan apa yang diinginkan.

Namun realnya tidak setiap orang memiliki kekuasaan, dan bagi yang telah memiliki tidak jarang melakukan *'abuse of power'* (1999: 19) yang terjadi hampir pada semua sektor kehidupan. Kekuasaan pada taraf operasional dalam buku *Gender, Power and Organization* by Susan Halford and Pauline Leonard (2001: 27) menjelaskan bahwa *'kekuasaan adalah ketika seseorang mampu merealisasikan keinginan mereka terhadap satu orang atau lebih'*. Pernyataan ini mencakup empat hal yaitu:

1. Kekuasaan dipahami menjadi persoalan individu dalam bertindak dimana seseorang tahu apa yang diinginkan dan mampu untuk meraih keinginan tersebut dengan cara-cara tertentu.
2. Kekuasaan itu mengandung tujuan yang jelas.
3. Kekuasaan dapat dipahami dalam tindakan yang bisa diobservasi.
4. Kekuasaan selalu ada dan penting pada saat konflik terjadi.

Sebagaimana uraian di atas, maka kekuasaan (*power*) bagi seseorang sangatlah penting, dan ini berarti perempuan mesti memiliki kekuasaan agar mampu melakukan apa yang diinginkan serta tahu cara untuk apa yang diinginkan tersebut. Akan tetapi, sebagaimana konstruksi sosial telah dalam waktu lama dan terus menerus mengalami subordinasi kekuasaan, perempuan justru menjadi bagian dari dominan *power*. Kondisi tersebut menurut Kamla Bhasin sangat merugikan perempuan terutama dalam bidang politik. Kondisi tersebut menurut Townsend (1999: 19) harus segera diubah dan upaya perubahan tersebut memerlukan kesadaran perempuan untuk melakukan pemberdayaan diri mereka di politik. Perubahan tersebut kemudian diharapkan bukan hanya mampu mengubah relasi gender secara hirarki, tapi juga mampu mengubah semua hubungan hirarki di masyarakat, kelompok, kasta, dan suku apapun. Terdapat beberapa konsep *Power* dalam upaya pemberdayaan perempuan yaitu:

Pertama, *Power Over*; kekuasaan yang nyata/jelas, yaitu kekuasaan seseorang atau group untuk mempengaruhi/mendapatkan orang atau group lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. *Power Over* ini sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan dan juga mampu memenangkan konflik. *Power Over* acap kali dilakukan melalui kekerasan dan menimbulkan ketakutan atau dapat juga melalui kekuatan aturan-aturan sosial yang memaksa kelompok lemah untuk menerima kemauan kelompok lebih kuat dalam perlakuan di kehidupan sehari-hari. Judith Squieres (1999: 32) menyatakan bahwa pusat perdebatan tentang hakikat politik adalah “*nation of power*”. Politik digambarkan sebagai sesuatu yang dimiliki, diobservasi dan dapat diukur. Pemahaman inilah yang mempengaruhi konsep *Power Over*, yaitu salah satu karakter tentang pandangan dimensional tentang *power*, pandangan ini memfokuskan pada perilaku kekuasaan dalam membuat keputusan atas isu-isu yang mengandung konflik kepentingan secara subyektif. Konsep kapasitas *power* terletak pada bagaimana seseorang atau sebuah kelompok atau negara mampu mengontrol, mengendalikan, mengarahkan pihak lain sebagai kelompok subordinatnya sehingga mematuhi atas aturan atau undang-undang yang diterapkan. Sri Latha Batliwata (1999: 26) menjelaskan, bila seseorang memiliki *power* maka seseorang tersebut memiliki kekuasaan yang akan berlaku sebagai kemampuan melakukan kontrol bukan hanya pada badan/fisik manusia sumber-sumber finansial tapi juga pada ideologi, sehingga kelompok *Power Over* bisa menciptakan aturan-aturan. Sylvia Walby (1999: 26) menyatakan *Power Over* sifatnya *Oppressive*, *Devisive* dan *Destructive* seperti sistem Patriarkhi yang mengunggulkan nilai dominasi oleh laki-laki dan membuat aturan kehidupan perempuan

Kedua, *Power from Within*, kekuasaan dalam diri perempuan pada dasarnya ada dan harus dimunculkan sebagai sebuah kekuatan diri perempuan tersebut. *Power from Within* ini muncul dari upaya pengenalan diri, melihat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan juga

kekuatan agar perempuan mampu mengetahui kapasitas dirinya dalam upaya meningkatkan kekuatan internal dan kepercayaan diri (dalam Tonwsend dan Downing, 1996: 4). Hal ini sangat fundamental jika perempuan hendak mengembangkan diri agar memiliki kemampuan menangani sistem patriarkal dan kapital. (1999: 30).

Ketiga, *Power With*, Kekuasaan atau kapasitas untuk berkembang dengan yang lain. Seseorang tidak dapat berkembang hanya dengan mengandalkan diri sendiri tapi mereka membutuhkan pihak lain untuk mendukung mereka sehingga semakin memiliki jalan untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan kehidupan sosial yang sangat kompetitif terutama di politik perempuan membutuhkan pihak lain seperti partai politik, organisasi perempuan dan organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintah, media massa, organisasi lawan politik dan *follower/pemilih* atau masyarakat umum. Dalam *Power With* diperlukan kemampuan bersosialisasi dengan pihak lain yang akan mendukung kinerja politik perempuan tersebut. Kekuasaan ini mensyaratkan keterlibatan orang lain yang akan memperkaya kekuasaan *power with*. Karena pada kenyataannya hampir tidak mungkin seseorang tidak membutuhkan orang lain jika aktif di politik.

Keempat, *Power to*, Kekuasaan untuk melakukan hal baru yang bermakna *Political Power*. Kekuatan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mampu berkata dan mengambil keputusan. Kekuatan untuk mampu melakukan kerja dalam aktivitas mereka. Kekuatan ini diperlukan karena ini merupakan potensi manusia. Potensi yang dimiliki seseorang menyebabkan kemungkinan seseorang tersebut mampu melakukan sesuatu.

Kekuasaan perempuan dalam bahasa Gramsci adalah kesadaran subyektif. Kesadaran subyektif inilah yang menjadi kekuatan individu-individu untuk melakukan perlawanan terhadap tirani yang berlangsung baik dalam konteks pemikiran maupun realitas praktis. Pada dasarnya

yang harus disadari adalah bahwa setiap manusia adalah individu yang mandiri dan berhak memiliki ruang yang memadai untuk berargumentasi dan menganut pendapat mana saja yang diyakini, walau tetap rasional terhadap adanya kemungkinan dominasi ideologi sebagai bentuk hegemoni baru yang tidak boleh menutup perspektif manapun untuk menciptakan hubungan-hubungan satu dengan yang lainnya.

Memiliki kesadaran subyektif akan mampu menggerakkan kekuatan dan kekuasaan masyarakat sipil sehingga negara tidak lagi sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan dan kekuatan *collective will* kaum perempuan sebagai kekuatan baru yang semestinya ada dan menjadi bagian dari proses perdebatan yang berlangsung. Ketika masyarakat sipil kuat maka kekuasaan negara berkurang. Gramsci menyatakan bahwa sosialisme dibangun dengan cara memperluas berbagai hubungan yang bersifat otonom dan memerintah diri (*self-governing*). Cara tersebut dilakukan dalam masyarakat sipil secara terus menerus, seiring makin merosotnya unsur-unsur penekan, hirarkis dan birokrasi negara.

### C. Pemilukada

Akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu, persamaan hak (*equal rights*) serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*). Dalam negara demokrasi Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Konsep ini disebut sebagai konstitusionalisme yaitu demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan konstitusi. (Miriam Budiardjo: 2008).

Menurut Carl J. Friedrich (1967) konstitusionalisme adalah merupakan gagasan bahwa, pemerintah merupakan suatu kumpulan

aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan, untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat mandat untuk memerintah.

Gagasan perlunya pembatasan kekuasaan pemerintahan mendapat perumusan yang yuridis melalui konsep *Rule of law* yang meliputi empat unsur yaitu:

1. Adanya hak-hak manusia
2. Pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Dan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah:

1. Adanya perlindungan konstitusional, maka setiap negara demokrasi harus memiliki UUD
2. Terdapat badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Ada pemilihan umum yang bebas
4. Ada kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Terdapat pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) (dalam Miriam Budiardjo: 2008).

Pemilihan Umum adalah perwujudan dari demokrasi untuk menyalurkan partisipasi politik rakyat secara langsung. Bila mengacu pada jenis partisipasi politik menurut frekuensi dan intensitasnya, menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan politik yang tidak

intensif (tidak menyita waktu, dan bukan karena prakarsa sendiri) seperti memberi suara dalam pemilihan umum adalah besar sekali.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, *contacting* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen (Miriam Budiardjo: 1998).

Menurut Myron Weiner, terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik yang lebih luas yaitu:

1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik
2. Perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern melalui mana ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru
4. Adanya konflik antar kelompok pemimpin politik, biasanya jika terjadi konflik antar elite maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Dan terjadinya perjuangan kelas menentang kaum aristokrat yang menarik kaum buruh telah membantu memperluas hak pilih rakyat
5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan, sehingga merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik (Syahril Syarbaini: 2002).

Menurut Herbert McClosky (1972), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sementara Norman H. Nie dan Sidney Verba (1975) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek terhadap sistem politik, yang dalam ilmu politik disebut sebagai *political efficacy*. (Miriam Budiardjo: 1998).

Berbagai jenis partisipasi tergambar dalam piramida yang basisnya lebar tetapi menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya intensitas kegiatan politik. Di tengah (antara basis dan puncak) terdapat berbagai kegiatan yang berbeda-beda tingkat intensitasnya, berbeda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen dari individu, termasuk di dalamnya memberi suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik atau menjadi anggota kelompok kepentingan. Namun, bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum (Miriam Budiardjo: 1998).

Pemilihan umum adalah pemindahan hak dari setiap warga negara kepada kelompok yang akan memerintah atas nama kekuasaan dari rakyat. Untuk dapat membentuk pemerintahan yang berdaulat dan



sesuai dengan hati nurani rakyat, maka pelaksanaan pemilihan umum harus berpedoman kepada azas-azas yang telah disepakati bersama yaitu:

1. Langsung, warga negara yang telah berhak memilih dapat secara langsung memberikan suaranya.
2. Umum, dilaksanakan secara serentak dan bersamaan di seluruh wilayah negara.
3. Bebas, pilihan sesuai dengan keinginan dan kehendak setiap individu tanpa paksaan.
4. Rahasia, dilakukan secara rahasia oleh individu tanpa intervensi dari pihak lain.
5. Jujur dan adil, dilaksanakan berdasarkan tata aturan yang berimbang sehingga tidak ada yang dimenangkan ataupun dikalahkan (Syahril Syarbaini: 2002).

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif. Melalui Pemilukada rakyat dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpinnya yang mereka nilai aspiratif, kapabel, kredibel, dan akseptabel. Inilah lompatan demokrasi yang cukup penting dalam sistem politik Indonesia, dari yang bercorak sentralistik di masa Orde Baru menjadi desentralistik di Era Reformasi (Siti Zuhro: 2009).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakilnya secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah terbitnya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemilihan kepala daerah dan wakilnya diselenggarakan secara langsung melalui Pilkada. Dalam UU

ini Pilkada belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (Pemilu), Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2007, tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama “Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah” (Pemilukada). Pemilukada pertama yang diselenggarakan berdasarkan UU ini adalah Pemilukada DKI Jakarta 2007.

Berdasarkan UU no.32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Ketentuan ini diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perorangan yang didukung oleh sejumlah orang sesuai dengan ketentuan UU, yang kemudian disebut sebagai calon independen.

Titik fokus kesuksesan seorang calon dalam memenangkan Pemilukada langsung adalah seberapa besar ia dikenal dan kemudian diyakini mampu oleh masyarakat pemilih, maka proses komunikasi politik dengan berbagai cara pun menjadi penting.

#### **D. Teori Feminist Radikal dalam Memahami Marginalisasi Perempuan**

Kebanyakan Teori Feminis menyatakan bahwa tekanan yang bersifat alamiah dalam hubungan *gender* dilandasi oleh dominasi pemahaman *Patriarchal*. Feminis juga mengkaji distribusi kekuasaan yang tidak merata antara perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan yang dialami perempuan merupakan hasil konstruksi budaya sistem patriarkhi yang sangat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua ini telah melalui proses interaksi yang lama dan terus menerus di masyarakat. Interaksi di masyarakat yang terus mengakibatkan kristalisasi pemahaman tentang perempuan dan laki-laki yang selalu cenderung mendukung

laki-laki sebagai kelompok dominan dan perempuan sebagai kelompok subordinat. Karenanya gender sebagai hasil konstruksi sosial dalam pemahamannya didominasi oleh bias laki-laki yang mengakibatkan tekanan tertentu pada perempuan.

Perempuan berada dalam posisi sebagai subordinat dari dominasi laki-laki. Relasi antara perempuan dan laki-laki tampak sebagai sebuah relasi yang tidak adil, korup, manipulatif, dan bersifat vertikal. Penganandaian kemudian ialah posisi biner seperti atas-bawah, majikan-bawahan, ordinar-subordinat, hitam-putih, siang-malam, dan lain-lain (Murniati, 2004: XIII). Hubungan berpasangan ini merupakan ideologi yang muncul dari gambaran perempuan dan laki-laki. Ideologi ini membuat laki-laki termasuk kelompok manusia yang di atas (nomor satu) dan perempuan berada di bawah (nomor dua).

Dasar sosialisasi secara kuat kemudian membentuk suatu ideologi yang disebut ideologi gender. Ideologi ini membentuk suatu konstruksi sosial yang melembaga dan kemudian menjadi order sosial. Perempuan dan laki-laki dibedakan atas dasar kepantasan dalam peran mereka di keluarga dan masyarakat. Pandangan ini kemudian memberi label kepada laki-laki untuk membedakan kedua realitas tersebut. Perbedaan label ini pada akhirnya menciptakan stereotipe yang membentuk pemahaman atas laki-laki dan perempuan secara berbeda pula. (2004: XVIII). Pandangan atas dasar ideologi gender diperkuat pula oleh pandangan agama dan tradisi. Konsekuensi yang dimunculkan adalah laki-laki diakui untuk menguasai perempuan yang menciptakan hubungan hirarkis. Semua ini dipengaruhi oleh sistem budaya patriarki. Budaya *patriarki* menyebabkan marginalisasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan baik dalam tataran ideal (nilai) maupun dalam tataran praktis-empiris.

Ketidakadilan dalam struktur sosial termanifestasi melalui kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Menurut Feminis sosialis,

ketidakadilan yang dialami perempuan dipahami sebagai akibat dari struktur sosial dan budaya. Akar hubungan dominasi adalah budaya patriarkhi, yaitu laki-laki yang lebih dominan di atas kaum perempuan. Pandangan ini diteguhkan melalui budaya (adat dan tradisi), agama, dan politik, sehingga situasi dominasi seolah sudah mapan dan tak tergoyahkan. Struktur dan kultur inilah yang diperjuangkan perempuan sedunia untuk dibongkar dan diganti dengan yang baru. Pembongkaran struktur tidak mungkin terjadi seketika, karena situasi yang berlangsung telah berjalan selama berabad-abad dalam bentuk ketidakadilan kultural dan struktural.

Kerjasama antara laki-laki dan perempuan memang diperlukan agar perubahan dapat dilakukan, bahkan diperlukan kerjasama di antara organisasi/lembaga swadaya masyarakat (anggota hegemoni) untuk melakukan gerakan secara bersama-sama sehingga struktur yang baru dapat diwujudkan. Proses terwujudnya perubahan struktur hanya dapat dilaksanakan melalui perubahan persepsi dan kemauan politik. Kemauan politik yang selama ini sangat dominan laki-laki telah berakibat pada penguatan pemahaman ketidakadilan gender secara terus menerus yang didukung oleh banyak faktor di masyarakat.

Ideologi gender berbasis patriarkhi menggeser kekuasaan atau wewenang perempuan. Kekuasaan dan wewenang menentukan persoalan hidup yang ditentukan oleh penguasa. Budaya patriarkhi yang menyatakan bahwa kekuasaan itu berbasis laki-laki sehingga dengan wewenang dan kekuasaan tersebut laki-laki dapat menentukan kehidupan dengan leluasa berdasarkan persepsi yang mereka miliki, termasuk terhadap realitas perempuan dalam beragam aspek kehidupan. Seperti fungsi produksi, ekonomi, politik bahkan agama ditentukan oleh laki-laki. Pemahaman ketidakadilan ini berimplikasi terhadap tatanan masyarakat, seperti struktur sosial dan pembagian kerja berdasarkan pertimbangan seksual. Karenanya ada blok pekerjaan yang 'patut' untuk

perempuan dan ada bidang pekerjaan yang '*dianggap hanyapatut*' untuk laki-laki, seperti politik dan penguasaan sumber daya produksi dan ekonomi.

Akibat konkritnya, perempuan menjadi miskin sumber daya, baik sumber daya diri mereka maupun sumber daya politik, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan laki-laki justru sebaliknya, mereka berperan sebagai pemegang kuasa dalam produksi dan ekonomi bahkan politik. Mereka, yang menentukan kualitas produksi dan hidup, dikonotasikan sebagai pihak yang kuat. Hubungan laki-laki dan perempuan berkonotasi 'kuat-lemah'. Akibatnya yang kuat menguasai yang lemah.

Menurut Nunuk L. Purwanti (2004: 86) negara merupakan sistem dimana laki-laki dan perempuan bernaung secara hukum dan politik dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi setiap warga negara. Dan negara, sesuai dengan pembukaan UUD 45, menjamin kemerdekaan setiap warga negara. Pernyataan di atas tentu merupakan konsep ideal yang semestinya berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam konteks perempuan, pada tataran ideal dan praksis, telah terjadi pembusukan pemahaman yang hanya menguntungkan kelompok laki-laki.

Karenanya dapat dikatakan bahwa konsep ideal yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 tidak berkorelasi positif dengan nilai dan pranata praktis. Laki-laki, berdasarkan keberpihakan sosial, budaya, politik bahkan agama, telah berfungsi menjadi kelompok masyarakat yang kuat atau dikonstruksi harus kuat, memiliki kekuasaan dan berhak memaknai realitas hidup sepihak termasuk realitas perempuan. Sedangkan perempuan dipahami dan diperlakukan sebagai kelompok subordinasi serta melakukan tugas yang diharapkan mendukung memperkuat kekuasaan laki-laki.

Negara, dalam hal ini kampus yang memiliki struktural mapan, menjadi lembaga yang justru paling besar kemungkinannya menye-

babkan beragam ketidakadilan terhadap perempuan, karena negara memiliki sumber daya besar dan kuat. Di samping itu negara yang diwakili oleh lembaga-lembaga formal seperti kampus juga memiliki wewenang dan kontrol sehingga dengan leluasa dapat menentukan pemahaman atas diri perempuan sesuai dengan pertimbangan pola pikir dan pengalaman kaum laki-laki. Perempuan menjadi kelompok masyarakat yang banyak termarginalkan dan tertindas dalam tataran ideal dan praktis akibat beragam kebijakan negara yang diambil dan diputuskan oleh penguasa atau kelompok masyarakat berwenang guna memutuskan dan mengambil kebijakan oleh kelompok di mana anggoutanya dominan laki-laki. Jadi sangat wajar jika landasan pikir yang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan adalah landasan pikir yang memenuhi kepentingan kelompok dominan laki-laki.

Persoalan ketidakadilan sosial, budaya, dan politik khususnya disebabkan oleh negara dapat saja dilawan dengan perjuangan memenangkan ideologi yang memihak perempuan. Dengan menggunakan konsep hegemoni Gramsci, maka setiap kelompok subordinat dapat saja membentuk kerja sama atau aliansi dengan kelompok marginal yang lain untuk memperjuangkan sehingga menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan tanpa harus merusak semua perangkat yang sebelumnya telah ada. Organisasi perempuan memang harus bekerja sama membentuk aliansi memperjuangkan ideologi mereka sehingga menjadi kekuatan yang mampu berkuasa untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Alur pikir yang digunakan untuk menganalisa keadaan perempuan adalah teori Feminisme Radikal (2004:127-128). Tokoh Feminis Radikal seperti Alison Jaggar dan Paula Rothenberg mengatakan bahwa perempuan berada di tempat penindasan yang paling bawah. Situasi ini digambarkan dengan:

- a. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai kelompok yang pertama tertindas.
- b. Penindasan terhadap perempuan berakibat ke berbagai kehidupan sosial.
- c. Penindasan terhadap perempuan adalah paling dalam, dan tidak dapat digeser hanya dengan perubahan sosial.
- d. Penindasan perempuan menyebabkan penderitaan kaum korban secara kuantitas dan kualitas, walau penindasan ini tidak selalu disadari oleh pelaku atau korban, tapi sudah integral dalam pikiran dan perilaku anggota masyarakat baik laki-laki dan perempuan.
- e. Penindasan terhadap perempuan dapat memberikan konseptual model untuk mengetahui penindasan yang lain.

Berkaitan dengan kekuasaan perempuan, teori feminis radikal memperlmasalahkan perbedaan seksualitas atas dasar biologis yang kemudian dikonstruksi menjadi perbedaan gender oleh budaya patriarki. Akibat dari konstruksi ini, perempuan teralienasi dari berbagai bidang kehidupan khususnya bidang politik. Analisis perempuan dari sudut politik menjadi pusat perhatian teori ini. Bagi perempuan politik tidak hanya mengatur kehidupan publik saja, melainkan juga kehidupan domestik dan pribadi perempuan, karena keduanya memiliki sebab/akibat yang sama yaitu ketidakadilan gender bagi perempuan.

Feminis Radikal sebagaimana dijelaskan oleh Littlejohn (1996: 234), percaya bahwa tekanan atas perempuan adalah masalah inti yang melingkupi kehidupan mereka sepanjang pengalaman hidup mereka, baik di wilayah domestik maupun publik. Perubahan harus segera dilakukan dengan perdebatan terbuka guna menggugat realitas ketidakadilan tersebut di segala bidang, terutama bidang politik, dan

bukan hanya perubahan hukum untuk memberikan kesamaan hak pada perempuan tetapi juga struktur sosial yaitu sistem patriarkhal.

Dalam pemahaman feminis radikal, perempuan mengalami tekanan dari beragam aturan masyarakat didasarkan atas konstruksi realitas yang mengandung nilai marginalisasi pengalaman perempuan. Teori ini menyatakan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang ada yang dikonstruksi oleh laki-laki. Keadaan itu didukung sepenuhnya oleh struktur sosial, budaya, politik bahkan negara dan dilakukan oleh kelompok elit pada tataran individual, tataran kelompok sosial maupun politik dan juga dengan sistematis telah dilakukan oleh negara. Maka untuk merubahnya harus dilakukan redefinisi terhadap pemahaman yang selama ini tidak berpihak pada perempuan.

Gerakan dapat dilakukan dengan membentuk aliansi antara kelompok dengan perspektif yang sama hingga memunculkan kekuatan untuk mengubah kondisi marginal perempuan dalam sosial, budaya, dan politik. Menurut asumsi pemahaman kritis, perubahan akan mungkin terbuka untuk dilakukan jika perempuan aktif di politik disebabkan panggung politik menentukan beragam kebijakan, dan jika perempuan menjadi bagian dari proses politik maka mereka akan mempunyai kesempatan berjuang menolak ketimpangan sosial budaya serta politik yang terjadi selama ini.

Keadaan semu juga dialami perempuan. Perempuan baik adalah perempuan yang memenuhi sistem belief yang berlaku di masyarakat; dan pemahaman ini sudah secara historis sepanjang masa dialami oleh perempuan. Ini merupakan ideologi yang selalu ada dan hidup di masyarakat serta membentuk pemahaman sosial atas realitas perempuan. Gerakan perempuan masih dianggap sebagai kelompok orang yang tidak ada kerjaan atau perempuan yang tidak baik. Istri baik adalah istri yang selalu siap mendukung suami dan keluarga dan rela berkorban atas keinginan pribadinya.



Dalam konteks tersebut kekuasaan tidak hanya ada pada satu orang, tapi kekuasaan telah terdistribusi sesuai dengan sistem politik baru. Nilai dan pemahaman baru muncul menjadi kekuatan baru di masyarakat. Karenanya masyarakat memiliki alternatif perspektif dan cara untuk memahami realitas diri dan lingkungan mereka. Reformasi memberi peluang lebih besar kepada perempuan untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan untuk memperoleh kekuasaan dengan memenangkan perdebatan ideologi diantara beragam ideologi yang ada di masyarakat.

Upaya untuk keluar dari pemahaman kuat tersebut merupakan hal positif dan harus diperjuangkan secara terus menerus. Dan untuk usaha perubahan itu maka perempuan memerlukan kesadaran besar bahwa sebagai manusia pada dasarnya memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki. Realitas antara keduanya dapat dipertukarkan dalam interaksi yang berlangsung. Ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami perempuan selama ini bukanlah kodrati, tetapi hasil dari upaya sosial dan budaya. Dengan kata lain konstruksi tersebut dapat juga dirubah oleh perempuan dan negara sehingga pemahaman timpang tersebut tidak terus menerus ada, yang kemudian semakin memperkuat konstruksi ketidakadilan perempuan.

Identitas sosial perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi dan sosialisasi yang memberikan kekuasaan dominan yang menguntungkan laki-laki. Sehingga merekalah yang memaknai realitas perempuan di mana ketidakadilan muncul dan merugikan perempuan. Berdasarkan pemahaman sosial, telah terjadi perbedaan kesempatan antara perempuan dan laki-laki untuk aktif dan berpartisipasi di politik. Laki-laki mudah aktif di politik seakan politik adalah bagi laki-laki. Sedangkan, perempuan mengalami banyak kendala baik kendala sosial budaya, agama, ideologi, dan politik untuk aktif di politik. Kondisi atau pemahaman inilah yang kemudian menyebabkan representasi perempuan di

politik dan parlemen tidak signifikan dengan jumlah perempuan itu sendiri sebagai warga negara.

Di samping menggunakan media dalam perjuangan, media sendiri dapat berperan dan melakukan konstruksi realitas dan makna sesuai dengan kecenderungan pihak media, dan proses tersebut menurut pemahaman kritis dipengaruhi ideologi yang dimiliki media. Namun, media massa juga dapat dipengaruhi oleh ideologi dominan. Dalam konteks perjuangan perempuan mengenai UU Pemilu dan UU Partai Politik akan dilihat kecenderungan apa yang dominan dalam peranan media sehingga dapat diketahui apakah peranan media dipengaruhi oleh ideologi hegemoni yaitu ideologi penguasa atau media dipengaruhi oleh perjuangan perempuan, yang mungkin saja dalam isu keterwakilan perempuan menjadi ideologi dominan. Termasuk dalam proses perdebatan tersebut adalah kekuatan bahasa dalam mengkonstruksi realitas.

Perbedaan pemahaman atas bahasa dan realitas di kehidupan sehari-hari merupakan hasil konstruksi anggota masyarakat dalam interaksi yang berlangsung. Kondisi tersebut disebabkan karena bahasa yang diajarkan dan dialami laki-laki dan perempuan tidak sama, tak seimbang dan merupakan implikasi struktur sosial yang telah mengakar dan dipercaya masyarakat. Perbedaan ini kemudian menimbulkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Dalam proses konstruksi tersebut selalu ada dua dunia untuk perempuan baik peran, struktur di masyarakat atau pun fakta yang berbeda di antara keduanya walau untuk persoalan yang sama, sehingga menciptakan pola pikir yang berbeda juga dalam memahami realitas. Proses konstruksi terjadi sepanjang waktu dan biasanya dilakukan oleh pihak yang dominan dalam konteks peristiwa saat itu. Kelompok ini yang menciptakan bahasa dan makna atas realitas dunia dan perempuan.

Menurut Dale Spender dalam bukunya *Man Made Language*, Dale Spender, (1985: 3), bahasa, sebagai produk sosial yang dihasilkan dari

interaksi manusia, senantiasa dapat dimodifikasi; dirubah, ditambah, dikurangi sehingga menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Dalam konteks ini kelompok dominan sangat berpeluang melakukan modifikasi yang menguntungkan kelompok mereka dan merugikan kelompok yang lemah seperti perempuan di politik. Karen Atkenson (1993: 403) menyatakan bahwa bahasa merupakan struktur kehidupan manusia setiap hari, dan sangat kecil kemungkinan manusia melepaskan diri dari proses komunikasi sehingga akan muncul kelompok superior yang menentukan proses interaksi sosial dan acap kali merugikan kelompok inferior. Konstruksi semacam ini telah terjadi dan terus berkembang seiring perkembangan gender yang meyakini bahwa bahasa dapat menghasilkan “*linguistik sexist*”.

Sara Mills dalam bukunya *Language and Gender*, (1995: 39) menyatakan bahwa bahasa yang *sexies* telah terlalu menggeneralisasikan realitas perempuan dan laki-laki, seperti memahami perempuan dengan *stereotype* tertentu, yaitu laki-laki kompetitif sedangkan perempuan cenderung kooperatif. Deborah Cameron (1994: 5) menyatakan bahwa bahasa adalah media representasi dan karenanya tidak mengejutkan jika bersifat *sexies* dalam berbagai penggunaan konvensional. Hal ini telah terjadi dan dialami perempuan yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan sosial mereka.

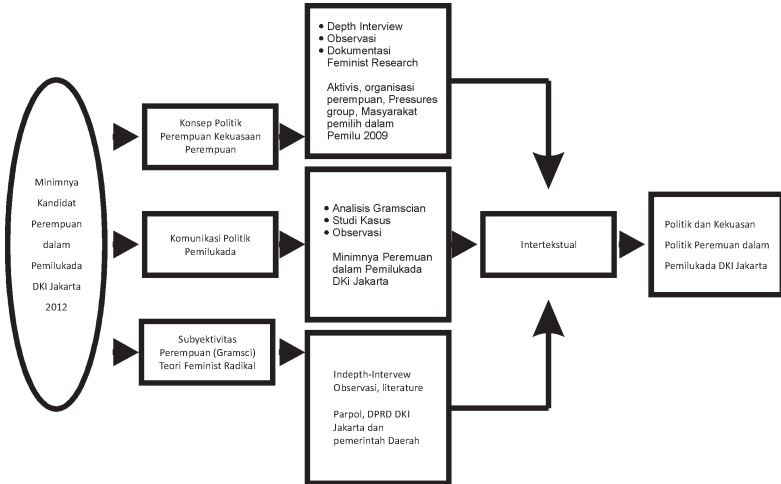
Realitas perempuan yang buruk diperkuat oleh representasi melalui media massa. Media massa membahasakan perempuan dalam kategori-kategori yang justru semakin mengekalkan subordinasi mereka dari dominasi perempuan. Kekuasaan yang dimiliki media mampu mengarahkan dan membujuk bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan, bahkan bagaimana perempuan memahami diri mereka sendiri. Media yang cenderung dikuasai laki-laki mampu menciptakan makna yang juga dipengaruhi kekuatan ideologi dan pemahaman laki-laki berdasarkan struktur sosial sistem patriarkhi.

Atas dasar pertimbangan diatas, maka feminis radikal menurut Liesbet van Zoonen (1992: 37), menyarankan agar perempuan dapat keluar dari dominasi pencitraan yang dilakukan laki-laki, serta harus menciptakan pemahaman komunikasi sendiri sehingga perempuan dapat memiliki ideologi pemahaman sendiri atas realitas dan memengaruhi kehidupan sosial tentang realitas perempuan. Hal ini setidaknya perempuan telah menciptakan alternatif ideologi dan pemahaman tentang diri mereka untuk mengcounter pemahaman berdasarkan sistem patriarkhal yang selama ini sangat merugikan perempuan.

Perempuan harus mampu keluar dari diskriminasi gender yang berlangsung selama ini sehingga mengakibatkan marginalisasi di segala bidang kehidupan perempuan. Dalam upaya tersebut tentu bukanlah hal yang mudah disebabkan tantangan yang sangat kuat dan mengakar dalam kehidupan kaum perempuan itu sendiri. Karenanya diperlukan sebuah gerakan bersama dan untuk kepentingan bersama dilandasi ideologi perjuangan yang kuat dan terarah. Hal itu diperlukan untuk melawan hegemoni yang ada sehingga memungkinkan terjadinya perubahan baik pada level pemikiran, maupun pada level praktis.

### E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis menjelaskan kembali secara singkat dan lugas pemahaman teori dan masalah penelitian dalam kerangka pemikiran penelitian (*research framework*) di bawah ini:





# **BAB III**

## **Metodologi Penelitian**

### **A. Paradigma Penelitian**

Paradigma adalah cara pandang terhadap realitas, dan merupakan sistem kepercayaan mendasar yang mengarahkan alur pikir guna menentukan pilihan-pilihan pendekatan yang digunakan dan bagaimana hal tersebut dilakukan di lapangan oleh peneliti (*The Paradigm Dialog*, Egon C. Guba, et, dalam *The Alternatif Paradigm Dialog*, 1990: 17). Lebih lanjut Guba menyebutkan bahwa paradigma adalah hasil konstruksi manusia (*human constructions*) di mana sangat mungkin terjadi kekeliruan dalam proses tersebut dan mungkin saja terdapat perbedaan memahami sebuah realitas oleh peneliti berdasarkan pilihan paradigma yang akan digunakan untuk memahami realitas atau fenomena. Setiap orang/peneliti mempelajari realitas berdasarkan berbagai pandangan yang diyakini sesuai

dan cocok untuk memahami fakta yang dimaksud atau menjadi obyek penelitian.

Pemahaman terhadap realitas sosial tidak dapat dilakukan sebagaimana adanya, karena realitas 'real' sulit ditentukan dan hal ini dipengaruhi oleh berbagai sudut pandang pihak yang berupaya memahami realitas tersebut. Upaya itu dipengaruhi oleh berbagai pandangan subyektivitas tertentu. Dalam ilmu sosial para ahli berusaha mengetahui perilaku interaksi orang dengan orang dan orang dengan realitas yang melingkupi mereka, serta berusaha mencari dan menemukan penyebab timbulnya sebuah realitas dan manfaat yang dapat digunakan manusia dan lingkungan di mana realitas itu muncul dan berkembang.

Kejelasan paradigma yang digunakan oleh peneliti dalam memandang fakta sosial sangat penting karena akan mengarahkan dengan baik dan konsisten serta menyesuaikan langkah-langkah dan tindakan yang digunakan. Menurut Guba dan Lincoln (1994: 109) dalam bukunya "*Competing Paradigm in Qualitative Research*", dijelaskan bahwa paradigma adalah serangkaian kepercayaan mendasar (*metaphysics*) yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pertama, di mana diutarakan bagaimana realitas dipahami dan dipandang. Menurut mereka terdapat empat paradigma yaitu: *Positivism*, *Postpositivism*, *Critical Theory*, dan *Constructivism*.

Paradigma yang dipakai dalam penelitian mengenai "Politik dan Kekuasaan Perempuan, Studi Kasus Minimnya Kandidat Perempuan dalam Pemilihan DKI Jakarta" adalah Paradigma Kritis atau *Critical Theory*, yaitu Paradigma yang bercirikan *Ideologically oriented inquiry* seperti pendekatan Neo-Marxism, Materialism, Feminism, Participatory Inquiry dan beragam teori lainnya yang termasuk teori kritis (Guba, 1990: 23).

Paradigma Kritis adalah paradigma yang sangat menaruh perhatian terhadap upaya pembongkaran aspek-aspek yang tersembunyi di balik



realitas yang tampak guna dilakukan sebuah kritik dan perubahan (*Critique and Transformation*) terhadap struktur sosial (Guba and Lincoln, 1994: 109). Asumsi-asumsi teori kritikal terkandung pada pemikiran Antonio Gramsci yang dipergunakan oleh penulis, untuk melihat, mengkritisi dan sekaligus menjelaskan fenomena yang ada. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Chantal Mouffe (1979: 9) yang menyatakan bahwa Analisis Gramscian membahas persoalan-persoalan mengenai kelas pekerja (*the working class*), *superstructure*, *civil society*, *collective will*, *class of struggle*, *political praxis hegemonic counter hegemoni* dan lain-lain, sehingga menempatkan pemikiran dan analisis Gramsci sebagai pemikir Marxist, tepatnya Humanist Marxist. Pemahaman senada dinyatakan oleh Nabento Boobio yang menyatakan bahwa tesis-tesis Gramsci memiliki kaitan dengan tradisi Marxist (dalam, Mouffe, 1979: 2)

Dalam tataran ontologi, paradigma Kritikal merupakan '*historical realism*', di mana dipahami bahwa sebuah realitas diasumsikan dapat dipahami sebagai realitas semu, yang dapat dibentuk sepanjang waktu dan diciptakan melalui kekuatan dan kategori sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, nilai *gender*, dan sebagainya, yang telah terkristalisasi dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus dalam sebuah nilai struktur-struktur tertentu yang dipahami dan dikenal sebagai realitas. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian di atas, yaitu berupaya mengungkapkan proses sosial yang telah terjadi sangat lama dan terus menerus dalam fenomena saat ini serta perubahan sosial, politik, budaya, nilai *gender* yang terdapat di balik konstruksi realitas perempuan dalam aktivitas politik.

Epistemologinya bersifat '*transactional and subjectivist*', maksudnya adalah peneliti dan obyek yang diteliti diasumsikan harus saling berinteraksi satu dengan lainnya. Antara peneliti dan obyek dapat saling mempengaruhi atas nilai-nilai yang ada yang merupakan usaha untuk memahami realitas sosial sebagai hasil rekonstruksi manusia dari proses

sosial yang berlangsung. Realitas harus dipahami sebagai kenyataan yang telah diperantarai oleh nilai-nilai (*value mediated findings*) antara si subyek dengan realitas yang sebenarnya. Realitas sosial yang ada dan lekat dengan pandangan atau pihak-pihak tertentu tidaklah ada dengan sendirinya, namun realitas yang dimaksud merupakan fenomena hasil pembentukan atau kreasi manusia dalam proses interaksi yang berlangsung. Interaksi dan transaksi dalam proses sosial inilah yang kemudian menentukan bagaimana bentuk realitas sosial yang ada dan dipahami dengan pandangan apa dan sebagai apa.

Sedangkan tataran metodologi menggunakan pendekatan '*dialogic and dialectical*, yaitu *transactional nature of inquiry*, paradigma ini membutuhkan dialog antara peneliti dan subyek penelitian, di mana diharapkan dialog yang berlangsung haruslah bersifat *dialectical* secara alamiah untuk mentransformasikan penolakan dan kesalahpahaman sehingga menjadi lebih tercapai kesadaran untuk melihat dan menciptakan perubahan sebuah struktur. Giroux (1988), menyebut situasi tersebut dengan "*as transformative intellectuals*" (dalam Egon C. Guba and Yvonna S. Lincoln, 1994: 110).

Kritikal teori, menurut Littlejohn (1996: 227) adalah pendekatan yang sering disebut Marxist, Kaum Marxist sendiri, menurut Littlejohn, juga menolak validitas suatu teori dengan alasan karena kaum Marxist menganggap atau memandang teori sebagai ide dasar yang harus dilengkapi dengan kajian praktis. Teori hanyalah sebuah landasan pikir yang dapat saja dalam proses praksisnya berubah dan kekuatan teori terletak pada tindakan praksis yang dilakukan. Pemahaman tersebut dapat dijelaskan dalam memahami realitas real mengenai peran politik perempuan dalam sistem politik Indonesia.

Dalam sistem politik Indonesia, laki-laki adalah kelompok dominan yang menentukan keputusan-keputusan sosial, budaya, dan politik. Secara struktural anggota parlemen laki-laki masih sangat dominan,

baik karena jumlah mereka (90,2 persen hasil pemilu 1999 dan sekitar 89 persen hasil pemilu 2004) maupun karena asumsi sosio-kultural yang ada dan berpengaruh di tengah masyarakat. Karenanya masuk akal jika keputusan dan kebijakan politik yang diambil hampir tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Realitas ini yang kemudian banyak sekali berakibat pada ketidakadilan *gender*. Konkritnya adalah laki-laki lebih banyak mengambil keputusan dan menentukan 'kepentingan' perempuan. Kondisi ini makin diperjelas bila melihat kualitas anggota legislatif laki-laki dan perempuan. Anggota parlemen laki-laki rata-rata memiliki pengalaman yang cukup berkat proses kaderisasi partai politik yang juga lebih berpihak kepada laki-laki dibandingkan dengan aktor politik perempuan.

Sebagaimana dipahami bahwa pengaruh struktur sosial sangat mempengaruhi realitas kognisi seseorang. Bila dalam sebuah struktur sosial laki-laki lebih dominan maka kebanyakan perempuan hanya melaksanakan keputusan yang telah terlebih dahulu direncanakan oleh kelompok dominan. Tapi, bila perempuan terlibat secara aktif dalam suatu proses pengambilan keputusan, akan terbuka kemungkinan terjadinya alternatif pemikiran yang dapat lebih mendukung kepentingan perempuan. Keseimbangan baik jumlah maupun kualitas anggota legislatif perempuan dan laki-laki akan membuka ruang debat yang sehat sebelum sebuah kebijakan diambil.

Littlejohn (1996: 226) menyatakan bahwa Teori Kritis mempunyai tiga hal mendasar yaitu: Teori Kritis percaya merupakan hal yang sangat penting untuk memahami pengalaman hidup orang menurut konteks persoalan dan peristiwa. Pemahaman di atas kemudian akan menguji kondisi sosial yang selama ini tidak terjangkau atau tersembunyi, disebabkan kondisi yang tidak *equal*. Dalam pemahaman ini pengetahuan berfungsi sebagai kekuatan untuk memahami cara-cara manusia mel-

kukan perubahan. Membuat dan membangkitkan kesadaran untuk menjadikan teori sebagai kesadaran dalam bertindak.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln dalam buku *Competing Paradigms In Qualitative Reseach* (1994) Menjelaskan bahwa pendekatan Teori Kritisal mengandung Implikasi metodologis yaitu *dialogic* dan *dialectical*.

Berdasarkan rujukan teori, paradigma dan pendekatan terhadap realitas sosial, jenis kajian dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang sesuai adalah “Kualitatif”. Metodologi adalah *term* yang merujuk kepada proses, prinsip-prinsip dan prosedur dalam mencoba mendekati masalah dan menemukan jawabannya. Metode kualitatif merujuk pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data; tulisan-tulisan yang dimiliki seseorang atau percakapan yang menghasilkan kata-kata serta melakukan observasi perilaku secara mendalam. (Robert Bogdan and Steven J. Taylor, 1985: 4). Penelitian dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa dan suasana, yang dilengkapi dengan melakukan observasi langsung.

Sebagaimana dijelaskan oleh Alan Bryman (2001: 285) bahwasanya penelitian kualitatif berciri; menghasilkan data bersifat deskriptif interpretif yaitu kata-kata, memperhatikan dan memahami sudut pandang partisipan dalam penelitian, peneliti ‘dekat’ dengan partisipan dan subyek penelitian, berusaha untuk memunculkan asumsi, pandangan dan bahkan teori baru, proses kualitatif analisis isi yang berstruktur, berupaya memahami kontekstual peristiwa, kaya data dan mendalam, sifatnya mikro, mempertimbangkan makna dan settingnya natural.

Artinya terdapat kesesuaian antara masalah penelitian dengan teori-teori yang digunakan dan metodologi/metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini, sehingga diharapkan penelitian ini akan mampu menghasilkan temuan yang tepat, namun tetap mengedepankan keterbukaan bagi munculnya hal-hal baru sesuai dengan apa yang muncul dalam subyek penelitian.

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis karena penelitian mengenai Kekeuasaan Perempuan dalam Politik yang memfokuskan pada persoalan tidak adanya perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Banyak pertanyaan mengapa tidak ada perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta padahal Jakarta adalah kota metropolitan yang mana kualitas perempuan dipandangan lebih baik dari sisi ekonomi, pendidikan dan bahkan sosial budaya. Namun kenyataannya tidak ada satupun perempuan yang diusung partai politik dari enam pasangan calon gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta.

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang memfokuskan pada penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Peneliti tidak terlalu mengontrol peristiwa yang diteliti, namun memfokuskan atas fenomena kontemporer dalam beberapa konteks kehidupan. Menurut Yin dalam bukunya *Case Study Desing and Methode*, (1989: 13) menyatakan bahwa strategi penelitian studi kasus dipakai untuk menguji peristiwa kontemporer yang berkaitan dengan perilaku dan hampir tidak dapat dimanipulasi fakta yang ada.

Untuk memperoleh fakta dan bukti dari kasus yang diteliti, maka peneliti melakukan dengan dua cara yaitu dengan observasi langsung dan *interview* yang sistematis. Lebih lanjut kekuatan studi kasus juga terletak pada kemampuan untuk menggunakan berbagai sumber dana atau *evidences* yang tersedia sehingga dapat memperoleh jawaban dari

permasalahan yang diteliti. Berbagai bentuk sumber data yang dimaksud adalah dokumen, *artifact*, *interview* dan juga observasi (Yin, 1989: 19-20).

Metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian yang bertema-kan 'Perempuan dan Kekuasaan Perempuan' adalah multilevel analisis dengan alasan persoalan marjinalisasi kaum perempuan dan kekuasaan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Walau seharusnya diskriminasi terhadap perempuan terutama di lembaga akedemis semestinya tidak terjadi apapun alasan yang melatarbelakanginya. Namun, pada realitanya tidak dapat dipungkiri bahwa marjinalisasi kekuasaan kaum perempuan pada proses Pemilu pada DKI Jakarta 2012 tetap ada.

Diperlukan gerakan yang revolusioner dan langkah-langkah yang kongkret kaum perempuan dan semua pihak untuk mendatang agar kaum perempuan DKI Jakarta tidak hanya menjadi 'masyarakat kelas dua'. Namun dengan konsep dan langkah yang jelas serta fokus, akan dapat melakukan perubahan mendasar bagi mencapai keadilan perempuan. Oleh karena itu, maka penelitian ini, akan sangat bermanfaat untuk menemukan dan mengetahui pola struktur perempuan dalam struktur sosial kemasyarakatan DKI Jakarta sekaligus mengetahui, menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengkritisi proses juga penyebab marjinalisasi yang terjadi sehingga dapat dilakukan berbagai langkah yang tepat dan sesuai agar perempuan dapat keluar dari kungkungan budaya patriarkhi yang selama ini mereka alami.

Dalam upaya memperkuat temuan yang memfokuskan pada perempuan anggota DPRD, maka penelitian ini juga menggunakan Pendekatan *Feminist Research*. Pendekatan feminis yang digunakan adalah pendekatan feminis radikal yang mempunyai asumsi bahwa perempuan mengalami ketidakadilan dalam proses politik di Indonesia yang berimplikasi pada kedua provinsi yang menjadi obyek penelitian. *Feminist Research* merupakan pandangan dan pemahaman dalam penelitian yang

mengkaji dan membongkar serta mengkritisi realitas kaum perempuan dalam proses politik yang mereka lakukan.

Metode *Feminist Reserch* yang digunakan atas dasar pertimbangan di atas, maka feminis radikal menurut Liesbet van Zoonen (1992: 37), menyarankan agar perempuan dapat keluar dari dominasi pencitraan yang dilakukan laki-laki, serta harus menciptakan pemahaman komunikasi sendiri sehingga perempuan dapat memiliki ideologi pemahaman sendiri atas realitas dan mempengaruhi kehidupan sosial tentang realitas perempuan. Hal ini setidaknya perempuan telah menciptakan alternatif ideologi dan pemahaman tentang diri mereka untuk mengcounter pemahaman berdasarkan sistem patriarkhal yang selama ini sangat merugikan perempuan.

Perempuan harus mampu keluar dari diskriminasi gender yang berlangsung selama ini sehingga mengakibatkan marjinalisasi di segala bidang kehidupan perempuan. Dalam upaya tersebut tentu bukanlah hal yang mudah disebabkan tantangan yang sangat kuat dan mengakar kehidupan kaum perempuan itu sendiri. Karenanya diperlukan sebuah gerakan bersama dan untuk kepentingan bersama dengan dilandasi ideologi perjuangan yang kuat dan terarah. Hal itu diperlukan untuk melawan hegemoni yang ada sehingga memungkinkan.

#### **D. Unit Analisis**

Unit analisis penelitian ini adalah:

1. Kaum perempuan; tokoh partai dan politisi perempuan yang partainya mengusung kandidat pada Pemilu pada 2012 yaitu:
  - a. Partai Demokrat, Neneng Hasanah
  - b. Partai Golkar yaitu Nurul Arifin, M.Si. P
  - c. PDI Perjuangan, Ida Mahmudah, Anggota DPRD Fraksi PDIP

- d. Partai Amanat Nasional (PAN), Wanda Hamidah, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN
2. Pemimpin/Pengurus Partai politik, yaitu:
    - a. Partai Demokrat
    - b. Partai Golkar
    - c. PDI Perjuangan
    - d. Partai Amanat Nasional (PAN)
  3. Tokoh perempuan pemerhati keterwakilan perempuan dalam politik, seperti akademisi/pakar, LSM, dan pengurus Ormas. Tokoh masyarakat, pemerintahan dan tokoh perempuan yang diwawancarai adalah:
    - a. Nadia Umar, M.Si., Ketua KPU DKI Jakarta 2010-2015
    - b. Prof. Dr. Sylviana Murni, M.Si.

## **E. Definisi Konseptual**

Dalam penelitian ini, di antara unit analisis tersebut, dilihat atau diungkapkan peta struktur politik DKI Jakarta agar dapat mengetahui secara konferensif pasti realitas atau posisi laki-laki dan perempuan dalam proses politik DKI Jakarta selama ini, terutama dalam Pemilu pada 2012. Sekaligus menjelaskan asumsi diskriminasi di tengah aktivitas politik tersebut yang banyak merugikan kaum perempuan. Realitas tersebut yang memunculkan implikasi pada persoalan marginalisasi perempuan dalam politik sehingga ketidakadilan dialami perempuan. Atas dasar pemahaman di atas, maka selanjutnya akan ditelaah secara mendalam dalam bentuk-bentuk kritikan, interpretasi, dan pertanyaan tentang bagaimana proses ketidakadilan perempuan dialami perempuan dalam proses politik terutama yang dipercaya secara legal disebabkan oleh partai politik.



Kemudian dilihat dan mempertanyakan mengenai kebijakan provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling maju dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Menemukan dan menjelaskan dukungan pemerintah DKI Jakarta selama ini terhadap partisipasi politik perempuan atau kondisi tersebut dipahami oleh kaum laki-laki yang selama ini dominan merupakan hal yang wajar dan *'inherent'* dalam pemikiran dan tataran praktis segala kebijakan yang ada.

Dalam proses diskriminasi perempuan di beragam kebijakan, ternyata perempuan umumnya cenderung memelihara diskriminasi yang berlangsung secara sadar atau tanpa sadar. Hal itu disebabkan tidak adanya dukungan dan kepercayaan dari pihak perempuan sendiri terhadap kandidat perempuan walau secara jumlah perempuan lebih banyak sebagai pemilih dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam penelitian ini juga dipandang penting untuk mengetahui dan sekaligus mengkritisi gerakan pemerintah, pemerhati LSM, dan pemerhati perempuan DKI Jakarta. Upaya keluar dari diskriminasi politik kaum perempuan apakah menjadi agenda kerja kaum perempuan di wilayah DKI Jakarta. Apakah telah berlangsung kerja sama antara perempuan dari berbagai komponen yang terdapat dalam wilayah DKI Jakarta dalam membentuk aliansi dan menciptakan *collective will* mereka, sehingga kepentingan bersama yang telah muncul, kemudian secara bersama-sama memperjuangkan untuk keluar dari kondisi diskriminatif. Bagaimana bentuk, proses maupun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kerja sama di antara kaum perempuan dan komponen bangsa lainnya. Bagaimana kesadaran kaum perempuan mengenai kekuasaan yang memberi ruang bagi pengembangan peran politik. Berdasarkan beberapa masalah di atas, maka yang menjadi fokus konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Perempuan yaitu salah satu jenis *gender* yang dinyatakan mengalami diskriminasi politik terutama dalam keterwakilan mereka sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
2. Kekuasaan yaitu kewenangan yang dimiliki oleh satu kelompok yang kemudian menyebabkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya.
3. Kekuasaan perempuan yaitu kewenangan perempuan yang didasarkan pada *power with*, *power within*, dan *power over*.
4. Pemilu pada yaitu pemilihan umum daerah yang merupakan ajang politik bagi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang berimplikasi pada kekuasaan yang diperoleh oleh pihak yang memenangkannya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi adalah proses yang berupaya itu mengobservasi realitas politik perempuan yang berlangsung di DKI Jakarta tahun 2012 berkaitan dengan Pemilu pada 2012. Observasi berdasarkan pada struktur birokrasi yang ada. Observasi yang dilakukan adalah observasi terbuka yaitu observasi yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi subyek observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh bukti otentik di lapangan dalam beragam peristiwa baik formal maupun informal mengenai permasalahan marginalisasi perempuan di birokrasi kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peneliti membutuhkan data dalam melakukan penelitian. Bogdan menyatakan metode penelitian kualitatif adalah “prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang ditulis atau diucapkan orang dan perilaku-perilaku

yang dapat diamati” (Bogdan dan Taylor dalam Pawito; 2008: 84). Metode pengumpulan data dilakukan berdasarkan kemampuan peneliti dalam memahami objek penelitian. Pemahaman fenomena dan permasalahan dalam penelitian proses komunikasi *Floor Director* membutuhkan kemampuan dalam bidang komunikasi dan dunia pertelevisian. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki maka peneliti memilih metode observasi. Keberhasilan sebuah metode memerlukan syarat-syarat dalam keilmuan, adapun syaratnya adalah (Nazir dalam Kriyantono; 2009: 108).

- 1) Observasi digunakan dalam riset dan telah direncanakan secara sistematis.
- 2) Observasi harus berkaitan dengan tujuan riset yang telah ditetapkan.
- 3) Observasi yang dilakukan harus dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan bagai suatu yang menarik perhatian.
- 4) Observasi dapat dicek dan dikontrol mengenai validitas dan reliabilitasnya.

Dalam melakukan tindakan observasi peneliti berusaha mendapatkan data dan bersikap senetral mungkin, sehingga kevalidan data menjadi tujuan utama. Metode observasi mempunyai dua jenis metode dalam riset, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

“.....metode observasi di mana periset juga berfungsi sebagai, ikut dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah kehadirannya diketahui ataukah tidak. Observasi partisipan yang dilakukan oleh orang dalam sendiri disebut partisipan membership.....metode ini lebih memungkinkan periset mengamati kehidupan individu atau kelompok dalam situasi riil, di mana terdapat setting riil tanpa dikontrol atau diatur

secara sistematis seperti riset eksperimental.....” (Kriyantono; 2009: 108-109).

Menurut Satori dan Komariah (2009), observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Hal-hal yang dapat diamati selama berlangsung observasi antara lain:

- a) Ruang (tempat) dalam aspek fisiknya
- b) Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi
- c) Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan orang pada situasi itu
- d) Objek, yaitu benda-benda yang terdapat di tempat itu
- e) Perbuatan, tindakan-tindakan tertentu
- f) Kejadian atau peristiwa, yaitu rangkaian kegiatan
- g) Waktu, urutan kegiatan
- h) Tujuan, apa yang ingin dicapai orang, makna perbuatan orang
- i) Perasaan, emosi yang dirasakan dan dinyatakan

Observasi dilakukan untuk melihat, mengetahui dan memperoleh data yang kemudian akan dilakukan interpretasi bahkan kritik atas realitas yang diperoleh dari subyek penelitian yaitu mengenai perempuan dan proses politik mereka di DKI Jakarta untuk memperoleh kekuasaan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperkuat realitas subyek yang diobservasi adalah sebagai upaya untuk memperoleh informasi dari informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak

yaitu pewawancara dan terwawancara. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam atau *depth interview*. Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam (Kriyantono, 2006).

Wawancara dilakukan terhadap informan yang merepresentasikan subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Politisi perempuan
2. Pengururs partai politik
3. Pemerintah DKI Jakarta yang berkompeten
4. Para pakar dan pemerhati masalah perempuan dan politik
5. LSM
6. Masyarakat umum sebagai representasi dari masyarakat DKI Jakarta dalam Pemilu 2012.

## G. Analisis Refleksi Data

Penelitian ini juga diperkuat dengan menggunakan analisis Gramscian yaitu sebuah analisis dalam paradigma kritikal yaitu tepatnya analisis yang menggunakan pandangan hegemoni counter hegemoni terhadap marjinalisasi kekuasaan kaum perempuan pada pemerintahan di lingkungan DKI Jakarta dan kepengurusan partai-partai politik yang mencalonkan kandidat mereka sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Untuk melengkapi kekuatan analisis, dilengkapi menggunakan Analisis Gramscian tentang hegemoni dianggap oleh penulis dapat melihat, memahami, dan menjelaskan konteks di balik realitas kondisi marjinalisasi yang dialami kaum perempuan dalam proses politik DKI Jakarta berusaha memunculkan proses pertarungan posisi antara mas-

asyarakat sipil yaitu kaum perempuan dan masyarakat politik yaitu kaum laki-laki.

Langkah-langkah analisis dan aturan-aturan/prosedur hanya merupakan temuan dasar, namun yang lebih ditekankan adalah meneguhkan adanya hubungan subyektif terhadap material atau teks-teks yang menjadi subyek penelitian, dan itu bukanlah langkah-langkah yang bersifat otomatis, namun yang lebih penting dilakukan adalah tindakan kreatif untuk menginterpretasikan makna-makna teks. Lebih lanjut, Mayring menegaskan bahwa prosedur analisis isi kuantitatif sangat berbeda dengan aturan-aturan analisis isi kualitatif.

Penelitian ini seirama dengan pandangan dari *Feminist Research*, yaitu penelitian yang menggunakan perspektif feminis. W. Lawrence Newman and Allyn & Bacon (1997: 80) menyatakan bahwa metodologi feminis berusaha untuk memberikan suara pada perempuan dan mempertanyakan ulang perspektif yang berorientasi laki-laki, di mana hal itu telah menentukan arah pengembangan ilmu sosial. Lebih lanjut Lawrence dkk., menjelaskan bahwa *feminist research* cenderung menolak analisis kuantitatif dan eksperimen namun mereka menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa penggunaan metodologi kualitatif akan lebih mampu mengkaji dan menemukan substansi jawaban dari permasalahan yang diteliti, bukan hanya landasan permukaan saja. Pendekatan ini juga akan mampu menjelaskan jawaban permasalahan berdasarkan kecenderungan dari subyek penelitian dan bukan kecenderungan pemahaman dari sisi peneliti.

*Feminist research* yang digunakan adalah *feminist research radical* yang mempunyai asumsi bahwa perempuan merupakan sub struktur yang mengalami marginalisasi oleh kelompok dominan yaitu laki-laki. Selama ini dipercaya bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi terhadap peluang mereka memperoleh kesempatan mencalonkan diri sebagai kandidat; disebabkan kekuasaan partai yang menentukan kandidat

diusulkan atau tidak, dan umumnya memegang didasarkan pada kepentingan politik semata.

Penelitian ini direncanakan menggunakan analisis Marxist adalah analisis yang dibangun dari teori-teori Karl Marx mengenai materialisme, basis dan supra struktur, kesadaran palsu dan ideologi, konflik kelas, alienasi, masyarakat konsumen, hegemoni, bahaya terdoktrinasi, dan lain-lain (Berger, 2000: 40-70). Namun dalam penelitian ini akan difokuskan pada analisis Hegemoni menurut Antonio Gramsci. Analisis Marxist Gramscian menurut Reana Mistry (1999: 1) berakibat pada determinasi ekonomi, karena tayangan atau sajian teks media menurut Gramsci, mengandung mekanisme determinasi dan hal itu berlangsung setiap hari sebagai supremasi budaya. Analisis Marxist yang digunakan adalah analisis kritis yang berupaya mempertanyakan, melihat dan menginterpretasikan proses historis perempuan mengalami diskriminasi dalam politik DKI Jakarta.

Supremasi budaya patriarki berlangsung di masyarakat Indonesia yang menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi di politik dan beragam sektor publik lainnya, bahkan dalam kehidupan domestik perempuan. Dalam konteks ini, negara melakukan kekerasan budaya yang berakibat pada kekerasan politik terhadap perempuan. Perempuan kemudian hanya menjadi bagian proses politik di Indonesia. Kondisi tersebut dapat terjadi disebabkan karena sistem politik sebuah negara cenderung dipengaruhi oleh sistem budaya yang ada. Sistem budaya di Indonesia adalah sistem budaya patriarki yang mendukung kepentingan laki-laki dan kurang mendukung kepentingan perempuan.

Pemahaman ini telah menghegemoni, menjadi ideologi dan berlangsung sebagai kultural hegemoni, terjadi sepanjang sejarah perempuan Indonesia. Pemahaman tersebut integral dalam pikiran dan perilaku masyarakat baik sipil maupun negara. Sehingga secara integral pula mempengaruhi sistem politik Indonesia terutama di tataran praktisnya,

walaupun tidak dapat dikatakan hegemoni budaya patriarki tidak terjadi dalam konsep ideal. Dengan pemikiran di atas akan dicoba untuk menganalisa realitas teks surat kabar yang memuat informasi tentang proses perjuangan perempuan dalam memperjuangkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.



## **BAB IV**

# **Refleksi Kekuasaan Politik Perempuan**

PEREMPUAN mengalami ketidakadilan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik yang telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Ketidakadilan yang dialami perempuan khususnya di politik dipandang oleh kaum feminis dan pejuang kesetaraan dan keadilan gender sebagai persoalan yang krusial dan merugikan perempuan. Kondisi itu oleh kaum perempuan disadari telah diakibatkan kaum perempuan hingga abad millinium ini masih mengalami ketertindasan baik di bidang publik maupun domestik. Pembagian ruang publik yang lebih dominan bagi laki-laki dan ruang publik untuk perempuan telah dengan sangat berhasil membagi dikotomi dua wilayah peran yang mempengaruhi aktivitas lainnya termasuk politik.

Kaum perempuan belum menjadi bagian aktif dari proses kerja aktif dalam mengkonstruksi peradaban. Perempuan belum menjadi peng-gagas sejarah (*historical bloc*), tetapi cenderung hanya menjadi bagian alamiah semata dan proses sejarah tersebut mengalami hegemonisasi oleh kaum laki-laki. Salah satu indikator yang dapat dilihat secara jelas di bidang politik, yang mana perempuan berada dalam posisi terpinggirkan, marjinal, dan anti demokratis dari proses politik yang berlangsung. Proses politik diyakini oleh kaum perempuan berkaitan dengan keterwakilan dan aktivitas politik merupakan sarana yang mampu mengubah realitas sosial, ideologi, dan hegemoni termasuk beragam kebijakan publik. Hal itu semua disadari atau tidak adalah bagian dari hegemoni dominan dan ideologi dominan laki-laki yang selama ini sangat menguasai realitas dunia khususnya politik dan kekuasaan.

Hegemoni budaya patriarki yang telah berlangsung sepanjang proses sejarah kehidupan kaum perempuan sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Kondisi tersebut dengan lebih tegas diperkuat dan diteguhkan oleh negara terhadap realitas hidup kaum perempuan yang disebut penindasan sistemik. Pada hakikatnya, negara berkewajiban melindungi warganya tanpa memandang laki-laki atau perempuan, namun faktanya kepentingan spesifik perempuan terabaikan, baik di parlemen, pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.

Seharusnya negara yang memiliki kekuatan hegemoni tidak menimbulkan ketertindasan melainkan menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, bukan sebaliknya yaitu hegemoni negara telah mengaki-batkan dominasi terhadap perempuan dan kaum marjinal lainnya yang secara mapan menciptakan persepsi dan realitas politik yang merugikan kaum perempuan, sehingga terkadang sulit sekali bagi kaum perempuan untuk keluar dari marjinalisasi yang mereka alami. Marjinalisasi inilah

yang kemudian mengakibatkan diskriminasi dalam beragam sektor kehidupan perempuan baik publik maupun privat.

Oleh karenanya, otonomi daerah yang menganut sistem desentralisasi diharapkan dapat mengubah kondisi ketimpangan yang dialami perempuan dalam politik. Penerapan otonomi daerah dengan semangat menggerakkan kekuatan daerah seharusnya mampu menjadi salah satu solusi bagi peningkatan kualitas politik perempuan khususnya, dan kualitas masyarakat secara umum. Hal tersebut penting, agar semakin terbuka kesempatan perempuan terlibat dalam politik, sehingga perempuan memiliki pengalaman politik yang cukup dan dapat bersaing dengan kaum laki-laki yang selama ini dinyatakan mendominasi realitas politik.

Dalam wilayah politik, diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan dan hegemoni negara sangat faktual. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah minimnya bahkan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Dari 6 pasangan calon yang mendaftar tidak memenuhi keterwakilan perempuan. Realitas ini menjelaskan marginalisasi perempuan dalam politik. Kesempatan yang ada memang sudah membuka peluang kepada perempuan, tapi dalam tataran praktisnya perempuan masih belum dipercaya oleh partai politik untuk berkriprah secara terbuka kecuali perempuan tersebut mempunyai kekuatan finansial, terkenal, dan merupakan keturunan yang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Semua bentuk diskriminasi tersebut adalah bagian dari proses *histories* yang telah membudaya yang dalam bahasa Gramsci di sebut *cultural hegemoni*.

Hegemoni terhadap keterwakilan perempuan di parlemen dialami semua daerah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan kultural hegemoni yang terbentuk dari proses yang panjang. Proses budaya tersebut telah dengan sangat kuat mencengkram pemahaman masyarakat baik pada tataran individu, kelompok, organisasi, dan bahkan negara

sebagai lembaga pemerintahan. Kultural hegemoni semakin kuat karena hubungan rakyat dan lembaga pemerintah menganut sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi telah mensejahterakan individu dan kelompok-kelompok tertentu kepada satu pemahaman yang wajib diikuti.

Sistem sentralisasi ini kemudian dinyatakan sebagai salah satu penyebab perempuan menggali ketimpangan secara budaya dan politik. Oleh karena itu, salah satu cara yang harus dilakukan adalah menggantikan sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh UU Otonomi Th. 2003. Otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada seluruh daerah di Indonesia untuk mengatur diri mereka guna pengembangan kemandirian daerah tersebut, termasuk otonomi dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat tertinggal lainnya.

Dengan sistem otonomi daerah seharusnya lebih mendorong pelaksanaan kuota 30 persen ke arah yang lebih baik. Perempuan dalam konteks otonomi daerah semestinya lebih otonom dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan pada masa sentralisasi. Sistem desentralisasi menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk terus berkembang termasuk dalam politik. Realitanya adalah desentralisasi justru banyak memunculkan praktek-praktek lama yang merugikan perempuan. Dan semua itu, atas nama nilai-nilai budaya yang secara subyektif diterjemahkan oleh kaum laki-laki. Kondisi tersebut nyatanya lebih membuat perempuan mengalami dominasi oleh nilai-nilai lokal yang selama ini kurang mendapatkan tempat. Perempuan belum menjadi individu yang menarik dalam kepemimpinan DKI Jakarta, padahal perempuan-perempuan DKI Jakarta diyakini lebih banyak yang berkualitas dan layak mencalonkan diri sebagai Cagub/Cawagub DKI Jakarta.

DKI Jakarta yang merupakan provinsi yang berstatus daerah khusus, sebagai ibukota adalah pusat negara Indonesia, kota metropolitan dengan tingkat pendidikan yang paling maju. Tingkat kualitas hidup yang baik,

dan pengembangan masyarakat yang pesat. Kondisi DKI Jakarta tersebut seharusnya menjadikan masyarakat Jakarta khususnya kaum perempuan selayaknya mauncul menjadi pionir dalam perubahan Jakarta termasuk dalam politik. Dengan kondisi tersebut, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencari kandidat pemimpin perempuan.

Namun kenyataannya, sampai pemilu daerah pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yang baru berlangsung, dari enam calon pasangan calon yang mendaftarkan diri tidak ada satupun dari pasangan Cagub/Cawagub yang diusung oleh partai terdapat kandidat perempuan. Perempuan tidak ada yang mendapat kepercayaan dari partai politik kandidat. Walau pada awalnya ada satu dua perempuan yang menyatakan diri berminat mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun, akhirnya dalam proses Pilkada 2012 tidak terdapat satu orang pun perempuan sebagai kandidat.

Beberapa nara sumber penelitian dinyatakan lumrah saja karena partai politik masih belum percaya dengan kepemimpinan perempuan dan hal itu menjadi alasan bagi partai politik tidak mengusung perempuan sebagai kandidat. Perempuan masih dianggap tidak becus dalam kepemimpinan, Gramsci (Stillo, 1999: 17), menyatakan bahwa hegemoni suatu kelompok mendominasi kelompok lain dalam masyarakat secara fundamental, merupakan sebuah fasisme. Dominasi yang berlangsung berakibat pada kekerasan yang dilakukan kelompok dominan terhadap kelompok subordinat, sehingga yang muncul adalah ideologi dominan yang menguasai realitas kehidupan masyarakat. Dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan berlangsung sepanjang waktu, dalam beragam sektor kehidupan baik publik maupun domestik. Dominasi dalam kehidupan publik seperti politik yang dilakukan negara dan partai politik adalah bentuk kekerasan negara terhadap perempuan di politik. Kekerasan sistematis tersebut mempengaruhi beragam kebijakan yang menyangkut harkat hidup kaum perempuan, bahkan

terjadi politik tubuh perempuan (*Physical sphere*) oleh negara demi kepentingan memelihara status quo.

Dalm hal itu, *civil society* berpikir sebagaimana kelompok dominan atau masyarakat negara berpikir, yaitu berdasarkan nilai-nilai dominan mereka yang dianggap sebagai cara pikir kelompok subordinat. Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah didominasi dan menjalankan rencana dari hegemoni negara dan kelompok dominan/penguasa. Gramsci menyatakan bahwa kelompok subordinat bahkan membantu memelihara status quo kelompok dominan atau penguasa serta tidak berusaha melawan kondisi dominan yang mengakibatkan, apa yang Marxist sebut sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Kaum perempuan di politik lebih banyak dijadikan partisipan pasif, penggembira dalam kampanye dan aset untuk meraih jumlah suara ketika pemilu berlangsung. Kondisi yang berlangsung sepanjang sejarah pemilu di Indonesia ini diakibatkan oleh sistem budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki otonomi dan independensi dalam politik.

Perempuan, dalam konteks ini adalah kelompok subordinat, merupakan bagian masyarakat sipil yang dalam tataran konseptual dan praktisnya sangat di dominasi oleh pemikiran atau konsep kelompok dominan. Perempuan, sampai detik ini, masih memahami diri mereka sebagai bagian dari struktur masyarakat yang mereka anggap lebih tinggi, yaitu laki-laki dan negara. Konsep kehidupan mereka ditentukan dan dipahami budaya kelompok penguasa dan negara. Kelompok penguasa dan negara di dominasi oleh laki-laki yang diakibatkan dari konstruksi sistemik selama ini sehingga kehidupan politik juga di dominasi kaum laki-laki, yang selama ini secara budaya lebih memiliki keterbukaan kesempatan dan diidentifikasi dengan wilayah dan peran publik. Semua itu mempengaruhi penguasa dan kaum laki-laki yang memiliki hegemoni dan ideologi dominan dan memandang perempuan sebagai indi-

vidu berdasarkan pemahaman budaya patriarkhi yang sangat mengutamakan laki-laki dan sekaligus mempengaruhi dan mengikat konstruksi perspektif perempuan dalam memahami diri dan lingkungan mereka.

Dalam tataran konseptual dan realitas sehari-hari, perempuan masih diperlakukan sebagai manusia 'level' kedua, di mana laki-laki berada pada level pertama. Norma budaya menempatkan perempuan pada posisi sebagai *the second sex*, dan perempuan masih menduduki warga kelas dua. Konsep dan konstruksi ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan perempuan dan laki-laki. Salah satunya adalah pembagian ruang kehidupan menjadi 'privat dan publik'. Ruang privat dengan segenap kewajiban domestik adalah milik perempuan, sehingga telah terjadi domestika peran perempuan. Aktivitas perempuan selalu dikaitkan dengan persoalan domestik hanya karena mereka perempuan, sementara dunia publik diperuntukkan bagi laki-laki dan mereka memiliki kesempatan melakukan elaborasi mengenai diri dan kehidupan mereka, tanpa terlalu dipertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab domestik. Dikotomi Privat-publik berakibat pada pemahaman bahwa ruang publik tidak cocok bagi perempuan karena dianggap terlalu berbahaya, kasar atau dikaitkan dengan tanggung jawab perempuan sebagai perempuan, istri dan ibu. Realitas kehidupan selalu terpisah berdasarkan peran-peran privat-publik.

Pandangan tersebut berakibat pada lemahnya keterlibatan dan partisipasi perempuan di ruang publik seperti politik. Politik sebagai ruang publik dinyatakan sebagai aktivitas yang tidak tepat bagi perempuan karena dianggap kotor, kasar, tabu, dan aktivitas yang tidak cocok untuk perempuan. Konstruksi budaya atas realitas perempuan sangat seksies. Pemilihan peran dan kerja cenderung berlangsung karena pertimbangan seksual. Sistem Patriarkhi memunculkan relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki karena pemahaman yang

berbeda atas realitas laki-laki dan perempuan. Pemahaman yang berbeda tersebut mengkonstruksikan *stereotype* atas perempuan sebagaimana perspektif kelompok dominan. Steriotipe ini lalu memunculkan relasi yang timpang atau tidak setara lalu menyebabkan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas (walau dalam jumlah mayoritas) yaitu perempuan. Kondisi tersebut dialami perempuan sepanjang sejarah dan bahkan masih sangat kuat hingga sekarang sehingga sulit sekali untuk mengubah konstruksi budaya tersebut.

Kelompok dominan, yang didukung oleh budaya, sosial dan hubungan sosial bahkan negara, memiliki kekuasaan dan memperlakukan perempuan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai dan ideologi kelompok penguasa dan negara. Hal inilah yang disebut, negara dan kelompok penguasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan bisa dilakukan dalam beragam bentuk, seperti undang-undang dan kebijakan negara lainnya yang dihasilkan oleh negara dan kelompok penguasa, baik parlemen, pemerintah, partai politik atau kelompok *borjuis* yang umumnya atau bahkan keseluruhannya adalah laki-laki.

Antonio Gramsci menyatakan bahwa negara menggunakan 'konsensus spontan' rakyat dalam hal ini kaum perempuan untuk memelihara *status quo* mereka, walau pada dasarnya kondisi kepatuhan tersebut bukanlah kepatuhan yang dilakukan secara sadar dan atas dasar pertimbangan rasional; tapi lebih karena merupakan suatu pemahaman bersama dari ketidakpahaman atas realitas. Keadaan inilah yang disukai oleh negara dan kelas penguasa sehingga rakyat tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu hubungan negara dan rakyat. Hubungan yang tidak sehat inilah yang menyebabkan marginalisasi perempuan dalam politik khususnya dan sebagai warga negara pada umumnya.

Marjinalisasi dan kekerasan negara yang dialami oleh perempuan dalam segala bidang, khususnya di politik, salah satunya merupakan hasil dukungan persepsi budaya sebagaimana diterangkan di atas.



Perempuan merasa bahwa pemahaman budaya itulah yang lazim dan sesuai untuk mereka, sehingga kondisi partisipasi perempuan dalam politik menjadi kecil, dan inilah yang terus dijaga kelompok dominan dan penguasa sehingga perempuan selalu berada dalam kondisi marjinal dalam politik. Pemahaman budaya itu jugalah yang mau tidak mau 'memaksa' perempuan untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati oleh kelompok dominan terhadap mereka.

Berkaitan dengan fakta tersebut tampak jelas bahwa diskriminasi dan marginalisasi politik berlangsung terus terhadap kaum perempuan karena pada hakekatnya kaum perempuan adalah kelompok subordinat dalam pemahaman budaya patriarki, ekonomi dan bahkan penafsiran agama. Dalam hal ini, Murniati (2004: xiii) menyatakan bahwa perempuan berada dalam posisi subordinat dari dominasi laki-laki. Relasi antara perempuan dan laki-laki tampak sebagai sebuah relasi yang tidak adil, korup, manipulatif, dan bersifat vertikal. Marginalisasi yang dialami perempuan karena sistem budaya patriarki dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam tataran ideal-konseptual maupun dalam tataran praktis-empiris. Bentuk-bentuk marginalisasi tersebut adalah: marginalisasi terhadap perempuan, marginalisasi dalam negara (politik, ekonomi dan lain-lain), marginalisasi dalam agama dan tempat ibadah, marginalisasi dalam organisasi atau tempat kerja, marginalisasi dalam keluarga, dan marginalisasi dalam diri pribadi.

Marginalisasi ini juga diperkuat dari pemahaman tentang perempuan dan lingkungan mereka yang didasarkan pada stereotipe yang dilekatkan oleh negara, masyarakat dan diperkuat oleh media massa serta pemahaman perempuan itu sendiri (Murniati, 2004: XX). Stereotipe yang dilekatkan pada perempuan atau juga kelas tertentu sangat merugikan karena seperti mengkotak-kotakkan perempuan dalam pemahaman baru yang tidak benar dan cenderung menguntungkan

satu kelompok. Pemahaman tersebut menjadi bagian dari pengembangan budaya yang dialami perempuan setiap harinya mulai dari keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, dan juga politik. Perempuan, secara tidak sadar, memahami diri mereka berdasarkan stereotipe yang mereka terima seperti pembagian ruang laki-laki yang diidentikkan dengan ruang publik, sedangkan ruang dan aktivitas perempuan selalu terkait dengan hal-hal yang bersifat privat.

Dalam bidang politik, Marjinalisasi yang terjadi kontrol di tubuh partai politik menyebabkan aktris politik perempuan kesulitan menembus level-level strategis di kepengurusan partai yang lalu berimbas pada sulitnya mereka menjadi kandidat legislatif. Pada fase selanjutnya situasi ini menyebabkan kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkualitas secara politis menjadi menipis dan berujung pada terpeliharanya hegemoni laki-laki dalam ruang publik/politik. Padahal, sebagaimana dipahami, politik merupakan ruang strategis bagi lahirnya berbagai keputusan negara yang bersifat mengikat.

Pemahaman terhadap pembagian ruang privat dan publik beserta implikasi realnya sudah dimulai semenjak anak dikandung dan berlanjut pada saat lahir dan tumbuh. Semua proses berlangsung berdasarkan pembagian dua ruang tersebut secara jelas. Konstruksi tersebut terus berlanjut di keluarga, walau memang tergantung dari pemahaman keluarga tersebut atas ruang publik dan privat. Pembagian ruang ini juga berpengaruh bahkan menentukan proses perempuan di ruang publik. Aktivitas perempuan di ruang publik tidaklah semudah laki-laki. Perempuan harus bergejolak dengan diri sendiri, keluarga bahkan terkadang dengan lingkungannya tentang apakah tindakan mereka sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang dipahami oleh budaya atau tidak; juga pertanyaan apakah aktivitas mereka membuat keluarga terbelenggu atau terurus dengan baik. Pertanyaan yang selalu muncul ketika perempuan aktif di ruang publik dan perempuan tersebut telah

menikah adalah bagaimana membagi waktu antara keluarga dengan kerja atau aktivitas yang dilakukan. Apakah suami keberatan atau tidak, lalu bagaimana dengan anak-anak, dan lain sebagainya.

Kondisi marjinal akibat pembagian ruang publik dan privat diperkuat oleh budaya patriarkhi yang berpengaruh dalam semua bidang kehidupan perempuan yang mempengaruhi kehidupan politik mereka. Dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia, perempuan merupakan bagian dari struktur yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga pemahaman tersebut mempengaruhi perlakuan terhadap kaum perempuan dalam tataran praktis di politik. Persepsi tersebut terbukti dengan banyak sekali pranata sosial, aturan-aturan, dan peran-peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan perbedaan gender. Secara kuat, budaya akan memilah tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, kehidupan politik tidak dapat dilepaskan dari budaya lokal atau konsteks masalah yang muncul dan kondisi tersebut terjadi di Indonesia dan marjinalisasi dan diskriminasi politik bagi kaum perempuan terus berlangsung.

Dalam bidang ekonomi perempuan mengalami kemiskinan sumber daya pada umumnya karena budaya dan sosial menempatkan perempuan dalam ruang private. Akan dianggap sah dan lumrah kalau suami melarang istrinya bekerja hanya karena alasan-alasan personal walau perempuan memiliki kapasitas dan kualitas yang bagus. Pekerjaan perempuan hanya dipahami sebagai pendukung keluarga, dan ini berakibat pada rendahnya daya kompetitif perempuan secara ekonomis. Situasi ini kemudian berimbas pada pemiskinan struktural terhadap perempuan. Perempuan umumnya tidak memiliki sumber dana yang cukup jika mereka ingin terjun ke politik.

Pemahaman bahwa politik adalah aktivitas yang tabu bagi perempuan, kotor, kasar, dan tidak cocok karena aktivitasnya dilakukan di ruang publik. Persepsi tersebut merupakan hasil dari konstruksi dan kampanye

bahwa politik adalah dunia yang kotor dan berlangsung di ruang publik, yaitu ruang yang tepat dan diperuntukkan bagi laki-laki. Politik dikonstruksikan bukan wilayah yang layak atau sesuai bagi perempuan, dan sekaligus membentuk pemahaman bahwa politik tidak penting bagi perempuan. Pemahaman ini akan terus ada dan bahkan dapat saja semakin ditegaskan oleh media massa dalam beragam pilihan tayangan dan informasi yang mendiskreditkan peran dan aktivitas politik perempuan.

Hal itu ditegaskan oleh Arivia, dalam artikel 'Aspirasi Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan', *Jurnal Perempuan* (1999: 5), bahwa akibat dari konstruksi sosial dan budaya patriarkhi, perempuan menjadi manusia apolitis, dipandang sebagai kelompok yang tidak mempunyai kepentingan atas politik melainkan hanya sebagai kelompok penjaga gawang moral. Negara beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki kepentingan karena ini memang bukan dunia perempuan. Dan konstruksi sosial tentang perempuan dan dunia mereka diterjemahkan oleh laki-laki berdasarkan nilai-nilai budaya. Persoalannya adalah ketika secara integral pemahaman tersebut berimplikasi kepada pemahaman terhadap realitas perempuan.

Sepanjang sejarah politik Indonesia, perempuan berada dalam kondisi marjinal. Hal itu dapat dilihat dengan partisipasi dan keterwakilan mereka yang rendah di parlemen, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Fenomena tersebut, ditegaskan oleh Arivia (1999: 4) yang menyatakan bahwa situasi yang dialami perempuan dapat dipahami dengan menggunakan *fraternalisme* yang mengakibatkan eksklusifitas perempuan di dalam ruang publik. Politik adalah dunia publik yang didominasi laki-laki karena dalam pemahaman yang diberikan, politik adalah dunia yang cocok dan diperuntukkan bagi laki-laki.

Politik berkarakter laki-laki yaitu rasional, independent, kuat, memperhatikan kepentingan umum dan lain-lain. Sedangkan, perem-

perempuan ada di ruang domestik (privat), menjalankan fungsi reproduksi, lemah, irasional, dependent, hanya memperhatikan diri sendiri, dan lain sebagainya. Semua pemahaman ini adalah bangunan budaya patriarki yang sangat mendukung laki-laki dan menempatkan laki-laki pada struktur utama dibandingkan perempuan yang dianggap sebagai makhluk level kedua. Padahal sebagai warga negara, perempuan sudah seharusnya memperoleh perlakuan yang sama, baik dalam undang-undang maupun dalam kehidupan praktis serta tidak boleh mengalami diskriminasi politik di mana negara terlibat dalam proses tersebut.

Dalam pandangan feminis radikal, negara secara struktural melakukan marjinalisasi dan penindasan terhadap perempuan. Contoh nyata adalah UU Perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai pekerja tambahan penghasilan keluarga sedangkan suami berperan sebagai pencari nafkah utama. Kondisi-kondisi ini melemahkan daya kompetisi perempuan untuk menemukan sosok diri mereka sebagai manusia dan secara sistematis lalu tergantung secara sosial, ekonomi, dan politik kepada laki-laki.

Diskriminasi dan ketidakadilan gender atas diri perempuan melalui sistem patriarkhal sebenarnya tidak semestinya terjadi atau bahkan tidak boleh terjadi. Negara merupakan sistem di mana laki-laki dan perempuan bernaung secara hukum dan politik dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan setiap warga negara. Hal itu juga sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap warga negara. Tapi dalam kehidupan realnya telah secara sistematis terjadi pembusukan pemahaman yang membela kepentingan laki-laki dan kelompok dominan lainnya, termasuk negara. Konsep ideal dalam UUD 1945 tidak berkorelasi positif dengan keadaan praktis di mana perempuan tetap mengalami diskriminasi dalam beragam bidang kehidupan mereka.

Diskriminasi dalam politik adalah persoalan yang krusial karena kondisinya sangat sulit dan kritis. Penolakan diskriminasi sebenarnya

bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Hal ini berarti, negara atau siapapun dan atas nama apapun, seharusnya tidak boleh mendiskriminasi hak-hak politik perempuan, karena hak-hak politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia (HAM). Namun dalam tataran praktis, diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlangsung, bahkan dilegalkan dalam UU seperti UU perkawinan, KUHP dan lain-lain.

Dalam realitas praktis, perempuan mengalami diskriminasi politik, sosial, budaya, dan ekonomi baik secara formal dalam undang-undang yang dilakukan negara, maupun yang terjadi secara informal yaitu nilai-nilai budaya. Hal ini merupakan refleksi perlakuan atas diri perempuan hanya karena mereka perempuan. Dengan kata lain secara struktural institusional kenegaraan, perempuan mengalami diskriminasi politik yang mencolok. Kondisi tersebut dapat dilihat dari minimnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen dari pertama Indonesia melaksanakan pemilihan umum sampai pemilihan umum terakhir yang dilaksanakan dalam era reformasi dan demokrasi yang lebih baik. Kondisi yang sama bahkan tetap terjadi setelah adanya penetapan kuota 30 persen bagi calon legislatif perempuan.

Minimnya perempuan di posisi strategis dan jabatan publik, yang memungkinkan perempuan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, tidak hanya terjadi di DPR Pusat, tapi kondisi lebih parah terjadi di DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di lembaga-lembaga publik dan politik lainnya. Keterwakilan perempuan yang rendah ini pada akhirnya sangat membatasi peran mereka untuk mempengaruhi kebijakan agar lebih *sensitif gender*. Berdasar situasi di atas, maka ketertuan kuota 30 persen bagi perempuan di legislatif bukanlah merupakan sebuah tujuan, melainkan hanya berperan sebagai instrumen menuju tataran tujuan

perjuangan selanjutnya, yaitu kesetaraan dan keadilan antara laki laki dan perempuan.

*Nadezhda Shvedova dalam buku 'Perempuan di Parlemen bukan sekedar Jumlah'* (1999: 22), menjelaskan beberapa kendala yang mengakibatkan perempuan tidak terjun ke politik. Kendala-kendala itu adalah:

1. Kelaziman “model maskulin” mengenai kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan.
2. Kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan; terbatasnya akses jaringan politik; dan meratanya standar ganda.
3. Kurangnya hubungan kerjasama dengan organisasi publik lainnya.
4. Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang dibangun dengan baik, baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya.
5. Hakikat sistem pemilihan, yang barangkali atau tidak mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan.

Sebagai kelompok manusia tertindas, perempuan harus mampu menciptakan gerakan perjuangan untuk mengubah berbagai kendala untuk terjun ke politik yang selama ini mereka alami. Perempuan harus melakukan perjuangan mendobrak dominasi negara dan kelompok penguasa dengan ide dominan mereka. Jadi dengan kata lain tidak mungkin ada perubahan yang signifikan, jikalau hanya mengharapkan pada negara. Negara harus diberi pemahaman untuk memberi peluang dan kesempatan perubahan dengan memberikan hak-hak politik kepada perempuan. Tapi kekuatan, semangat dan harapan perjuangan utama tetaplah pada subyektivitas perempuan sebagai masyarakat sipil. Caranya perempuan harus membangun kelompok aliansi perjuangan

melawan ketertindasan yang dilakukan oleh negara dan kelompok penguasa melalui undang-undang.

Negara memang tidak semestinya melegalkan kekerasan yang mengakibatkan marginalisasi terhadap partisipasi dan keterwakilan perempuan dipolitik. Negara, sebagaimana fungsi dasarnya, tidak boleh melakukan penindasan pada kelompok manapun dalam negara tersebut. Meski demikian, sebagaimana dipahami oleh Karl Marx dengan '*doctrin of the state.*', negara adalah:

1. Sebuah struktur yang memaksa, sebagai konsentrasi dan pengelolaan kekerasan atas masyarakat.
2. Negara adalah instrument kelompok dominan, di mana eksekutif negara hanyalah suatu komite untuk pengaturan terhadap kepentingan umum kaum borjuis.
3. Negara sebagai momen sekunder atas kelompok subordinat, sebagai bentuk penghormatan *civil society* terhadap kondisi dan regulasi negara, bukan negara yang memperhatikan dan mengatur kehidupan masyarakat. (Bobbio dalam Mouffe, 1979: 26).

Apa yang terjadi dalam diri perempuan selama ini jika dihubungkan dengan kekuasaan dan tanggung jawab negara menjelaskan doktrin negara menurut Karl Marx dan Engels di atas. Negara sangat dominan dalam segi apapun terutama terhadap perempuan, negara memiliki wewenang dan kekuasaan melakukan kekerasan dengan 'memaksa' masyarakat sipil mengikuti ideologi dan hegemoni negara dan kelompok penguasa sehingga masyarakat sipil seperti perempuan menyatakan konsensus bahwa itu adalah nilai dan kebaikan mereka.

Hubungan perempuan dan negara bagaikan hubungan antara tuan dan pekerja. Pekerja harus mematuhi segala aturan dan nilai yang diciptakan oleh tuan sesuai dengan kepentingan tuan. Pekerja melakukan



pekerjaan dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh tuan yang terkadang bahkan tidak menyadari apa yang dilakukan, karena tugas utamanya adalah melaksanakan pekerjaan. Tuan memiliki kepatuhan atas dasar dominasi dan kekuasaan mereka.

Dalam kondisi ini, maka penting untuk mendapatkan tujuan yang baik, demokratis, memperhatikan hak-hak pekerja, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerja, yang mana tujuan akan menggunakan kekuasaan dan dominasinya bukan hanya untuk kepentingan partikularistik diri, kelompok, dan nilai, ideology sendiri, tapi juga mempertimbangkan hak-hak kelas pekerja. Dengan kata lain, memiliki negara yang demokratis dan memiliki tanggungjawab terhadap rakyat sangat penting karena akan menciptakan hubungan dialogis/dialektikal antara negara dan masyarakat.

Negara hanyalah sebuah instrumen dan memiliki aparat, negara tidak kekal dan bukan akhir dari *'historical bloc'*. Gramsci menjelaskan negara tidak merepresentasikan kepentingan universal, yaitu rakyat, tapi lebih mengutamakan kepentingan sebagian kelompok (partikular). Faktanya dari data kedua media massa diperoleh bahwa negara memang tidak mewakili kepentingan kelompok mayoritas atau rakyat secara umum (*universalistic*). Perempuan yang merupakan kelompok mayoritas dengan jumlah pemilih terbanyak yaitu 57% tidak terwakili partisipasi politik mereka di parlemen, juga di wilayah publik lainnya (lihat tabel tentang keterwakilan perempuan di parlemen dan juga tabel representasi perempuan di lembaga-lembaga publik).

Melawan dominasi hegemoni dan ideologi negara dan kelas penguasa mungkin sekali dilakukan, karena menurut Gramsci (1979: 24), negara bukanlah suatu institusi kekal, melainkan institusi yang tidak kekal (*transitory institution*). Dengan kata lain semua diskriminasi yang menyebabkan kondisi marginal dan tertindas yang dialami perempuan dapat diubah dengan menggerakkan perjuangan masyarakat sipil yang dilaku-

kan secara bersama-sama. Negara dapat hancur karena ketidakseimbangan antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Kehancuran dalam konteks ini adalah kehilangan kekuasaan. Negara menjadi lemah kontrol dan dominasinya terhadap masyarakat sipil termasuk di dalamnya seperti perempuan.

Menurut Gramsci, selalu ada masa atau periode di mana kekuasaan dan dominasi negara dan kelas penguasa menjadi lemah. Dalam sejarah Indonesia, periode tumbangnya orde lama oleh orde baru dan juga orde baru oleh orde reformasi dapatlah dijadikan contoh, bahkan tumbangnya rezim orde baru merupakan momen yang mendukung munculnya kekuatan perempuan untuk memperjuangkan *affirmative action*, yaitu strategi sementara kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Namun yang diperlukan bukan hanya keterwakilan perempuan di Parlemen, yang juga belum terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas, melainkan keterwakilan perempuan di Eksekutif dan juga Yudikatif. Keterwakilan perempuan di Eksekutif dalam hal ini sudah mulai muncul di beberapa daerah. Namun, untuk daerah DKI Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Jakarta ternyata belum mampu melahirkan perempuan-perempuan sebagai kandidat pemimpin Jakarta.

Negara dalam hal ini partai politik bisa dikatakan masih melakukan hegemoni atas perempuan dengan ideologi mereka agar masyarakat sipil seperti perempuan menjadi bagian dari pelestarian status quo negara dan kelompok penguasa. Partai politik sebagai *political society* memperoleh kesepakatan atau konsensus (*consent*) yang memaksa dari perempuan dan dengan kesadaran palsu mereka menjadi bagian dari hegemoni negara, yang bahkan dalam pemahaman Gramsci dalam '*common sense*', kaum perempuan meneguhkan status quo hegemoni dominan yaitu negara dan partai politik. Konsensus ini dilihat dari penerimaan kaum perempuan dan kelompok pekerja lainnya atas dominasi negara terhadap

mereka. Konsensus menjadi penting bagi Gramsci, karena menjelaskan bagaimana konsensus tersebut diperoleh sekaligus menjelaskan hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, negara memelihara dominasi kekuasaannya melalui perolehan konsensus yang bersifat spontan (*spontaneous consent*), maksudnya negara dan kelompok penguasa yang menghegemoni masyarakat termasuk perempuan sebagai kelompok subordinat, melakukan negosiasi konstruksi politik dan konsensus politik yang terbentuk antara dua hal, yaitu kelompok dominan dan kelompok terdominasi (Srinati, 1995: 165).

Pikiran Gramsci di atas dapat dilihat pada kondisi politik yang dialami perempuan, di mana perempuan mempunyai keterwakilan yang kecil dalam Pilkada-pilkada. Partisipasi perempuan di politik masih minim karena diskriminasi politik yang dialami perempuan, baik itu disebabkan oleh negara, partai politik maupun struktur sosial, budaya patriarki dan juga politik. Perempuan, dalam menerima ideologi negara dan kelompok dominan dalam periode atau masa tertentu, cenderung tidak mempertanyakan kenapa nilai dan ideologi tersebut harus diterima dan diikuti. Sikap menerima saja, tanpa mempertanyakan atas ideologi dominan yang menghegemoni subyektivitas perempuan tidak muncul disebabkan karena perempuan berpikir bahwa nilai dan ideologi itu tidak ada masalah, dan memang itu yang dikonstruksi oleh pihak-pihak yang dominan.

Perempuan tidak memiliki otonomi subyektif terhadap kondisi yang berlangsung sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan karena dominasi negara dan kelompok dominan yang sangat kuat. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gramsci (Stillo, 1999: 7), yang dituliskan kembali oleh Monica Stillo, bahwa suatu kelas masyarakat, telah memperoleh hak dalam mempengaruhi kelompok lain, yang biasanya dalam konteks hegemoni ini adalah negara, memperoleh pengaruh dan kekuatan atas kelompok subordinat mereka,

yaitu perempuan untuk menerima moral, konsepsi politik dan nilai budaya negara dan kelas penguasa sebagai nilai kelas subordinat/perempuan.

Namun sebagaimana dinyatakan Gramsci dalam konsep negara, bahwa negara bukanlah suatu yang abadi, namun dapat berubah kapan saja. Maka konsensus yang diperoleh oleh negara atas perempuan juga tidak bersifat selalu damai tanpa konflik disebabkan proses perolehan konsensus yang tidak melalui kesepakatan alamiah kedua belah pihak, yaitu perempuan sebagai masyarakat sipil serta negara dan perangkatnya sebagai masyarakat politik, namun melalui kekuatan dominasi ideologi dan hegemoni negara atas perempuan. Konsensus yang diperoleh oleh kelompok dominan dan negara menurut Gramsci (1999: 5) merupakan kombinasi kekuatan fisik dan paksaan intelektual, moral dan bujukan budaya, bukan lahir sebagai sebuah kesadaran masyarakat sipil atau perempuan yang didasarkan pada intelektual dan kepemimpinan moral.

Artinya, perubahan dapat saja terjadi dan peluang yang semakin besar bagi perempuan dalam wilayah politik. Hal itu ditandai oleh ketentuan UU Partai Politik dan UU Pemilu 2008 yang mendukung keterwakilan perempuan 30 persen di politik terutama dalam pencalonan kandidat anggota parlemen dan kepengurusan partai politik. Kebijakan *affirmative action* tersebut memang belum mencakup keterwakilan perempuan dalam pencalonan sebagai eksekutif. Namun, kebijakan tersebut dapat menjadati *entry point* keterwakilan perempuan dalam wilayah eksekutif secara lebih luas. Hal itu diperlukan agar perempuan dapat memperoleh kekuasaan yang mampu mensejahterakan bagi semua masyarakat.

Konsensus yang diperoleh sebagai *common sense* bagi semua masyarakat, termasuk perempuan, kemudian menjadi suatu budaya alamiah yang berasal dari ideologi dominan yang secara bersama diparktekan dan tersebar. Inilah yang dialami perempuan. Kemiskinan politik mereka

berakibat pada minimnya representasi perempuan di parlemen dengan segenap penyebab dan alasan yang dijelaskan sebelumnya yang telah mengkristal menjadi budaya bagi semua masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor budaya mengakibatkan negatif keterwakilan perempuan di dunia politik. Dalam negara telah terjadi apa yang dinamakan hegemoni budaya (Wikipedia, 2005: 1). Budaya yang menghegemoni yaitu pemahaman perempuan berdasarkan pemahaman budaya patriarki. Hal itu membentuk kelas penguasa dan apatur negara lainnya sebagai masyarakat politik dan juga mempengaruhi perempuan dalam memahami diri mereka dengan nilai-nilai dan ideologi kelompok penguasa dan negara. Pemahaman seperti itulah yang menjadi moral dan budaya semua pihak dalam memahami realitas perempuan dan keterwakilan politik perempuan.

Dalam kondisi ini, dikatakan oleh Gramsci bahwa apa yang dilakukan perempuan dengan pemahaman atas diri mereka di ruang politik dan publik serta perilaku politik mereka telah menjadi tatanan sosial, dan semua sebenarnya hanyalah pendukung untuk membentuk dan mempengaruhi pikiran-pikiran orang akan pemahaman yang dianggap benar sebagaimana negara dan penguasa pahami tentang realitas perempuan dalam politik. Lebih lanjut Gramsci menjelaskan bahwa praktek-praktek yang dilakukan oleh negara, kelas pekerja bahkan perempuan itu sendiri ketika dalam kondisi menerima saja nilai-nilai dan ideologi dominan tanpa melakukan perlawanan merupakan bagian dari praktek-praktek kelas kapitalisme, atau hal itu merupakan representasi untuk memperoleh kekuatan negara (*state*) dan merupakan pemeliharaan atas kondisi *status quo* selanjutnya. Kaum perempuan sering kali hanya menjadi sasaran propaganda ekonomi pihak-pihak produsen, bukan menjadi faktor sejarah dalam perubahan yang berlangsung.

Realitas tersebut segera harus diubah oleh perempuan, dan perempuan juga perlu mengubah pemikiran kaum laki-laki dan masyarakat

secara umum termasuk perempuan untuk mendukung perjuangannya dengan lebih melihat kualitas mereka. Dukungan juga diperlukan dari partai politik, karena partai politik merupakan institusi yang memiliki kewenangan dalam menentukan seorang kandidat lolos sebagai calon pemimpin. Oleh karenanya DKI Jakarta harus lebih terbuka dan perempuan-perempuan Jakarta masih ditunggu kemauan serta keberanian mereka mencalonkan diri sebagai calon pemimpin Jakarta dalam proses politik yang adil bagi semua pihak.

\* \* \* \* \*

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan individu sebagai warga negara merupakan suatu kemestian. Kebebasan individu diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan dalam beragam sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sektor kehidupan bernegara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan bidang politik. Politik merupakan faktor sangat krusial dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa. Undang-undang dan peraturan berkaitan dengan politik mengalami perubahan yang sangat signifikan yaitu seperti lahirnya UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Otonomi Daerah. Kesemua undang-undang tersebut memberikan implikasi perubahan yang sangat mendasar dalam proses politik Indonesia. Misalnya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Partai politik yang muncul melebihi tiga partai selama Orde Baru dan Hubungan Pusat dan Daerah yang berubah dari sistem sentralisasi kepada sistem desentralisasi. Serta dukungan yang positif terhadap keterwakilan perempuan dalam politik yang tercantum dalam UU Partai politik dengan ketentuan kuota 30 persen bagi setiap pencalonan anggota legislatif dan pengurus partai politik.

Perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia disambut sangat antusias oleh berbagai pihak. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan politik di Indonesia seperti jumlah partai yang banyak (walau tidak menjamin demokrasi lebih baik), kesmataan yang lebih luas kepada semua kalangan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Politik dalam era sekarang bukan hanya milik kalangan dan kekuatan tertentu, namun kehidupan politik tumbuh menjadi aktivitas yang menarik dan mempunyai dinamika yang luar biasa. Salah satu yang sangat menarik adalah munculnya semangat kaum perempuan terjun ke kancah politik secara terbuka dan menjadi bagian penting dari proses politik.

Banyak muncul kandidat legislatif baik tingkat daerah maupun pusat yang kemudian mereka berkiprah secara aktif dalam politik sebagai anggota legislatif dan pengurus partai. Kesempatan semakin terbuka bagi perempuan untuk aktif di ruang publik ditandai semakin banyaknya perempuan tertarik dengan politik dan memilih aktivitas politik sebagai pilihan karir mereka. Banyak perempuan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

Meningkatnya minat perempuan terjun ke wilayah politik dapat dikatakan sebagai akibat dari ketentuan kebijakan kuota 30 persen perempuan di wilayah politik. Kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh penggiat perempuan yang konsen pada isu keterwakilan dalam politik, pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan positif media massa dengan berbagai liputan dalam perjuangan mengenai perlunya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

Beberapa calon kepala daerah baik tingkat I maupun tingkat II yang juga berhasil menjadi kepala daerah seperti Gubernur Provinsi Banten, Walikota Surabaya, Walikota Tangerang Selatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Minahasa, Bupati Karanganyer dan lain-lain. Sementara yang mencalonkan diri, namun masih belum berhasil seperti Khofifah

Indarparawangsa sebagai calon Gubernur Jawa Timur, Dr. Marissa Harque Fauzie sebagai calon Gubernur Banten, dan lainnya.

Kondisi tersebut berlangsung di daerah-daerah di luar DKI Jakarta, yang secara langsung memperlihatkan ketertarikan yang semakin besar perempuan untuk aktif di politik. Namun, apakah kondisi tersebut tumbuh karena kesadaran kaum perempuan mengenia politik? tentu hal itu masih belum dapat dijawab secara pasti karena dibutuhkan penelitian ulang dan terus menerus termasuk berkaitan dengan aplikasi dan implikasi keterwakilan perempuan dalam politik yang didasarkan atas kesadaran individu. Persoalannya bagaimana dengan perempuan-perempuan di DKI Jakarta?

Berdasarkan sejarah politik provinsi DKI Jakarta dari pemilihan pertama sampai pemilihan umum langsung, terakhir tahun 2012 dan menempatkan Joko Widodo dan Basuki Thahja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Selama pemilihan tersebut baik masa Orde Lama, Masa Orde Baru dan masa Reformasi belum terdapat perempuan yang dipercaya oleh partai politik untuk dicalonkan sebagai kandidat gubenmur dan wakil gubernur. Pada tahun 2011 dan 2012 pemilihan umum daerah DKI Jakarta terdengar beberapa nama perempuan yang menaruh minat mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta seperti Wanda Hamidah (Pengurus Partai Amanat Nasional dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN dan anggota Komisi E) dan Saudara Hasnaini yang merupakan aktivis Partai Demokrat.

Wacana mulai dibangun oleh kedua perempuan tersebut dengan gaya dan metode masing-masing. Namun, kenyataannya kedua-duanya tidak menjadi kandidat resmi partai politik. Wanda Hamidah yang sudah menyatakan secara terbuka siap mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta ternyata kemudian tidak jadi mencalonkan diri karena tidak diresstui oleh PAN. PAN lebih tertarik percaya kepada pasangan



Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Sedangkan Hasnaini memang tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri karena beragam alasan.

Pada dasarnya semangat dan keinginan kaum perempuan untuk aktif dalam politik sudah ada, akan tetapi kekuatan partai politik dominan yaitu partai politik yang umumnya pengurusnya adalah laki-laki; belum tertarik untuk menjadikan perempuan sebagai kandidat mereka. Ketidakpercayaan partai politik kepada perempuan sebenarnya tidak relevan karena proses dan pelaksanaan Pemilu di DKI Jakarta sangat bagus dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Namun, sangat disayangkan pelaksanaan pemilu yang begitu baik tidak diikuti dengan partisipasi perempuan sebagai kandidat.

Kesuksesan pemilu Daerah DKI Jakarta diamini oleh Prof. Dr. Silviana Murni, M.Si., Sekretaris Bidang Pemerintahan Daerah Propinsi DKI Jakarta yang menjelaskan bahwa pemilu DKI Jakarta yang berlangsung dua putaran, hasilnya sesuai dengan aturan pemilu. Semangat masyarakat dan partai politik terlihat dari jumlah calon gubernur/wakil gubernur yang ikut dalam pertarungan Pilkada yang berlangsung. Terdapat enam pasang kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam putaran pertama belum bisa dinyatakan sah keluar sebagai pemenang, karena belum ada yang mencapai 50 persen, kemudian diambil dua pasangan dengan hasil suara yang terbanyak, untuk mengikuti Pilkada putaran kedua. Pelaksanaan relatif cukup obyektif, cukup cerdas, dan terbuka mengenai pemahaman peraturan.

Menurut Silviana Murni Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 merupakan Pilkada yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, karena telah berlangsung dengan sangat baik dan tertib. Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta sebagai salah satu wilayah di Indonesia merupakan peristiwa yang dapat dinyatakan sebagai sebuah fenomena mutakhir mengenai keterbukaan dan kesuksesan dalam proses demokrasi. Indo-

nesia sebagai negara besar dapat menjadi pembelajaran bagi banyak pihak tentang kehidupan negara demokrasi.

Selengkapnya pendapat Silvana Murni:

“Aturan-aturan tersebut disosialisasikan secara langsung oleh pemerintah atau lembaga yang lain. Artinya itu (Pilkada) betul-betul memang terbukti, semua orang juga saling mengingatkan, saling mengoreksi, sehingga saya merasa bahwa Pemilu DKI Jakarta adalah pemilu yang bisa jadi contoh. Oleh daerah daerah lain. Ini merupakan sebuah pembelajaran pendidikan politik yang luar biasa. Baik bagi penduduk Jakarta maupun bagi akadenmisi. Karena ini merupakan proses pelaksanaan praktek dan juga teori tentang bagaimana proses politik dilaksanakan dalam satu negara yang menganut demokrasi, apalagi kita pernah menjadi **development country** yang masih terus berkembang. Bisa dikatakan, merupakan negara besar dalam demokrasi. Kita dapat bersaing dengan Amerika yang merupakan negara besar dan sumber demokrasi, ternyata negara kita dapat melaksanakan demokrasi dengan sangat baik dan cerdas.

Pelaksanaan pemilu DKI Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia, kota besar, kota metropolitan, agama dan masyarakat urban yang tumbuh pesat. Provinsi dengan akses dan fasilitas pendidikan paling maju, pusat pemerintahan, sumber informasi terdepan, pusat bisnis dan keterbukaan dengan pluralisme budaya, etnis, ideologi, agama, dan kehidupan sosial yang kompleks dibanding daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tipologi masyarakat inilah yang menyebabkan pelaksanaan Pemilu Pilkada DKI Jakarta unik termasuk juga keberanian penduduknya untuk menyatakan pendapat, keluhan dan pertanyaan mengenai pelaksanaan Pemilu Pilkada.

Silvana Murni lebih lanjut menyatakan bahwa Pemilu Pilkada memanfaatkan teknologi komunikasi canggih dalam proses penyediaan dan akses informasi kepada dan dari masyarakat sehingga apapun bentuk

informasi secara cepat dapat diketahui dan sekaligus diakses. Selanjutnya pendapat Silvia Murni:

“Komplain banyak, tetapi ada wadah, ada saluran dan terbuka kesempatan untuk menyampaikannya atau menyalurkannya atau melaporkannya. Jadi, yang melaporkannya dapat melakukan secara leluasa, dengan cara menunjukkan kartu identitas. Kemudian pihak yang dikomplain juga dapat menkomplain balik, artinya sistem yang ada sangat terbuka, sangat egaliter. Tetapi sekali lagi kekuatan media sosial cukup bisa mengubah pendapat seseorang, tapi lambat laun akhirnya fakta di lapangan apakah apa yg dilakukan para kandidat ini membawa manfaat di lapangan itu yang lebih dilihat. Akhirnya semua merupakan pembelajaran, baik buat kandidatnya atau bagi masyarakatnya”.

Keberhasilan Pilkada DKI Jakarta juga diakui Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Nadia Umar yang menyatakan, pelaksanaan Pemilu di DKI Jakarta sudah berlangsung dengan baik, ditandai dengan pelaksanaan aturan-aturan pemilu sebagai tanggung jawab pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selengkapnya pandangan Ketua KPU DKI Jakarta, Diana Umar sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemilu DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan proses Pemilu yang diharapkan. Kami merasa KPU DKI Jakarta dengan semua jajarannya telah berusaha melaksanakan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2012 yaitu Pemilu Cagub/cawagub DKI Jakarta, terutama dalam hal pelaksanaan dan persiapan teknis maupun hal-hal bersifat substansif yang terkait dengan aturan-aturan atau regulasi dan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu seperti aturan pelaksanaan Pemilu, tata cara kampanye, tata cara penentuan pemilih, tata cara rekrutmen penentuan sumber daya pelaksana pendukung pelaksanaan Pemilu. Setiap 5 petugas, di 44 kecamatan dalam masing-masing keluarahan ada perempuan, karena memang ada ketentuan pemilu mengenai keterwakilan perempuan. Bukan hanya ketentuan 30 persen perempuan

puan dan tidak dibatasi hanya bagi komisioner PKU, namun juga keterwakilan perempuan pada tenaga pelaksana Pemilu di setiap kelurahan dan TPS”.

Artinya secara substansif, pelaksanaan Pemilu Jakarta 2012 sudah berlangsung sesuai dengan aturan-aturan Pemilukada yang berlaku. Pelaksanaan Pemilukada yang bermartabat bukan hanya sebagai upaya memenuhi ketentuan pelaksanaan yang ada, melainkan pertimbangan yang lebih penting adalah melaksanakan kepercayaan masyarakat. Sekaligus proses pelaksanaan pemilu merupakan upaya memenuhi pendidikan politik kepada masyarakat/rakyat.

Dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai Pemilukada 2012 kepada seluruh masyarakat, KPU DKI Jakarta sangat menyadari bahwa dibutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Hal tersebut untuk pencapaian secara menyeluruh segala bentuk informasi mengenai Pilkada, sehingga masyarakat secara cepat, mudah, dan akurat memperoleh informasi Pemilukada.

Salah satu lapisan masyarakat yang menjadi sasaran aktif sosialisasi informasi Pemilukada DKI Jakarta adalah kaum perempuan. Kaum perempuan sebagian besar merupakan para ibu yang “acapkali” menjadi sasaran obyek semata dalam Pemilu. Artinya perempuan merupakan publik pasif dalam proses politik, di mana partisipasi politik mereka cenderung banyak dipengaruhi dan terkooptasi oleh individu dan kelompok di luar diri perempuan. Hal tersebut kemudian dalam proses pengambilan keputusan, para perempuan cenderung menjadi penggem-bira politik semata. Kondisi tersebut pada hakekatnya banyak merugikan perempuan karena aktivitas politik yang berlangsung bukan atas dasar kesadaran diri perempuan.

Oleh karenanya, dalam proses sosialisasi dan kampanye Pemilu, perempuan harus memperoleh informasi yang seluas-luasnya dan

secukupnya. Memperkuat pandangan tersebut Ketua KPU, Nadia Umar Menyatakan sebagai berikut:

“Kalau dikaitkan dengan perempuan, kami mempunyai metode khusus sosialisasi pentingnya Pemilu untuk aktivis perempuan, baik dalam komunitas, ibu-ibu, atau khusus kelompok Pemilu. Mengenai dalam pendidikan politik kepada politik, seperti dalam sosialisasi. Kita sampaikan khusus kepada perempuan, komunitas perempuan, guru dan kelompok-kelompok lain. Karena jumlah pemilih perempuan ternyata lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki, dan yang menggunakan hak pilih dalam pemilu, perempuan juga lebih banyak dari laki-laki. Bagaimana caranya perempuan memperoleh informasi dengan mudah melalui media-media tertentu, termasuk *new media* karena kaum perempuan pekerja dan kaum ibu seperti komunitas perempuan yang memang mereka mempunyai anggota-anggota yang cukup banyak. Sosialisasi kepada ibu-ibu karena tidak semua memahami internet, kondisi ini dicera dengan internet. Target hak pilih diharapkan lebih baik, karena sosialisasi yang dilakukan selama proses pemilu cukup berhasil, jika dilihat dari peningkatan perubahan dari Pemilu putaran I ke putaran ke II meningkat 3 persen.

Upaya sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan politik kaum masyarakat Jakarta. Khusus bagi perempuan memperoleh perhatian khusus karena perempuan merupakan pihak yang paling kurang melakukan akses dalam aktivitas politik. Perempuan di DKI Jakarta sebagai pemilih seimbang dengan kaum laki-laki, akan tetapi mereka merupakan pengguna hak pilih yang lebih baik dari pada laki-laki. Di sisi lain kaum perempuan menggunakan hak pilih mereka sebgaiannya besarnya bukan karena '*kesadaran politik*', melainkan lebih disebabkan oleh kekuatan di luar diri perempuan. Kondisi itu menjadi alasan yang rasional jika

sosialisasi mengenai Pilkada kepada perempuan diberikan perhatian lebih. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Ketua KPU DKI Jakarta:

“Bekerja sama juga dengan beberapa lembaga dan organisasi *civil society* dan pemantau Pemilu karena memang pemilih perempuan jumlahnya tidak berbeda jauh dari laki-laki, namun penggunaan hak pilih ternyata perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Artinya laki-laki lebih banyak menjadi golput”.

Langkah yang diambil KPU DKI Jakarta dalam melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan banyak kalangan seperti LSM, aktivis perempuan, dan tokoh-tokoh perempuan yang mempunyai komunitas bukan sebagai langkah yang bersifat ‘diskriminatif’ terhadap kaum laki-laki. Terobosan tersebut lebih karena situasi yang melingkupi kaum perempuan, yang mana perempuan lebih menyukai bentuk interaksi ‘*face to face communication*’, dibandingkan interaksi komunikasi via media massa. Artinya, kaum perempuan lebih menyukai bentuk komunikasi langsung (*direct communication*) dengan para kandidat politik. Pada dasarnya tak ada perlakuan khusus bagi kaum perempuan, terutama bagi politisi perempuan yang mau mencalonkan diri sebagai calon, semuanya didasarkan pada aturan yang sama berlaku pada calon lainnya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ketua KPU, Nadia Umar sebagai berikut:

“Kalau mengenai ketentuan calon gubernur dan wakil gubernur tak ada peraturan secara khusus untuk keterwakilan perempuan. Yang terdapat dalam undang-undang adalah keterwakilan perempuan yaitu kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam proses pemilu legislatif. Artinya, pada dasarnya siapa saja dapat mencalonkan diri menjadi pimpinan. Pemilu kepala daerah tidak ada mendukung keterwakilan perempuan hanya ada dalam aturan pemilu legislatif, aturan bahwa setiap tiga orang kandidat harus ada satu orang perempuan dalam calon untuk setiap calon pimpinan calon, kalau ada sungguh

luar biasa, tetapi kita belajar dari Pilkada dari beberapa daerah, sebenarnya dalam Pilkada kepala daerah berdasarkan yang berlangsung di beberapa daerah selama ini. Sebenarnya juga tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan secara bebas dan terbuka dapat mencalonkan menjadi kepala daerah. Artinya, tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan bisa bersaing menjadi calon kepala daerah. Banyak calon perempuan yang mencalonkan diri kemudian terpilih”.

Pada dasarnya memang tidak ada aturan mengenai kebijakan DKI Jakarta berkaitan dengan kandidat perempuan dalam Pemilihan DKI Jakarta. Aturan pada sebelum pencalonan hanya melakukan sosialisasi bagi semua pihak yang terutama kepada partai politik. Tidak ada kebijakan khusus KPU Jakarta untuk mendukung kandidat perempuan, karena aturan yang digunakan merupakan aturan yang ditetapkan dan tercantum dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik. Pandangan Ida Mahmudah, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dan anggota DPRD Fraksi PDIP:

“....Memang kalau bicara Pilkada DKI Jakarta sangat menarik, saya mengikuti beberapa Pilkada daerah dan ternyata Pilkada DKI Jakarta memang berbeda, mengejutkan dan paling banyak menyedot banyak orang, dari mulai dicalonkan, verifikasi, kampanye, pemilihan sampai pelantikan merupakan proses Pilkada yang paling menarik bagi banyak orang”.

Lebih lanjut Ida Mahmudah menjelaskan, bahwa sangat disayangkan tidak adanya perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta 2012; karena sangat tidak masuk akal untuk wilayah DKI Jakarta, yang merupakan ibukota negara di mana kualitas pendidikan dan pendidikan demokrasi lebih baik dari daerah lainnya. Tapi memang tak mudah untuk menjadi pemimpin di Jakarta, mengingat persoalan Jakarta lebih kompleks dibandingkan daerah lainnya. Kondisi Jakarta yang sangat kompleks

yang menjadi alasan kaum perempuan belum berani mencalonkan diri dalam Pemilu kadua DKI Jakarta.

Apakah realitas tersebut dapat dipahami sebagai ketidakpercayaan perempuan terhadap kemampuan diri mereka sendiri? Memerlukan penjelasan dan penelitian lebih lanjut untuk menjawab persoalan tersebut. Diakui atau tidak masalah tersebut membawa implikasi, dari itu semua juga menyebabkan partai politik semakin belum percaya kepada kaum perempuan. Hal itu dapat dilihat dari enan pasangan calon yang digadang atau didaftarkan oleh berbagai partai politik tidak ada satupun perempuan dalam salah satu calon yang muncul. Bahkan Wanda Hamidah sebagai anggota DPR DKI Jakarta 2009-2014 dan pengurus Partai Amana Nasional yang sudah membuka wacana dan menyatakan diri tertarik menjadi gubernur DKI Jakarta juga tidak didukung oleh partainya, PAN. Kondisi ini sebagaimana disampaikan lebih lanjut oleh Ida Mahmudah yaitu:

“Tidak adanya calon perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta, dari perempuan yang ada memang sangat menyayangkan, seharusnya di ibukota harusnya ada perwakilan perempuan dan ini tidak ada. Mungkin memang kalau saya melihat, sudah pesimis niatnya untuk maju, jika sebelumnya terdengar Wanda Hamidah ingin mencalonkan diri; namun kemudian tidak terdengar lagi karena tidak didengarkan oleh partai politiknya. Sebagai sesama perempuan menyayangkan itu. Namun, bagaimana lagi kita tak bisa masuk ke dalam persoalan-personal partai orang lain, saya walau disuruh ikut mengambil formulir walau tak ikut, kita turut membahas hal itu. Dan saya koreksi diri apakah saya sudah mampu dan memadai, karena beberapa orang yang sudah sangat dikenal dan dipandang mampu oleh banyak orang juga tidak mau maju, saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Ini memang DKI penuh tantangan. Harapannya semoga Pilkada mendatang akan ada perempuan-perempuan yang berani dan didukung untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan DKI Jakarta”.



Walau tidak ada aturan khusus mengenai peluang bagi perempuan yang bermaksud untuk mencalonkan diri sebagai Cagub/Cawagub. Pada dasarnya penerimaan masyarakat DKI Jakarta terhadap kandidat perempuan sudah baik. Masyarakat cenderung tidak mempersoalkan masalah “gender” laki-laki atau perempuan, melainkan pertimbangannya lebih pada prestasi dan rekam jejak kandidat tersebut diterima dan disukai masyarakat atau tidak.

Penerimaan masyarakat Jakarta terhadap kandidat perempuan sudah baik; diperkuat oleh Ketua KPU DKI Jakarta:

“Pada saat itu sebenarnya banyak survey mengenai tingkat aseptabilitas perempuan sebagai pemimpin. Dari hasil survey tidak ada nama perempuan; akan tetapi selang beberapa waktu kemudian muncul juga dari kalangan perempuan seperti Ibu Wanda Hamidah, ibu Aviliani. Tetapi tidak kemudian menjadi keputusan partai politik. Tetapi keliru jika menyatakan bahwa tak ada calon kandidat perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta. Di DKI ada beberapa perempuan yang sebenarnya tokoh Jakarta seperti Okky Okasowati, Yoyoh Yusroh, banyak tokoh merupakan dan layak dijalaonkan. Walau ada beberapa tokoh perempuan yang dapat mencalonkan diri, mereka membuka lagi tokoh Jakarta, melainkan sudah menjadi tokoh Nasional”.

Perempuan secara umum sudah sangat diterima di ranah politik Propinsi DKI Jakarta, walaupun penerimaan ini tentu saja tak mudah dan membutuhkan perjuangan keras agar tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat, terutama dari partai politik. Hal itu merupakan implikasi logis dari dominasi kaum laki-laki dalam politik. Laki-laki masih merupakan pihak yang membuat kebijakan di kancah politik Indonesia termasuk dalam kancah politik DKI Jakarta. Kapabilitas mereka para politisi perempuan yang duduk menjadi anggota dewan di DPRD DKI Jakarta menurut Ida Marmudah sudah membanggakan walau belum terpenuhi kuota 30 persen. Anggota perempuan sudah

sanggup bersaing dengan anggota laki-laki. Bukti dapat dilihat dari keadaan DPRD Jakarta periode 2009-2014 bahwa jumlah anggota perempuan adalah 22 orang dari 100 orang anggota. Perempuan juga dipercaya sebagai pimpinan seperti sebagai ketua komisi A, wakil ketua komisi A, wakil ketua komisi C, dan lain-lain.

Pandangan Ida Mahmudah Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP dan Ketua Komisi A sebagai berikut:

“Anggota dewan perempuan berjumlah 22 orang dari total 94 orang anggota dewan. Kalau dilihat dari kualitas SDM mereka punya kebanggaan untuk dirinya. Mereka ini sanggup untuk bersaing dengan laki-laki di forum atau di pemikiran-pemikiran, namun kembali lagi sebagai perempuan, kita mau tidak merubah image laki-laki bahwa kita bisa sejajar dengan mereka. Setinggi mungkin kualitas perempuan anggota dewan diupayakan agar jangan sampai laki-laki punya image bahwa kita ini di bawah mereka. Di komisi ini ada empat anggota perempuan, menjadi kebanggaan, kadang-kadang mereka bisa kita ajak yang laki-laki untuk berkompromi, ini merupakan kebanggaan. Ada tiga perempuan di komisi A, dan ini tidak malu-maluin di forum, kita harus memberi ide atau mungkin argumen mereka mampu untuk itu”.

Berdasarkan pandangan-pandangan dari nara sumber yang telah dinyatakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pemilu Pilkada Propinsi DKI Jakarta 2012 telah berlangsung dengan baik dan merupakan sebuah fenomena yang menarik bagi masyarakat Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya.
2. Pemilu Pilkada DKI Jakarta dinyatakan sukses baik dilihat dari pelaksanaan aturan-aturan pemilu maupun jika ditinjau dari partisipasi peserta pemilu yaitu kandidat yang mencalonkan diri yaitu terdapat 6 pasang kandidat Cagub dan Cawagub.

3. Kesuksesan Pemilu pada DKI Jakarta 2012 ditandai dengan munculnya paradigma baru pemimpin yang disukai masyarakat dan terpilih (walau sebenarnya hal ini bukan hal yang baru), masyarakat menyukai pemimpin yang mempunyai jejak rekam yang baik, jujur dan membela rakyat dibandingkan calon pemimpin yang hanya melakukan aktivitas politik 'pencitraan' semata.
4. Keberhasilan pemilu pada Jakarta juga sebagai fenomena baru yang dapat dicontoh oleh daerah lain, yaitu mampu menghasilkan pemimpin yang dicintai oleh masyarakat.
5. Namun realitasnya belum ada kandidat perempuan yang diusung oleh partai politik menjadi catatan tersendiri dan dalam hal ini Jakarta 'kalah' dari provinsi Banten, dan beberapa kabupaten/kotamadya di Indonesia.
6. Tidak adanya kandidat yang dipercaya dan diusung DKI Jakarta menjadi pertanyaan tersendiri jika dilihat dari kualitas pendidikan perempuan DKI dengan Daerah lainnya.
7. Sebenarnya kaum perempuan sudah cukup dipercaya untuk berkiprah sebagai anggota parlemen DKI Jakarta dan di wilayah eksekutif yang memegang beberapa posisi strategis dalam pemerintahan DKI Jakarta seperti Kepala Dinas Bappeda, Sekretaris Pemerintahan DKI Jakarta Bidang Pemerintahan dan lain-lain. Realitas tersebut merupakan bukti bahwa perempuan mempunyai peluang untuk maju sebagai orang nomor satu di Jakarta, hanya memerlukan keberanian dan dukungan partai politik.

### **A. Peta kekuasaan perempuan politik di Provinsi DKI Jakarta**

Kekuasaan merupakan bagian integral dalam proses politik. Salah satu output dalam proses politik adalah mendapatkan kekuasaan, memelihara, dan memperluas kekuasaan. Dalam politik memperoleh kekuasaan

adalah hal yang lumrah sebagai implikasi dari proses politik yang berlangsung. Kekuasaan politik yang dimiliki oleh politisi laki-laki belum seimbang dengan politisi perempuan. Laki-laki masih menjadi bagian yang dominan dalam proses politik di level manapun. Kondisi tersebut berkaitan dengan proses historis aktivitas politik laki-laki dan perempuan. Kuam laki-laki selama ini memang dilekatkan dengan aktivitas politik. Politik dinyatakan sebagai aktivitas yang berat dan menuntut kerja keras serta rasionalitas tinggi, dan kondisi tersebut dilekatkan pada karakteristik perempuan atas alasan gender. Perempuan acapkali dilekatkan dengan konsep-konsep irrasional, emosional, cepat menyerah, tidak berani mengambil keputusan secara cepat, kompromis, dan menghindari konflik.

Perempuan sebagai politisi di DKI Jakarta memang masih minim dibandingkan laki-laki. Jumlah politisi perempuan sedikit dibandingkan kaum laki-laki yang menguasai panggung politik baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kondisi ini sudah cukup baik setelah ketentuan *affirmatic action* ditetapkan yaitu ketentuan kuota 30 persen. Namun hal tersebut tentu saja belum mencukupi jika dilihat dari kuantitas, yang mana perempuan baru berjumlah 22 orang dari 100 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dilihat dari jumlah ini tentu saja belum memadai, belum lagi jika ke 22 anggota DPRD perempuan sangat mungkin kesemuanya tak mempunyai kontribusi maksimal. Artinya masih dibutuhkan perjuangan untuk meningkatkan keasadaran kaum hawa khususnya dan masyarakat umumnya.

Berkaitan dengan hal itu, pandangan Diana Umar sebagai Ketua KPU DKI Jakarta:

“Kapabilitas politisi perempuan yang duduk menjadi anggota dewan di DPRD DKI Jakarta menurut Ida Marmudah sudah membanggakan meski belum terpenuhi kuota 30 persen. Anggota perempuan sudah sanggup bersaing dengan anggota laki-laki”.

Diperlukan upaya serius oleh semua partai politik dan kalangan masyarakat terutama kaum perempuan untuk memperjuangkan secara terus menerus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Tentu saja bukan hanya dalam persoalan jumlah perempuan yang aktif dalam politik, melainkan lebih dari itu kesadaran perempuan dalam politik. Oleh karenanya, diperlukan upaya yang sangat serius untuk meningkatkan perempuan dalam politik yang mensejahterakan masyarakat.

Mempertegas pernyataan sebelumnya, Ida Mahmudah menyatakan sebagai berikut:

“Anggota Dewan perempuan berjumlah 22 orang dari total 94 orang anggota. Kalau dilihat kualitas SDM mereka punya kebanggaan untuk dirinya. Mereka sanggup untuk bersaing dengan laki-laki di forum maupun di pemikiran-pemikiran, tapi kembali lagi pada perempuan itu sendiri. mereka mau tidak merubah image laki-laki bahwa kita bisa sejajar dengan mereka. Setinggi mungkin kualitas perempuan anggota dewan diupayakan agar jangan sampai laki-laki punya image bahwa kita ini di bawah mereka. Di komisi ini ada empat anggota perempuan, menjadi kebanggaan, kadang-kadang mereka bisa ajak yang laki-laki untuk berkompromi, dan ini merupakan kebanggaan. Ada tiga perempuan di komisi A, ini tidak malu-maluin di forum, kita harus memberi ide atau mungkin argumen mereka mampu untuk itu”.

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Ketua KPU Nadia Umar, yang menyatakan bahwa walaupun sebenarnya tidak ada aturan pemilu yang mendiskreditkan atau membela secara khusus pencalonan perempuan sebagai Cagub/Cawagub DKI Jakarta. Artinya, peluang sebenarnya terbuka bagi laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali, tetapi peluang kesempatan tersebut tergantung pada kemampuan, kemauan, dan keberanian perempuan yang didukung oleh partai politik. Politik

masih menjadi bidang baru bagi perempuan setelah sekian lama politik hanya dimaknai sebagai wilayah dan aktivitas yang cocok bagi perempuan. Kondisi tersebut, yang menyebabkan perempuan belum banyak mempunyai kontribusi dalam politik.

Telah terjadi dominasi dalam wilayah politik oleh satu kelompok masyarakat yaitu kaum laki-laki. Dominasi tersebut akhirnya ikut mempersempit peluang bagi satu anggota masyarakat lainnya yaitu kaum perempuan selama ini untuk terjun ke wilayah politik. Peluang tersebut semakin sempit setelah pemakanaan sosial budaya ikut-ikutan memberi kontribusi bagi pemahaman aktivitas politik perempuan. Politik secara sosial budaya dipahami bukanlah wilayah perempuan, aktivitas yang tidak sesuai bagi perempuan karena kotor, kasar, dan menghalalkan segala cara. Perempuan juga dilekatkan dengan stereotip budaya seperti emosional, tidak rasional, lemah dan banyak kompromi dan tidak cepat dalam mengambil keputusan. Alasan-alasan ini banyak menyebabkan ketidakpercayaan partai politik dan masyarakat mengenai aktivitas politik perempuan.

Gramsci (Stillo,1999:17), menyatakan bahwa hegemoni kelompok mendominasi kelompok lain dalam masyarakat secara fundamental, merupakan sebuah fasisme. Dominasi yang berlangsung berakibat pada kekerasan yang dilakukan kelompok dominan terhadap kelompok subordinat, sehingga yang muncul adalah ideologi dominan menguasai realitas kehidupan masyarakat. Dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan berlangsung sepanjang waktu, dalam beragam sektor kehidupan baik publik maupun domestik. Dominasi dalam kehidupan publik seperti politik yang dilakukan negara dan partai politik adalah bentuk kekerasan negara terhadap perempuan di politik. Kekerasan sistematis tersebut mempengaruhi beragam kebijakan menyangkut harkat hidup kaum perempuan, bahkan terjadi politik tubuh perempuan (*Physical sphere*) oleh negara demi kepentingan memelihara *status*

*quo*. Sebenarnya perempuan harus menggunakan hak mereka untuk terjun di wilayah politik sebagaimana halnya dengan kaum laki-laki.

Dalam hal itu, *civil society* berpikir sebagaimana kelompok dominan atau masyarakat negara berpikir, yaitu berdasarkan nilai-nilai dominan mereka yang dianggap sebagai cara pikir kelompok subordinat. Perempuan tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah didominasi dan menjalankan rencana dari hegemoni negara dan kelompok dominan/penguasa dengan hanya menjadi pendukung politik kaum laki-laki sehingga akhirnya kaum perempuan muncul sebagai kelompok subordinat yaitu kelompok kedua di tengah masyarakat yang hanya mendengarkan, menerima, dan mengikuti serta melakukan apa yang diperintahkan oleh kelompok ordinar yaitu dalam wilayah politik adalah kaum laki-laki.

Gramsci menyatakan bahwa kelompok subordinat bahkan membantu memelihara status quo kelompok dominan atau penguasa serta tidak berusaha melawan kondisi dominan yang mengakibatkan, apa yang Marxist sebut sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Kaum perempuan di politik lebih banyak dijadikan partisipan pasif, penggembara dalam kampanye dan aset untuk meraih jumlah suara ketika pemilu berlangsung. Kondisi yang berlangsung sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, ini diakibatkan oleh sistem budaya patriarkhi yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki otonomi dan independensi dalam politik.

Kontribusi terbatas kaum perempuan dalam politik merupakan implikasi dari proses sosial budaya yang panjang dan melingkupi seluruh kehidupan. Proses tersebut merupakan proses mendalam yang secara integral membentuk mental perempuan dan masyarakat. Politik sampai saat ini masih belum menjadi aktivitas yang nyaman bagi perempuan akibat dari konstruksi di tengah masyarakat mengenai pantas atau tidak pantas perempuan berpolitik. Selama ini perempuan banyak hanya

menjadi pelengkap dalam proses politik. Mereka adalah pendukung suami dan organisasi politik, penggembira politik bagi pencapaian aktivitas politik semua mereka.

Proses mental yang terbentuk dan telah mengkristal tersebut pada dasarnya sulit untuk diubah membutuhkan proses yang lama dan dampaknya harus secara terus menerus. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mengubah proses mental individu dan masyarakat mengenai aktivitas politik perempuan. Walau saat ini upaya perubahan sudah mulai dilakukan semenjak tahun 2000 ketika kaum perempuan yang mempunyai kepedulian memperjuangkan kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen. Perjuangan kuota 30 persen menjadi titik awal keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia. Dengan ketentuan yang termaktub dalam UU Partai Politik mengenai *affirmative action* 30 persen yang menentukan keterbukaan peluang perempuan dalam politik.

Gairah perempuan dalam politik saat ini harus diakui salah satunya merupakan implikasi dari adanya ketentuan kuota 30 persen. Sejak tahun 2004 partisipasi perempuan dalam politik meningkat di seluruh Indonesia. Kondisi itu terkait dengan ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan sebagai kandidat dalam pemilihan legislatif baik tingkat pusat maupun daerah. Perkembangan partisipasi perempuan di legislatif diikuti dalam pencalonan di wilayah eksekutif. Selama ini sudah ada kaum perempuan yang berani menyatakan diri dan sekaligus mencalonkan diri sebagai gubernur/Cawagub, bupati/wakil bupati dan lain-lain. Fenomena ini kemudian menjadi momen perubahan dalam politik di Indonesia, dan sekarang ini banyak yang sudah berani mencalonkan diri. Sangat disayangkan untuk propinsi DKI Jakarta peluang tersebut belum digunakan oleh perempuan Jakarta. Alasannya antara lain DKI Jakarta merupakan provinsi yang mempunyai masalah sangat kompleks, dan persaingan juga sangat ketat. Berdasarkan hal itu, perempuan mempunyai hak untuk memilih apakah mencalonkan diri atau tidak



sebagai kandidat pemimpin Jakarta. Perempuan Jakarta sangat pintar memilih yang mereka yakini bahwa pilihan itu nyaman untuk mereka dan belum adanya perempuan Jakarta yang cukup berani dan percaya diri untuk memimpin Jakarta.

Fenomena munculnya pemimpin perempuan ternyata cukup sukses di daerah-daerah, namun belum sukses di Jakarta. DKI Jakarta sebagai kota metropolitan, kota dengan akses pendidikan, keterbukaan dan sumber perubahan ternyata tidak tersentuh oleh fenomena ini. Sepanjang sejarah Jakarta belum ada perempuan yang memimpin Jakarta, bahkan pasca reformasi yang merupakan momentum keterbukaan dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, tidak ada satupun kandidat pemimpin Jakarta seorang perempuan. Ada apa sebenarnya dengan DKI Jakarta, apakah tidak ada perempuan yang layak dan tertarik terjun ke politik, atau tidak ada partai politik yang percaya bahwa perempuan mampu memimpin propinsi DKI Jakarta.

Realitas tersebut mengejutkan bagi peneliti karena beragam alasan yang telah disebutkan di atas. Perempuan layaknya menjadi salah satu kandidat yang diperhitungkan dalam percaturan politik. Realitasnya Pemilu pada DKI Jakarta sebagai provinsi yang menjadi acuan banyak provinsi lainnya. Perempuan yang selama ini dipahami sebagai makhluk yang tidak rasional, lemah, emosional dan sebagainya. Berkaitan dengan tidak adanya perempuan sebagai kandidat DKI Jakarta dalam Pemilu pada 2012, lebih disebabkan adanya persaingan yang ketat antara para kandidat dan perempuan dipercaya tidak kuat bersaing karena mereka mempunyai sifat cepat menyerah, sedangkan persaingan dalam pemilu Jakarta ketat. Kandidat yang maju sebagai Cagub dan Cawagub merupakan tokoh-tokoh nasional yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat selama ini.

Selengkapnya pandangan Nadia Umar, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta:

“Karena menurut kami sulit bagi DKI bagi perempuan bersaing di Jakarta sebagai Cagub/Cawagub, karena di DKI persaingan begitu ketat. Yang mencalonkan diri semua adalah calon yang masih menjabat atau tokoh nasional yang sudah sangat dikenal dan beberapa tokoh perempuan yang sudah dikenal hanya ibu Megawati, ibu Khofifah, belum ada misalnya yang mampu bersaing dengan tokoh-tokoh laki-laki yang terkenal dan mapan secara politik, kecuali tokoh perempuan tersebut dipersiapkan diri dengan baik, jauh-jauh hari. Yang namanya Pilkada tidak bisa mendadak, harus dilakukan picitraan dan perencanaan jauh-jauh hari, jadi harus menebarkan virus jauh-jauh hari, terencana. Seperti Jokowi. Beberapa tahun sebelum mencalonkan diri harus dimulai, perlu waktu bagi seseorang termasuk perempuan untuk membangun ketokohan, hal itu tak mudah diperoleh dan membutuhkan waktu lama, tokoh perempuan hampir tak ada yg seperti itu (melakukan pembentukan citra atau ketokohan secara seksama seperti Jokowi), sebenarnya kalau ada tokoh perempuan yang melakukan proses penokohan dalam waktu lama, memungkinkan calon agar dikenal dan dicalonkan, walaupun perempuan atau tokoh tersebut dari daerah timur Indonesia. Karena DKI Jakarta tidak menutup diri dengan tokoh mana pun, termasuk dari daerah mana saja selama kompetensi dan prestasinya dikenal. Tidak harus putra daerah, kalau daerah lain; mungkin harus putra daerah. Artuinya siapapun bisa menjadi calon selama dia sudah dikenal dan diterima masyarakat. DKI Jakarta tidak mengenai istilah putra daerah, siapa si putra daerah, karena DKI Jakarta adalah daerah yang penduduknya berasal dari beragam daerah, milik semua bangsa Indonesia, penduduk yang berasal dari beragam suku dan daerah yang berdomisili di Jakarta. Jadi, belum ada tokoh perempuan yang mewarnai nasional. Belum ada yang sehebat tokoh-tokoh laki-laki.

Walaupun kesempatan sudah terbuka lebar bagi perempuan untuk aktif di politik, namun hal itu belum cukup mampu mengubah kondisi perempuan dalam politik. Kondisi tersebut disebabkan proses kon-

struksi yang sudah berlangsung lama dan sudah integral dalam proses kehidupan sosial budaya dan negara. Dibutuhkan upaya maksimal dan dukungan semua pihak untuk perlahan-lahan mengubah cara pandang perempuan dan politik. Cara pandang yang tepat diharapkan akan mampu menciptakan dan menumbuhkan semangat kaum perempuan untuk tertarik berpolitik. Akan tetapi perubahan yang lebih dan penting adalah menciptakan perubahan sosial budaya sehingga mampu melahirkan dalam proses konstruksi sosial budaya dan politik para tokoh-tokoh perempuan baru di samping yang sudah dikenal selama ini.

Sebenarnya sudah ada tokoh-tokoh perempuan yang muncul dan aktif di politik dengan kontribusi yang memadai, akan tetapi tentu saja dengan luas dan jumlah wilayah Indonesia diperlukan perempuan-perempuan berkualitas dan tertarik terjun di politik sebagai bentuk pengabdian mereka dalam mewarnai dan menciptakan prestasi mereka untuk mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia.

Nadia Umar, Ketua KPU DKI Jakarta menjelaskan mengenai perlunya tokoh-tokoh perempuan untuk mewarnai pentas politik Indonesia, yaitu:

“Tokoh-tokoh perempuan sebenarnya sudah muncul, ada dari PPP, Partai Golkar, Partai Demokrat dan lain-lain. Namun, selanjutnya bagaimana diri perempuan secara personal dan partai politik harus lebih mempunyai strategi untuk menokoahkan perempuan tersebut sehingga dikenal dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia sebenarnya ketika memilih tidak harus laki-laki, sudah bisa menerima calon laki-laki. Di Kalimantan Barat semuanya perempuan, padahal ketika memilih pasti ada pemilih laki-laki. Anggota DPDnya perempuan semua. Artinya bisa perempuan dipilih, selama dia dikenal dan bisa membuktikan diri kapabel. Hanya saja perempuan itu kekurangan uang.”

Peta perempuan di provinsi DKI Jakarta memang belum memadai, tapi cukup memberi warna. Dalam wilayah eksekutif, yang aktif adalah 20 dari jumlah pegawai di Propinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut disebabkan beberapa alasan, yaitu:

1. Jumlah pegawai negeri yang masuk juga tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki lebih banyak.
2. Dalam proses selanjutnya, PNS perempuan sebagian lebih memilih untuk mengutamakan keluarga dari pada peningkatan karir mereka.
3. Dukungan yang kurang maksimal dari keluarga dan masyarakat.
4. Tidak ada dukungan kebijakan sebagaimana adanya kebijakan dalam bidang legislatif yaitu kuota 30 persen.

Hal ini sebagaimana pernyataan Prof. Dr. Silviana Murni, M.Si:

“20 Persen, namun itu dapat dilihat dari proses masuk, uang jumlahnya tidak seimbang antar laki-laki dan perempuan. Jadi, ketika masuk perempuan lebih sedikit, ketika mereka berkarir mereka kemudian banyak yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan, untuk lebih mendahulukan suami dan keluarga, ketika perempuan-perempuan ini melakukan pilihan, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah hak mereka. Mereka yang memutuskan untuk berkarir atau untuk berkerja saja karena memang sudah sarjana atau mereka lebih mengutamakan karir pasanagan mereka, ada contoh kasus, adik saya sendiri dia S2 luar negeri dan pegawai negeri, kemudian menikah dengan pamong, kemudian adik saya memilih untuk mendukung suami agar maju dalam kakrir, itu adalah pilihan dan kita tidak punya hak untuk mempermasalahkan itu karena itu ruang personal. Itu adalah *choice*, kita tak bisa bilang bahwa kamu punya karir yang bagus, punya kesempatan menjadi kepala dinas dan lain-lain”.

Artinya, perempuan memerlukan dukungan yang serius agar mereka mampu berkiprah dengan nyaman di tengah masyarakat. Dukungan yang besar tersebut baik dari masyarakat, lingkungan dan terutama adalah keluarga. Dukungan keluarga sangat penting karena keluarga merupakan bagian yang terdekat dan perempuan berdasarkan nilai sosial budaya, dan politik mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengurus keluarga. Berbeda dengan laki-laki yang secara luwes bahkan dipahami sebagai 'kodrat' aktivitas mereka di wilayah publik. Laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah dengan peran-peran yang ditasbihkan oleh sosial budaya bahkan politik sehingga aktivitas kaum laki-laki di luar rumah adalah sebuah kemestian dan kewajiban.

Sedangkan aktivitas kreativitas dan kerja kaum perempuan dalam pertimbangan sosial budaya dan politik masih dipercaya sebagai pelengkap atau *second line*. Artinya perempuan tidak mempunyai kewajiban untuk aktif di wilayah publik termasuk di wilayah politik yang selama ini dianggap tabu dan kotor. Pemahaman tersebut, sekarang ini sudah mulai berubah, yang mana masyarakat sudah dapat menerima aktivitas perempuan di wilayah publik termasuk dalam politik. Akan tetapi, pada dasarnya nilai-nilai mengenai pembagian kerja secara seksual masih berlangsung dan sebagian besar perempuan sendiri sangat percaya dengan pembagian itu.

Pemahaman bahwa wilayah publik hanya untuk laki-laki dan wilayah domestik untuk perempuan-lah yang dikritik dan dipertanyakan urgensinya di tengah perkembangan zaman yang pragmatis. Masyarakat sudah dapat menerima perempuan bekerja, namun beban perempuan semakin berat yaitu dengan tetap mewajibkan peran domestik kepada mereka. Artinya bagi perempuan yang ingin sukses di politik, mereka juga tidak boleh melupakan kewajiban mereka sebagai perempuan, istri, dan ibu.

Atas dasar pemahaman sebelumnya, maka dukungan keluarga menjadi krusial bagi kesuksesan kaum perempuan dalam politik khususnya dan wilayah publik umumnya. Hal itu sebagaimana pandangan Silviana Murni dalam wawancara yang langsung dilakukan peneliti, yaitu:

“Kalau mungkin berbeda dengan suami, saya mendapat dukungan yang berbeda dari suami saya, karena pengalaman organisasi, mempunyai manajemen waktu yang bisa mendukung dalam melakukan pekerjaan, sambil kerja, kuliah, berorganisasi, dan keluarga”.

Peta kaum perempuan di legislatif, kondisinya juga hampir sama dengan kondisi perempuan di eksekutif DKI Jakarta. Jumlah anggota DPRD propinsi DKI Jakarta periode 2009-2014 adalah 22 orang dari 100 keseluruhan anggota. Kondisi ini sedikit lebih baik dibandingkan 2004-2009 yaitu hanya 15 orang. Dari jumlah anggota perempuan yang ada tentu tidak memadai dan seimbang dengan jumlah anggota laki-laki. Kondisi ini dikarenakan masa terbukanya perempuan aktif dalam politik masih baru, kepercayaan partai politik juga yang terpenting adalah kesediaan perempuan itu sendiri memilih politik sebagai aktivitas hidup mereka.

Ida Mahmudah, Komisi A DPRD DKI Jakarta menjelaskan dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, Oktober 2012 Pukul 14.30 WIB. Di Ruang rapat Komisi A DPRD Propinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

“Anggota DPRD propinsi DKI Jakarta, dan sekarang ini ada dua orang perempuan dan dua-duanya dipercaya sebagai Ketua Komisi, satu ketua komisi E dan satunya satunya ketua komisi A. Saya juga ditanya, apakah mau mengambil formulir serius atau tidak? Saya serius namun saya maju ke pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta saya belum siap, saya introspeksi diri”.

Walau masih kurang dari segi jumlah apalagi pengaruh, namun sudah mulai tumbuh kepercayaan kepada perempuan di eksekutif dan legislatif DKI Jakarta. Perempuan sudah cukup banyak yang mempunyai potensi pemimpin, misalnya sekarang saja kepala Bappeda dan sekretaris pemerintahan itu perempuan. Dan itu merupakan jabatan strategis, nyatanya bisa dipercaya dan dipegang oleh perempuan. Kendala yang terbesar menurut Ida Mahmudah adalah perempuan cenderung cepat menyerah jika mengalami masalah dan persoalan yang pelik. Artinya perempuan dianggap menghindari konflik, menyukai harmonisasi dan terkait dengan hal itu, perempuan enggan untuk melakukan konfrontasi jika muncul masalah.

Ida Mahmudah, Anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Fraksi PDIP menyatakan pendapatnya mengenai hal itu:

“Salah satu persoalan psikologis yang mempengaruhi kaum perempuan adalah *‘gampang menyerah’*. Pada dasarnya perempuan serius, namun perempuan juga gampang menyerah, dan hal itu harus kita akui”.

Sikap dan pendapat skeptis juga disampaikan secara tegas oleh Diana Umar, Ketua KPU DKI Jakarta yang menyatakan bahwa perempuan agak lambat berkembang dalam persaingan dalam politik karena perempuan tidak berani mencalonkan diri karena berbagai pertimbangan. Sebagaimana perempuan sudah tertarik dengan politik, namun alasan-alasan di luar diri mereka menjadi alasan pencalonan tersebut urung dilakukan. Alasan keluarga, personal atau tidak berani bersaing dengan kandidat laki-laki menjadi kendala besar bagi perempuan dalam proses politik.

Realitas lainnya yang melingkupi perempuan adalah ketakutan perempuan bersaing dengan kandidat laki-laki dan tidak adanya dukungan partai politik sebagai kandidat Cagub dan Cawagub. Realitas

tersebut merupakan kombinasi semua alasan yang disebutkan di atas. Tetapi alasan yang paling dominan adalah karena partai politik yang tidak mendukung pencalonana tersebut karena partai politik belum percaya pada kemampuan perempuan.

Perempuan belum menjadi kandidat yang menarik bagi partai politik, terlebih jika partai politik menilai perempuan tersebut tidak mempunyai 'modal' yang dapat ditawarkan bagi keuntungan partai politik dan masyarakat. 'Modal' yang dimaksud adalah latar belakang atau anak siapa yang merupakan status sosial perempuan dan finansial yang dimiliki perempuan. Finansial merupakan unsur yang sangat penting karena partai politik menuntut perempuan mampu membiayai proses politik selama pencalonan. Sedangkan ketokohan yang muncul karena kaderisasi politik menjadi tidak terlalu penting jika seseorang tidak mampu membiayai aktivitas politik mereka.

Selengkapnya pandangan Nadia Umar, Ketua KPU DKI Jakarta, yaitu:

“Partai politik juga tidak membangun ketokohan perempuan sehingga tidak *acceptable* sebagai kandidat. Partai politik belum menempatkan perempuan sebagai tokoh perempuan yang harus dimunculkan, sehingga hal itu menjadi kendala dalam proses pencalonan perempuan, partai politik belum percaya dengan tokoh perempuan. Mereka yang muncul itu itu bukan hanya karena sudah menjadi anggota DPR/DPRD, tetapi juga perempuan harus mempunyai histori ketokohan dari keluarga atau komunitas, seperti Megawati, dan lain-lain. Seperti ibu Rustriningsih orangtuanya adalah tokoh masyarakat, sehingga saat dia berkiprah maka dukungan sangat banyak dan mudah diterima masyarakat.

Pandangan yang hampir sama disampaikan oleh Marrison Harque Fauzi, tokoh perempuan, mantan anggota DPR RI Fraksi PDIP dan Mantan Calon Gubernur Propinsi Banten 2008 menyatakan:



“Rezim Indonesia ini, parpol sejak kita merdeka. Dulu perempuan tidak eksis sama sekali, dengan bergesernya waktu terus juga lebih banyak kesadaran dari perempuannya itu sendiri juga dengan keikhlasan para lelaki, politik akhirnya niscaya. Tapi kita tahu bahwa terjadinya niscaya karena beberapa faktor eksternalitas justru tak terkendali. Nah dari mana itu? Lembaga Donor, IMF dari mereka masuk di hampir setiap departemen yang betul-betul aktif yang membuat rancangan undang-undang yang akhirnya jadi undang-undang mempengaruhi para anggota fraksi di Partai Demokrat”.

Sebenarnya perempuan dapat menjadi bagian penting dalam proses politik Indonesia saat ini. Namun perempuan harus mempunyai kecakapan yang setara dengan kaum laki-laki. Perjuangan tersebut memang tidak mudah di tengah kemapanan aktivitas politik kaum laki-laki. Bagaimanapun kondisinya perempuan tetap mempunyai peluang yang besar untuk aktif di wilayah politik yaitu dengan kondisi-konsisi yang mendukung perempuan yaitu:

- a. Berpendidikan,
- b. Populis,
- c. Good look,
- d. Ilmu yang cukup, dan
- e. Dukungan dana.

Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Marissa Harque Fauzi dalam wawancara, September 2012 sebagai berikut:

“...mesti berpendidikan, populis, *good look*, cukup ilmunya, cukup populernya, punya dukungan dana itu masuk dalam prasyarat, jadi yang awallah yang harus dimiliki, dan dia mesti punya pengalaman bermasyarakat entah politik atau non politik, namun yang bersentuhan sama manusia yang banyak.

Nah artis sudah punya modal awal, lewat infotainment sudah bersentuhan secara emosional”.

Ketidakhadiran perempuan secara terbuka juga diakibatkan oleh ketidanyaman kaum laki-laki terhadap aktivitas politik perempuan. Kehadiran perempuan cenderung mengganggu *'status quo'* kaum laki-laki yang selama ini mendominasi banyak sektor dalam kehidupan, salah satunya sektor politik. Perempuan yang dianggap *'pintar'* cenderung menjadi ancaman kepada realitas laki-laki. Ketidakhadiran laki-laki atas kesempatan yang semakin luas dalam wilayah publik semakin menegaskan bahwa memang tidak mudah bagi kaum perempuan untuk beraktivitas di politik tanpa dukungan hal-hal yang disebutkan di atas, terutama dukungan finansial dan partai politik. Walau sebenarnya kaum perempuan yang mempunyai kelebihan-kelebihan seperti berpendidikan, pengaruh keluarga/keturunan yang dikenal masyarakat dan kecukupan finansial cenderung sudah mempunyai modal yang kuat untuk terjun ke wilayah publik seperti politik.

Ida Mahmudah menyatakan bahwa sosok perempuan yang potensial untuk dicalonkan sebagai pimpinan DKI Jakarta harus sesuai dan cocok dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Salah satu alasannya karena DKI Jakarta memang penuh dengan berbagai macam persoalan. Maka perempuan yang mencalonkan diri atau maju sebagai calon gubernur haruslah perempuan yang kuat, berani, tegas, pintar dan punya prinsip. Mereka harus mempunyai kualitas yang sama dengan kaum laki-laki, dan ditunjang dengan kelebihan mereka yang lebih peka dan peduli dengan masalah-masalah yang selama ini mungkin terabaikan oleh pemimpin laki-laki. Walau semua masalah di Jakarta memerlukan perhatian ekstra, namun persoalan-persoalan yang langsung menyentuh dengan isu-isu perempuan dan masyarakat kecil harus menjadi perhatian sepenuhnya.

Dalam wilayah politik kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kaum perempuan akan memudahkan mereka menguasai persaingan politik dengan kaum laki-laki. Realitas tersebut sebenarnya menjadi peluang yang besar bagi perempuan untuk memilih politik sebagai aktivitas mereka, sehingga peta kekuatan perempuan dalam politik semakin hari semakin besar dan kuat. Artinya sebenarnya perempuan sebagian mempunyai modal untuk itu. Besarnya peluang perempuan dalam politik sebagaimana yang disampaikan oleh Marissa Harque Fauzi, Mantan Anggota DPR RI Fraksi PDIP dan calon gubernur provinsi Banten 2008-2013.

Di bawah ini adalah pernyataan Marissa Harque Fauzi:

“intinya gini, perempuan itu makhluk cantik, dipoles dikit makin kinclong, perempuan itu ancaman, Perempuan cantik, *good look*, pintar, punya duit, yasudah selesai. Dunia dalam genggamannya. Jadi hadir dia ancaman, apa perempuan itu mesti cantik tapi goblok, dan dia *drive*, dia seperti layang-layang ada yang narik dibelakang, seperti Atut sama bapaknya, atau seperti Airin, Airin kan cantik asli, pintarnya asli, bukan ijazah palsu, tapi *drivemya* siapa? Suaminya, adiknya Atut, dia tidak berkuasa atas dirinya dan kebijakannya. Dan siapa *drivemya*, para pengendalinya, para pria”.

Kesempatan politik perempuan semakin luas karena kegiatan politik perempuan didukung sepenuhnya oleh landasan konstitusi yang cukup baik yaitu kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen. Kebijakan tersebut telah membuka peluang yang besar kepada kaum perempuan aktif di politik, namun jangan hanya sebagai memenuhi peluang semata tanpa mempersiapkan kualitas politikus yang mengisi kesempatan tersebut. Dengan kata lain kaderisasi merupakan suatu proses yang harus dijalankan oleh partai politik disamping kualitas personal perempuan itu sendiri. Hal itu sangat penting agar kandidat yang dicalonkan dan yang

tersedia mampu menjalankan pemerintahan dengan baik mencapai kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Pertanyaan mengenai kualitas memang sempat menjadi perdebatan di kalangan perempuan sendiri memang sempat menjadi polemik karena persoalan dan pertanyaan kualitas politik acapkali ditanyakan kepada politisi perempuan, namun tidak ditanyakan kepada politisi laki-laki. Ada kecenderungan bahwa kualitas politik laki-laki sudah mencukupi dan tidak perlu mempersoalkannya. Akan tetapi terlepas dari polemik itu ada baiknya pertanyaan tersebut menjadi pemicu kaum perempuan agar meningkatkan kualitas personal dan kelompok.

Perempuan memang tidak cukup hanya mempunyai peluang yang besar Namun harus melakukan berbagai strategi agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari proses politik. Perempuan harus menjadikan kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen sebagai *entry point* masuk ke wilayah politik yang lebih reformasi, ketentuan kuota telah memberikan peluang politik bagi perempuan walau kebijakan ini belum sepenuhnya bisa dilakukan karena kebutuhan politisi perempuan tidak sebanding dengan kader dan perempuan yang tersedia dan mau aktif di politik.

Kebijakan 30 persen dalam UU Partai politik dan Pemilu hanya mencakup persoalan kandidat legislatif, sedangkan untuk keterwakilan pada level eksekutif hingga saat ini belum memiliki ketentuan *affirmative action*. Namun, kebijakan tersebut menjadi pemicu bagi keterbukaan dan kesadaran politik kaum perempuan dan juga kesadaran partai politik sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menentukan proses kandidat dapat mencalonkan diri atau tidak. Realitas itu diharapkan juga mampu membuka kesempatan, semangat dan kesadaran kaum perempuan untuk mau dan berani mencalonkan diri sebagai pimpinan kepala daerah. Keberanian tersebut diperlukan di tengah dominasi kaum laki-laki selama ini sebagai kepala daerah.

Sangat semangat kaum perempuan untuk terjun dan memilih aktivitas politik sebagai perjuangan dan pengabdian mereka di tengah masyarakat dan juga sebagai karir mereka sangat dibutuhkan karena perempuan memerlukan energi dan dukungan yang lebih besar dari kaum laki-laki dalam aktivitas mereka di politik. Perempuan selain perjuangan berdamai dengan persoalan internal mereka, keluarga, partai politik, namun juga harus melawan dan meyakinkan masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya. Judgment sosial budaya ikut mempengaruhi realitas personal perempuan dalam berpolitik dan hal itu tidaklah mudah di tengah tuntutan nilai-nilai sosial budaya yang masih kuat. Perempuan dalam konteks ini masih dituntut untuk bertanggung jawab dalam keluarga, mendidik anak-anak, dan menjadi istri yang baik bagi suami mereka. Belum lagi tuntutan sosial budaya mengenai apa yang pantas dan tidak pantas bagi perempuan yang menambah 'beban' di pundak perempuan.

Menurut Marissa Harque Fauzi, kebijakan kuota 30 persen seharusnya berlaku juga di level eksekutif dan diserahkan kepada masing-masing daerah didasarkan ketentuan UU Otonomi Daerah agar kesempatan perempuan merata di level eksekutif, legislatif dan yudikatif, yaitu:

“.....karena udah otonomi daerah, itu tidak berbanding lurus, jadi setiap event, kesempatan itu berdiri sendiri setelah UU 32 tahun 2004”.

Kebijakan tersebut hanya bersifat sementara selama proses perjuangan belum seimbang dengan kaum laki-laki dan kedepannya akan dihilangkan sebagai prasyarat berdemokrasi, di mana laki-laki dan perempuan sama di mata hukum. Jadi kaum perempuan tidak bisa menjadi kebijakan kuota ini sebagai kekuatan hukum mengenai keterwakilan perempuan di wilayah politik. Perempuan dituntut untuk melakukan perjuangan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Perempuan dapat menggunakan strategi-strategi komunikasi politik tertentu untuk

menjadikan kader politik yang menarik dan disukai oleh masyarakat. Salah satu strategi komunikasi politik yang layak digunakan adalah pemanfaatan media massa semaksimal mungkin untuk sosialisasi, publisitas dan kampanye yang mampu membentuk image dan opini publik masyarakat.

Strategi yang digunakan politisi agar muncul sebagai kekuatan politik baru yang mensejahterakan masyarakat dengan menjadi *politisi selebriti atau polibriti*. Strategi komunikasi politik dengan memanfaatkan media massa semaksimal mungkin untuk kepentingan politik perempuan. Walau hal itu tidak mudah karena isu-isu perempuan dalam politik bukan isu yang menarik bagi media.

Marissa Harque Fauzi menyatakan hal tersebut selengkapnya di bawah ini:

“Perempuan dapat mengkrete diri mereka menjadi polibriti dong agar mereka muncul sebagai perempuan yang dikenal dan dapat menjadi kader politik. Perempuan harus menjadi polibriti dan jadilah media darling”.

Penguasaan media dapat memudahkan perjuangan perempuan di wilayah politik. Dengan ketertinggalan selama ini maka perempuan harus melakukan dan menerapkan strategi-strategi tertentu. Salah satu strateginya adalah dengan memanfaatkan media massa dan *new media* semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Sosialisasi dan publisitas sangat diperlukan untuk membentuk image atau citra perempuan dan sekaligus membentuk opini positif pada masyarakat mengenai perempuan. Artinya proses tersebut harus direncanakan dengan sebaik mungkin bukan hanya sesaat. Hal itu sebagai langkah awal untuk menciptakan kekuasaan perempuan di wilayah politik.

Kekuasaan dalam politik ke depan merupakan suatu kemestian karena dengan memiliki kekuasaan perempuan lebih dapat menggunakan

kekuasaan mereka bagi kepentingan khalayak secara lebih baik. Di sini, kekuasaan bukan hanya untuk diri sendiri, namun kekuasaan perempuan harus mensejahterakan masyarakat. Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang mampu mensejahterakan bukan hanya berkuasa dan kemudian merugikan masyarakat.

Terdapat beberapa konsep *Power* dalam upaya pemberdayaan perempuan yaitu: Pertama, *Power Over*; Kekuasaan yang nyata/jelas, yaitu kekuasaan seseorang atau group untuk mempengaruhi/ mendapatkan orang atau group lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. *Power Over* ini sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan dan juga mampu memenangkan konflik. *Power Over* acap kali dilakukan melalui kekerasan dan menimbulkan ketakutan atau dapat juga melalui kekuatan aturan-aturan sosial yang memaksa kelompok lemah untuk menerima kemauan kelompok lebih kuat dalam perlakuan di kehidupan sehari-hari. Judith Squieres (1999:32) menyatakan bahwa pusat perdebatan tentang hakikat politik adalah “*nation of power*”. Politik digambarkan sebagai sesuatu yang dimiliki, diobservasi dan dapat diukur. Pemahaman inilah yang mempengaruhi konsep *Power Over*, yaitu salah satu karakter tentang pandangan dimensional tentang *power*, pandangan ini memfokuskan pada perilaku kekuasaan dalam membuat keputusan atas isu-isu yang mengandung konflik kepentingan secara subyektif. Konsep kapasitas *power* terletak pada bagaimana seseorang atau sebuah kelompok atau negara mampu mengontrol, mengendalikan, mengarahkan pihak lain sebagai kelompok subordinatnya sehingga mematuhi atas aturan atau undang-undang yang diterapkan. Sri Latha Batliwata (1999: 26) menjelaskan, bila seseorang memiliki *power* maka seseorang tersebut memiliki kekuasaan yang akan berlaku sebagai kemampuan melakukan kontrol bukan hanya pada badan/fisik manusia sumber-sumber finansial tapi juga pada ideologi, sehingga kelompok *Power Over* mampu menciptakan aturan-aturan. Sylvia Walby (1999: 26) menyatakan *Power Over* sifatnya *Oppressive*, *Devisive* dan *Destructive* seperti sistem Patriarkhi

yang mengusung nilai dominasi oleh laki-laki dan membuat aturan kehidupan perempuan.

Kedua, *Power from Within*, kekuasaan dalam diri perempuan pada dasarnya ada dan harus dimunculkan sebagai sebuah kekuatan diri perempuan tersebut. *Power from Within* ini muncul dari upaya pengenalan diri, melihat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan juga kekuatan agar perempuan mampu mengetahui kapasitas dirinya dalam upaya meningkatkan kekuatan internal dan kepercayaan diri (dalam Tonwsend dan Downing, 1996:4). Hal ini fundamental jika perempuan hendak mengembangkan diri agar memiliki kemampuan menangani sistem patriarchal dan kapital mereka. (1999: 30).

Ketiga, *Power With*, Kekuasaan atau kapasitas untuk berkembang dengan yang lain. Seseorang tidak dapat berkembang hanya dengan mengandalkan diri sendiri tapi mereka membutuhkan pihak lain untuk mendukung mereka sehingga semakin memiliki jalan untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan kehidupan sosial yang sangat kompetitif terutama di politik perempuan membutuhkan pihak lain seperti partai politik, organisasi perempuan dan organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintah, media massa, organisasi lawan politik dan *follower*/pemilih atau masyarakat umum. Dalam *Power With* diperlukan kemampuan bersosialisasi dengan pihak lain yang akan mendukung kinerja politik perempuan tersebut. Kekuasaan ini mensyaratkan keterlibatan orang lain yang akan memperkaya kekuasaan *power with*. Karena pada kenyataannya hampir tidak mungkin seseorang tidak membutuhkan orang lain jika aktif di politik.

Keempat, *Power to*, Kekuasaan untuk melakukan hal baru yang bermakna *Political Power*. Kekuatan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mampu berkata dan mengambil keputusan. Kekuatan untuk mampu melakukan kerja dalam aktivitas mereka. Kekuatan ini diperlukan karena



ini merupakan potensi manusia. Potensi yang dimiliki seseorang menyebabkan kemungkinan seseorang tersebut dapat melakukan sesuatu.

Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan adalah cara membina hubungan-hubungan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat sipil dan bukan justru mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat sipil. Namun, jika kondisi kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi dialami masyarakat sipil yang disebabkan hegemoni kelompok penguasa dan kaum borjuis termasuk kaum intelektual, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Antonio Gramsci dalam konsep hegemoninya bahwa akan selalu ada kekuasaan-kekuatan yang dipergunakan untuk melawan tekanan dan sikap represif penguasa. Dipercayai juga akan ada cara-cara politik yang kreatif dan cerdas dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mau menerima hegemoni ideologi yang menindas.

Menurut Gramsci, kekuasaan tidak hanya dapat diperoleh dan dipertahankan dengan cara kekerasan, namun juga mampu diperoleh dan dipertahankan dengan *cara soft*, yang disebutnya dengan hegemoni. Kelompok yang selama ini dianggap subordinat penguasa atau bahkan menentang penguasa dapat saja membangun aliansi baru guna menciptakan hegemoni baru. Kelas dominan, sebagaimana paham Marxis yang dipergunakan untuk menjelaskan relasi kekuasaan di masyarakat borjuis, adalah kelompok dominan yang memakai hegemoni negara dan sumber daya ekonomi serta produksi yang berakibat terjadinya subordinasi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan produksi.

## **B. Representasi Perempuan sebagai Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012**

Perempuan sebagai salah satu gender yang mempunyai hak pilih dalam sistem demokrasi Indonesia harus terwakili secara seimbang dalam percaturan politik Indonesia. Pemilih perempuan saat ini adalah pemilih terbanyak dalam sistem politik Indonesia yaitu 54 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih.

Perempuan adalah *stackholder* terbesar di negeri ini yang suara dan aktivitasnya tak bisa diabaikan begitu saja. Perempuan semestinya perempuan harus mengambil peran yang sesuai dan memadai dalam wilayah politik. Perempuan harus menumbuhkan minat di wilayah politik agar mampu mewarnai proses politik yang beralngsung. Fakta sebenarnya perempuan punya minat untuk menjadi pemimpin provinsi DKI Jakarta. Namun, perempuan sebagian sangat menyadari keterbatasan mereka sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang dilakukan laki-laki. Realitas itu yang banyak menyebabkan kader perempuan memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai pemimpin DKI Jakarta. Demikian juga fenomena dalam pemilu Jakarta 2012 yang ternyata tidak satupun partai politik yang mencalonkan perempuan sebagai kandidat pemimpin Jakarta yang akan bersaing dalam Pemilu 2012.

Nurul Arifin, Anggota DPOR RI Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa:

“Saya kira ada dan pasti ada. Saya juga punya minat, tapi saya menyadari kekuatan dan kesempatan yang ada, dan memilih untuk tidak, tidak mungkin memberikan upeti untuk partai yang mengusung atau menjanjikan kepada partai pemenang Pemilu. Sebenarnya ada, seperti wacana yang dibangun oleh perempuan yang mempromosikan dirinya di mana-mana bahkan di metro mini (hasnaini), artinya minat itu ada, pasti

ada perempuan lain yang juga mempunyai minat, walau tidak seagresif. Pasti ada kelompok perempuan yang punya minat namun dikarewnakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka mereka tidak melakukannya”.

Keterwakilan perempuan dalam politik sudah mulai terlihat dengan lahirnya UU Pemilu dan UU Partai Politik dengan ketentuan *affirmative action*, kuota 30 persen. Dalam kebijakan *affirmative action*, diatur bahwa keterwakilan perempuan harus mencapai 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif baik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/walikota. Ketentuan yang sama juga disarankan terpenuhi dalam kepengurusan partai politik. Ketentuan ini cukup memperoleh dukungan dari berbagai pihak walau ketentuan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum atau hanya sebagai sebuah anjuran. Namun, tidak ada ketentuan khusus dalam pencalonan di wilayah eksekutif atau kepala pemerintahan.

Akan tetapi keterbukaan dan kesempatan yang besar di wilayah politik tetap tidak menyakinkan bagi aktivitas perempuan untuk aktif di politik ksarena sulit bersaing dengan laki-laki. Artinya peluang yang besar di wilayah politik tidak serta merta menjadikan perempuan menjadi bagian yang aktif secara mudah dalam politik, diperlukan perjuangan yang sangat kuat dari kaum perempuan untuk menjadi bagian dari proses politik. Hal tersebut karena politik selama ini sudah menjadi wilayah aktivitas yang sangat nyaman dan dikuasai oleh kaum laki-laki.

Kenyamanan itu bahkan diperkuat oleh kekuatan sosial budaya bahwa kaum laki-lakilah yang sesuai untuk menjadi pemimpin karena dianggap lebih rasional, siagap, cekatan, dan tenang tegas, cepat mengambil keputusan. Laki-laki jauh dari sifat emosional, ketakutan, lambat dalam mengambil keputusan dan tidak suka bersaing dan lebih memilih untuk melakukan kompromi agar konflik tidak terjadi. Sifat-sifat yang

terakhir acapkali dilekatkan pada kaum perempuan. Sulit bagi kaum perempuan bersaing dengan laki-laki walau kesempatan yang besar bagi kaum perempuan walau sudah diatur dalam kebijakan mengenai keterwakilan 30 persen perempuan dalam politik.

Pandangan pesimis tersebut sebagaimana disampaikan oleh Nadia Umar, Ketua KPU DKI Jakarta sebagai berikut:

“Sulit di DKI bagi perempuan bersaing di Jakarta sebagai calon Cagub/Cawagub, karena di DKI persaingan begitu ketat. Yang mencalonkan diri semua adalah calon yang masih menjabat ataupun tokoh nasional yang sudah sangat dikenal dan beberapa tokoh perempuan yang sudah dikenal hanya ibu Megawati, ibu Khofifah, belum ada misalnya yang bisa bersaing dengan tokoh-tokoh laki-laki yang sudah sangat terkenal dan mapan secara politik, kecuali tokoh perempuan tersebut dipersiapkan diri dengan baik, jauh-jauh hari”.

Perempuan jika ingin terjun ke wilayah politik dan mencalonkan diri dalam proses politik seperti pilkada dan pemilu legislatif harus mempunyai perencanaan dan program yang tepat. Memerlukan proses yang panjang termasuk bagian dari mensosialisasikan dan menciptakan image baik di tengah masyarakat. Hal itu sama-sekali tidak bisa dilakukan dengan tiba-tiba atau mendadak. Perempuan mau tidak mau harus membangun ketokohan sebagaimana juga dilakukan oleh laki-laki. Walau dalam kenyataannya perempuan harus melakukan penokohan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan laki-laki. Pencitraan harus dilakukan dan perencanaan juga harus dicanangkan jauh-jauh hari. Dalam prosesnya perempuan harus memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, perempuan harus dikenal ketokohan dan karyanya di tengah masyarakat. Sekaligus bisa menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat bahwa perempuan tersebut

mampu untuk menjadi pemimpin Jakarta sebagai kota multi etnis, multi masalah, kota metropolitan dan sumber perubahan pertam. Oleh karenanya diperlukan kemampuan dan kekuatan perempuan jika menjadi kandidat gubernur DKI Jakarta harus lebih besar dan perencanaan yang baik karena peluang pesaing terbuka, hal itu disebabkan calon gubernur Jakarta tidak hanya terbatas putra daerah atau yang berdomisili di Jakarta. Namun juga terbuka bagi siapapun. Berbeda dengan daerah lainnya yang masih cenderung mempertahankan bahwa yang boleh untuk mencalonkan diri sebagai Cagub/Cawagub DKI Jakarta. Keterbukaan asal daerah kandidat disebabkan DKI Jakarta adalah kota khusus, ibu kota Indonesia karena DKI Jakarta adalah daerah yang penduduknya bersal dari beragam daerah, milik semua bangsa Indonesia, penduduk yang berasal dari berbagai daerah yang penduduknya terdiri dari beragam suku yang ada di Indonesia dan bukan hanya representasi masyarakat Betawi atau masyarakat tertentu lainnya, melainkan representasi seluruh masyarakat Indonesia.

Atas dasar realitas tersebut, perempuan harus mempunyai kekuatan, dikenal dan sekaligus mempunyai prestasi yang disukai masyarakat untuk bisa mencalonkan diri sebagai Cagub/Cawagub. Jika realitanya sampai saat ini belum ada perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nadia Umar menyatakan secara tegas bahwa di DKI Jakarta belum ada perempuan yang mempunyai kualitas nasional sebagaimana tokoh-tokoh laki-laki. Perempuan juga perlu mempunyai perencanaan yang kuat dalam proses politik. Selengkapnya pandangan Nadia Umar, Ketua KPU Jakarta:

“belum ada tokoh perempuan yang mewarnai nasional. Belum ada yang sehebat tokoh-tokoh laki-laki. Lebih lanjut pendapat Nadia Umar, Ketua KPU DKI Jakarta mengenai perlunya perencanaan bagi perempuan dalam proses politik. Jadi harus menebarkan virus jauh-jauh hari, terencana. Seperti Jokowi. Beberapa tahun sebelum mencalonkan diri harus dimulai,

perlu waktu bagi seseorang termasuk perempuan untuk membangun ketokohan, dan hal itu tidak mudah diperoleh serta membutuhkan waktu lama, tokoh perempuan hampir tidak ada yang seperti itu (melakukan pembentukan citra atau ketokohan secara seksama, jauh-jauh hari seperti Jokowi). Sebenarnya jika ada tokoh perempuan melakukan proses penokohan dalam waktu lama, memungkinkan untuk dikenal dan dicalonkan, walupun perempuan atau tokoh tersebut dari daerah timur Indonesia. Karena DKI Jakarta tidak menutup diri dengan tokoh manpun, termasuk dari daerah man saja selama prestasinya dikenal.

Di samping belum ada ketokohan perempuan yang setara ketokohan kaum laki-laki dalam politik yang mengakibatkan perempuan tidak adanya calon perempuan dalam pilkada DKI Jakarta 2012 atau bahkan sepanjang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kondisi tersebut juga diakibatkan oleh banyak kendala yang dihadapi kaum perempuan pada saat memutuskan terjun ke politik. Realitas ini yang menyebabkan perempuan kelihatannya tidak berani atau tidak ada yang berhasil lolos sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta atau tepatnya mau mencalonkan diri mempunyai alasan-alasan yang kompleks. Alasan-alasan itu antara lain karena alasan keluarga, personal. Selama ini perempuan kerap merasa tidak mampu bersaing dengan kandidat laki-laki atau karena partai politik tidak mendukung perempuan sebagai kandidat Cagub dan Cawagub. Kombinasi semua alasan yang disebutkan di atas.

Alasan lainnya di luar diri perempuan adalah aturan politik di mana partai politik merupakan satu-satu akses bagi siapapun kader baik perempuan dan laki yang mempunyai keinginan terjun ke politik. Lolos atau tidaknya seorang calon ditentukan oleh keputusan partai politik yang menjadi naungan kader partai. Ini dapat menjadi kendala besar khususnya bagi perempuan karena dalam realitasnya jumlah

perempuan yang mempunyai akses dan kekuatan untuk mempengaruhi kekuatan dan dominasi partai politik sangat minim. Partai politik masih didominasi kepengurusannya oleh laki-laki yang mau tidak mau mempengaruhi pertimbangan partai politik dalam meloloskan calon pemimpin yang diusung dalam pilkada.

Demikian juga dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2012, dari enam pasangan calon, tidak ada satupun perempuan yang diusung oleh partai politik. Perempuan belum menjadi kandidat yang menarik dan kuat bagi partai politik untuk mempengaruhi masyarakat dan meraup jumlah suara. Perempuan belum dipercaya partai politik disebabkan berbagai pertimbangan. Salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah merujuk pada sifat-sifat yang dilekatkan pada perempuan seperti lemah, tidak rasional, menghindari konflik, kendala keluarga dan lain-lain.

Nadia Umar, Ketua KPU DKI Jakarta menjelaskan mengenai tidak diterimanya perempuan oleh partai politik sebagai kandidat pemimpin di Jakarta:

“Tapi secara dominan adalah karena partai politik yang tidak mendukung dan membangun ketokohan perempuan sehingga tak diterima (*unac-sifat yang beptable*) sebagai kandidat. Partai politik belum menempatkan perempuan sebagai tokoh perempuan yang harus dimunculkan, sehingga hal itu menjadi kendala dalam proses pencalonan perempuan, partai politik belum percaya dengan tokoh perempuan. Mereka yang muncul itu itu bukan hanya karena mereka sudah menjadi anggota DPR/DPRD, tetapi juga perempuan harus mempunyai histori ketokohan dari keluarga atau komunitas, seperti Megawati, Rustriningsih, Atut Chosiyah, dan lain-lain”.

Perempuan dinyatakan akan mudah membangun aktivitas politik jika mereka mempunyai sejarah historis yang mendukung kiprah mereka di politik, misalnya orangtuanya adalah tokoh-tokoh seperti Megawati

Soekarniputri, Atut Chosyiah, Bupati Kutai Klaimantan Timur, Bupati Minahasa, Walikota Tangerang Selatan dan lain-lain. Historis Keluarga yang melekat pada tokoh-tokoh perempuan memudahkan mereka berkiprah di politik dan memperoleh dukungan sangat banyak dan mudah diterima masyarakat. Artinya bagi perempuan yang mempunyai histori yang kuat dalam proses politik, dukungan orang tuanya sangat besar, didukung sepenuhnya oleh ketokohan orang tuanya, demikian juga bupati Kutai merupakan anak bupati sebelumnya. Jadi sejarah ketokohan dari keluarga dan komunitas penting dalam proses politik perempuan. Sayangnya yang berkualitas dan tidak mempunyai ketokohan keluarga sebenarnya juga banyak, namun perempuan tersebut tidak berhasil menjadi tokoh jika tidak ditokohkan oleh komunitas dan partai politik. Di Indonesia ketokohan itu masih sangat dinilai. Walau ada juga tokoh perempuan yang mampu muncul secara mandiri seperti ibu Khofifah, yang berhasil karena tidak mengandalkan ketokohan keluarga, melainkan mampu menggunakan dan membangun ketokohan personal dalam proses reformasi 1998 dan seterusnya. Dia pimpinan sebuah organisasi besar dan Khofifah dekat dengan tokoh-tokoh laki-laki yang saat itu menjadi sentral dalam proses reformasi seperti Gusdur. Perempuan membutuhkan '*katalisasi*' atau tokoh lain yang menjadi rujukan dan mendukung aktivitas publik dan politik yang dilaksanakan perempuan. Hal itu diperlukan untuk membangun dan mencapai ketokohan perempuan harus bekerja lebih keras, ibaratnya kalau sekolah, laki-laki cukup belajar 3 jam, namun perempuan harus belajar dua atau tiga kali lipat untuk menyatarakan diri dengan perempuan.

Satu segi perempuan sudah cukup diterima oleh masyarakat. Tokoh-tokoh perempuan yang muncul, ada dari PPP, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan lain-lain. Namun, proses selanjutnya tergantung kepada kreatifitas dan sepak terjang perempuan itu sendiri, baik secara personal dan partai politik harus lebih mempunyai strategi untuk menokohkan perempuan tersebut sehingga dikelola dan diterima oleh



masyarakat. Masyarakat Indonesia sekarang ini sudah sangat terbuka dan menerima perempuan sebagai kandidat. Pertimbangan masyarakat dalam memilih tidak harus laki-laki dan sudah bisa menerima calon perempuan. Contohnya, anggota DPD Kalimantan Barat dari hasil pemilu 2009 yang lalu yang terpilih semuanya perempuan, padahal ketika memilih pasti ada pemilih laki-laki. Artinya bisa perempuan dipilih, selama dia dikenal dan bisa membuktikan diri bahwa mereka kapabel, berkualitas dan layak dipilih.

Menurut Pandangan Silviana Murni sebenarnya ada semacam harapan atau keinginan karena ada pernyataan bahwa Jakarta sebagai kota yang terbuka, namun dalam dunia politik muncul sebagai kota tidak ada perbedaan siapa yang memimpin. Bahkan cenderung lebih menyukai pemimpin perempuan karena dianggap lebih punya kepedulian kepada perempuan dan masyarakat, sensitif dan detail melihat persoalan yang ada. Yang menjadi permasalahan adalah kemampuan dan pengalaman politik dan aktivitas publik perempuan, *track record*, dan pengalaman-pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi dipandang penting agar perempuan mampu mengelola situasi yang ada dengan baik, sekaligus mampu menguasai publik dan masyarakat. Pengalaman organisasi dipercaya mampu menciptakan perempuan yang tangguh. Pintar berargumentasi, berani, logis dan sistematis. Artinya sehebat apapun perempuan jika tidak ada pengalaman berorganisasi agak sulit, karena harusnya perempuan harus mempunyai kemampuan mengelola, memimpin rapat, sistematis berpikir sehingga mampu menggerakkan bawahan dan memutuskan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Masalah lainnya yang dihadapi oleh perempuan ialah soal finansial yang terbatas. Perempuan umumnya tidak menguasai ekonomi yang memadai dan hal itu menjadi alasan terbatasnya sumber daya perempuan. Hal itu dipersulit juga dengan ketidakpercayaan partai politik

mengenai kemampuan perempuan untuk mendukung keuangan partai. Kekuatan finansial acapkali mampu mengalah kualitas seorang kandidat karena partai politik mensyaratkan seorang kader atau kandidat mampu membiayai kampanye dan proses politik masing-masing, sekaligus mampu mendukung pembiayaan partai politik. Tidak dapat dinafikan bahwa kegiatan-kegiatan partai membutuhkan pembiayaan dalam realisasinya.

Pendapat Nadia Umar, Ketua KPU DKI Jakarta menyatakan:

“Berdasarkan hasil penelitian di DPR, anggota dpr perempuan menyatakan bahwa mereka dapat saja mempromosikan diri agar dikenal oleh masyarakat jika mempunyai dukungan biaya dapat lebih bisa melakukan kampanye ke pelosok-pelosok, namun kenyataannya perempuan sellau kebanyakan kondisi keuangannya terbatas/sedikit dibandingkan laki-laki. Itu juga yang menyebabkan perempuan kurang dikenal dibandingkan perempuan. Hanya saja perempuan itu kekurangan uang”.

Uang atau kekuatan finansial menjadi krusial dalam proses politik karena pembiayaan politik semkain hari semakin mahal, dan hampir tidak bisa dilaksanakan proses politik tanpa membutuhkan dukungan finansial. Beragam aktivitas politik seperti kaderisasi partai politik, kepengurusan partai, publikasi, kampanye dan sosialisasi program dan kandidat, pemanfaatan media massa dan *new media*, iklan, *talk show*, pemanfaatan media luar ruang dan pertemuan-pertemuan langsung/*face to face communication* dan mimbar publik. Upaya tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan dan memelihara opini publik dan image positif masyarakat, termasuk dalam upaya memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan dan pengaruh politik seseorang dan partai politik.

Terlepas dari masalah dukungan finansial bagi partisipasi politik perempuan, masalah yang sangat kuat menekan realitas politik perem-

perempuan adalah masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya. Bagaimanapun kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik, sebenarnya selalau terbuka peluang bagi perempuan untuk menjadi salah satu kandidat dengan ketentuan yang ada dan jika direstui partai politik. Perempuan mempunyai peluang menjadi pimpinan atau kandidat gubernur Cawagub di DKI Jakarta. Tetapi faktanya dalam Pemilu pada 2012 tidak ada yang muncul dan partai politik kelihatannya tidak tertarik mendukung perempuan sebagai calon pemimpin Jakarta. Sebenarnya perempuan di Jakarta banyak yang cerdas, mandiri, dikenal dan mempunyai jejak rekam yang positif dalam wilayah politik. Mandiri. Artinya perempuan mempunyai peluang besarnya dalam politik, asalkan mereka mempunyai kekuatan politik dan finansial yang memadai, terlebih jika mereka mempunyai historis keluarga yang juga dikenal baik oleh masyarakat.

Pendapat Prof. Dr. Silvana Murni, MM., M.Si, Sekretaris pemerintahan Propinsi DKI Jakarta mendukung pandangan tersebut:

“Jika dilihat kesempatan politik berdasarkan jumlah laki-laki dan perempuan seimbang, laki-laki sedikit lebih banyak dari laki-laki, namun hak penggunaan hak pilih lebih banyak oleh perempuan. Artinya perempuan mempunyai peluang secara terbuka aktif di politik, tapi perempuan juga memiliki pilihan atau ‘*choise*’. Perempuan ini akan berhitung, perempuan dengan sifat cenderung punya sifat dia mengambil langkah-langkah dengan melihat unsur-unsur ke dalam, dia tak mau mengambil, atau rata-rata perempuan tidak mau mengambil langkah-langkah yang tak pasti. Perempuan memperhitungkan apakah langkah-langkah yang diambil menguntungkan atau memberi manfaat atau tidak. Artinya, apa ini merugikan keluarga atau tidak? Hal ini yang menjadi pertimbangan perempuan dalam mengambil sikap dalam aktif dalam politik atau tidak”.

Peluang yang besar saja tidaklah cukup bagi perempuan untuk terjun ke wilayah politik, namun perempuan enggap berspekulasi pada apa yang tidak jelas dan merugikan perempuan tidak punya sifat spekulasi yang nantinya justru akan merugikan kedepannya terutama terhadap keluarga. Ternyata perempuan mempertimbangkan tidak mau terlibat dalam politik namun dengan tekanan-tekanan yang ada, ada tidak ada manfaat. Karenanya justru saya melihat perempuan lebih cerdas untuk memilih apa langkah selanjutnya. Karena kalau ditanyakan mengapa tidak aktif di politik, karena tujuannya untuk mengabdikan pada masyarakat. Jadi, banyak peran yang bisa dimainkan oleh perempuan, dia tidak ingin bermain-main, perempuan tak ingin mengambil langkah-langkah yang merugikan masyarakat atau berada di tengah aturan-aturan yang multi persepsi. Artinya kalau sudah bekerja, perempuan cenderung tidak mau berada dalam posisi tidak nyaman di antara dua pilihan atau diarahkan oleh situasi, dia harus memilih di antara dua yang sama-sama. Jika ada di antara dua aturan atau kepentingan A dan B, maka perempuan cenderung mengikuti aturan yang ada. Jika ada peluang, dan dibuka peluang yang debatable, perempuan akan cenderung memutuskan sesuai dengan aturan. Perempuan akan memilih warna sesuai dengan aturan yang ada, misalnya jika ada aturan yang berwarna merah, maka dia akan cenderung memutuskan arah, dan tidak ada merah muda atau warna lainnya. Jadi dalam bersikap, dan mau bersungguh-sungguh tetapi ternyata ada "*money politic*", bagaimana dia akan bermain di dunia politik jika dia sendiri takut bermain-main yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

Nadia Umar menjelaskan bahwa persoalan yang paling minim dari diri perempuan adalah finansial. Namun, demikian jauh lebih mudah bagi perempuan DKI dalam politik jauh lebih banyak dibandingkan daerah-daerah lainnya. Biasa kader-kader yang dibina oleh partai politik atau dari organisasi masyarakat yang dikenal dapat menjadi kandidat. Kandidat di Jakarta yang berminat menjadi kandidat mudah menda-

patkan kandidat perempuan dibandingkan daerah-daerah lainnya. Akan tetapi yang lebih menjadi masalah adalah kemampuan finansial. Kadang-kadang juga strategi politik juga masih kurang karena perempuan tidak terlalu biasa menyatakan pendapat mereka secara terbuka.

Persaingan yang sangat kuat dalam internal partai juga menjadi penyebab minim atau tidak adanya perempuan sebagai kandidat dalam Pemilu Jakarta 2012. Pada awal-awal penyaringan calon kandidat, wacana kandidat perempuan muncul ke permukaan. Nama seperti Wanda Hamidah yang merupakan kader partai PAN dan anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta Komisi E berani menyatirkan diri akan mencalonkan sebagai kandidat gubernur dalam Pemilu Jakarta 2012. Muncul nama Hasnani yang melakukan kampanye cukup gencar melalui media ruang luar dengan *tagline* yang dipilih yaitu “Wanita Emas”. Muncul juga nama ekonom Aviliani yang digadang oleh beberapa tokoh, namun pada masa penentuan calon gubernur/wakil gubernur, semua nama tersebut menghilang seperti ditelan bumi.

Berbagai alasan muncul mengenai ketidakhadiran perempuan dalam enam pasangan Cagub/Cawagub. Banyak pihak yang mempertanyakan dan menyatakan bahwa pasangan calon yang ada tak merepresentasikan keterwakilan perempuan dalam proses Pemilu Jakarta. Secara khusus, tidak adanya nama Wanda Hamidah dikarenakan partai PAN tidak mengusung yang bersangkutan sebagai Cagub dan lebih tertarik mengusung Faisal Basri sebagai Cagub mereka. Sedangkan Hasnani juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda, demikian juga dengan Aviliani, walau yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak tertarik mencalonkan diri dalam Pemilu Jakarta 2012.

Berdasarkan realitas tersebut, maka alasan yang kuat adalah bahwa partai politik tidak percaya kepada perempuan dengan berbagai pertimbangan yang sudah jelas sebelumnya. Ketidakpercayaan ini didasarkan pada realitas bahwa perempuan dianggap belum mampu memimpin

Jakarta, dan nama-nama yang mencuat tidak cukup kuat mempunyai kekuatan tawar (*bargaining*) dengan realitas partai politik. Perempuan tidak mampu menyakinkan partai bahwa mereka bisa menjadi '*mesin uang*' bagi partai politik tempat mereka bernaung.

Berkaitan dengan pandangan tersebut, Ketua KPU Jakarta, Nadia Umar menjelaskan sebagai berikut:

“Jangankan bersaing antarpartai politik, di dalam partai politik persaingan dengan laki-laki sangat kuat. Kadang-kang calon legislatif perempuan yang dulu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mereka menceritakan bagaimana beratnya bersaing untuk mendapatkan di posisi tersinggkirkan. Bisa saja mereka lama berkiprah, tetapi karena dia perempuan dianggap tidak strategis untuk memimpin, diskriminasi itu masih ada. Bahkan sampai di Jakarta. Ketika pencalonan, kandidat yang baru kemarin sore aktif di partai politik tertentu terpilih menjadi calon dan lebih-lebih oleh partai politik, sedangkan perempuan yang sudah lama berkiprah membangun partai politik tersinggkirkan. Kader perempuan belum dihitung di DKI dan yang selalu dimunculkan sebagai *votegater* itu ialah laki-laki. Kecuali dia artris, sudah dikenal, walaupun dia sudah berkerja keras tetap saja diabaikan dan dikalahkan laki-laki. Makanya pimpinan partai laki-laki semua, pemimpin partai politik di Jakarta laki-laki semua. Padahal banyak yang sudah lama berkiprah di partai politik, namun perempuan belum dipercaya menjadi pimpinan karena beragam keterbatasan tadi, terutama keterbatasan finansial”.

Realitas yang ada dalam Pemilu 2012 tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja, diperlukan upaya khusus melalui ketentuan yang berlaku di DKI Jakarta agar keterwakilan perempuan terakomodir. Namun disayangkan DKI Jakarta tidak mempunyai aturan khusus yang mendukung keterwakilan perempuan. Ketentuan yang ada hanya berada pada tingkat pusat yaitu kebijakan *affirmative action*,

kuota 30 persen dalam kepengurusan partai dan calon legislatif. Kebijakan dalam pejabat publik di wilayah eksekutif belum ada hingga saat ini.

Menurut Nadia Umar bahwa aturan khusus tersebut tidak diperlukan dan memang tidak ada aturan di mana pun mengenai calon pemimpin dan keterwakilan perempuan. Selengkapnya pernyataan Nadia Umar:

DKI Jakarta belum ada wacana membuat kebijakan ke depan mengenai ketentuan 30 persen perempuan dalam Pemilu ke eksekutif. Untuk pusat ada aturan, legislatif juga ada, namun untuk pimpinan daerah akan ada argumen bahwa perempuan juga diterima dan banyak yang sudah mencalonkan diri dan berhasil. Ada argumen-argumen seperti. Dan menurut saya hampir tidak mungkin karena anggota DPR umumnya laki-laki, dan kalau *voting* akan kalah untuk menetapkan ketentuan bahwa setiap calon kandidat kepala daerah salah satunya harus perempuan, kemudian sangat berat persaingan yang legislatif saja sudah berat, jadi DPR-nya yang harus didorong dengan cara memberi bukti bahwa di mana wilayah-wilayah yang gubernur dan bupati dan walikotanya perempuan lebih rendah korupsinya dan bukti itu kemudian dikampanyekan kepada masyarakat, ternyata perempuan tingkat korupsinya rendah atau tidak ada kepala daerahnya perempuan menjadi tersangka. Kalau data statistik dimunculkan bisa saja mendorong wacana, kemudian akan dapat diubah setridaknya pada tahap wacana”.

Nadia Umar menjelaskan bahwasanya perempuan harus lebih kuat dan berani mencalonkan diri sebagai pimpinan kepala daerah. Perempuan yang mempunyai beberapa syarat jika hendak menjadi kandidat di DKI Jakarta, yaitu:

1. Kualitas yang baik

2. Mempunyai biaya yang cukup
3. Harus masuk partai.

Bagaimanapun kualitas kandidat menjadi sangat penting karena kualitas inilah yang akan membedakan seorang kandidat dengan kandidat lainnya. Kualitas yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan, pengalaman, *track record* (rekam jejak) dan prestasi yang baik, dan akan lebih mudah jika mempunyai dukungan dari sejarah keluarga yang juga dikenal ataupun seorang perempuan mempunyai '*katalis politik*' yang diterima oleh masyarakat. Artinya kualitas perempuan menjadi kekuatan personal perempuan untuk terjun di wilayah politik dan percaya diri atau berani mencalonkan diri sebagai kandidat serta harus siap bersaing dengan siapa pun termasuk kaum laki-laki.

Masuk Partai adalah syarat penting walaupun dalam kehidupan praktis politik di Indonesia, memungkinkan siapa saja dipinang oleh partai politik untuk menjadi calon pemimpin yang diusung oleh partai tersebut. Jadi untuk mempermudah, perempuan dianjurkan menjadi kader potensial partai politik dengan kontribusi yang jelas dan terukur. Hal itu dikarenakan semua proses politik mulai dari partai politik.

Seorang perempuan juga dituntut untuk mempunyai kekuatan finansial yang memadai. Dukungan finansial harus dibantu perempuan yang tidak punya minat politik tetapi mempunyai kemampuan finansial yang kuat/sebenarnya punya sumber daya finansial yang kuat. Sebenarnya politisi laki-laki juga mempunyai sumbangan dari pengusaha-pengusaha laki-laki. Kita banyak mengenal pengusaha perempuan, namun jika mempunyai pemimpin perempuan maka diharapkan efek terhadap kesejahteraan perempuan dan masyarakat. Dan dengan memberikan pemahaman tersebut kepada perempuan yang mempunyai minat politik namun mempunyai sumber daya, mudah-mudahan akan ada sinergi antara perempuan yang mempunyai ketokohan dalam bidang



politik dan ketokohan dalam bidang finansial/pengusaha kemudian memunculkan tokoh perempuan di kancah daerah dan nasional.

Sebagaimana pernyataan Nadia Umat selengkapnya:

“Perempuan di Jakarta tidak harus punya ketokohan politik yang baik untuk menjadi gubernur, jika tidak didukung oleh finansial yang baik. Media akan meliput hingga menjadikannya terkenal jika perempuan itu memiliki minat politik kuat. Di Jakarta ketokohan hampir tidak terlalu berfungsi, lain halnya di daerah peran ketokohan masih penting dan berperan dalam politik. Dan dia harus dikenal, dan tidak mudah untuk mem-branding karena biaya politik semakin hari semakin mahal”.

Perempuan dapat membangun ketokohan dengan menggunakan beragam saluran komunikasi karena hal itu diperlukan untuk memperkenalkan perempuan, agar mereka dikenal oleh publik dan sekaligus sebagai upaya penciptaan opini publik. Menurut Marissa Harque Fauzi setiap perempuan harus menciptakan peluang bahkan jika bisa menciptakan jaringan media yang berpihak kepada aktivitas perempuan, atau membangun media komunitas. Media menjadi sarana dan prasarana bagi aktivitas politik yang sangat menguntungkan bagi perempuan. Hal itu karena politisi harus mampu menciptakan opini publik dan image yang positif.

Selain mampu menguasai media, perempuan juga harus mempunyai strategi yang tepat. Strategi yang cepat sehingga mengetahui kekuatan dan kelemahan dapatnya apa. Artinya posisi apa dan dimana menjadi sangat penting bagi perempuan untuk mengetahui teknik pencapaian sasaran yang tepat seperti apa. Di samping itu, perempuan juga harus menciptakan kesempatan-kesempatan yang dapat mendukung penguatan kualitas diri mereka di tengah proses politik yang didominasi oleh laki-laki. Di lain pihak, jika perempuan mempunyai kualitas yang baik, sumber kekuatan finansial dan dukungan kekuatan keluarga atau pihak

lainnya akan mampu melahirkan kader politik yang kuat bahkan diminati oleh partai politik. Dengan kata lain, perempuan harus menjadi kader yang aktif dalam proses politik yang mereka lakukan.

Marissa Harque Fauzi menyatakan mengenaikan pentingnya strategi bagi proses politik bagi perempuan, sebagai berikut:

“.....dia mesti menciptakan. Dia bikin radio atau bikin komunitas atau radio komunitas. Sampai akhirnya masuk ke radio yang beneran komersil atau televisi daerah atau apa. Jadi dia harus menciptakan dengan strategi 4 langkah, wajib dimiliki ilmunya. Sehingga dia tahu posisi dia di mana. Kalo dia punya peluang sama, dia punya kekuatan, jika dikurangi dengan dia punya kelemahan dan ancaman, ternyata ada selisihnya berarti dia dalam posisi dia lumayan kuat apalagi yang mau ditambahkan, melalui teknik menciptakan kesempatan”.

Disamping itu perempuan dituntut untuk mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk mendukung proses politik yang dilakukan. Perempuan harus menjadi sosok yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Kecerdasan diperlukan agar perempuan tidak hanya menjadi pelengkap dalam proses politik karena yang paling diharapkan adalah peran aktif perempuan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa. Output yang diinginkan, bahwa keterwakilan perempuan di wilayah politik membawa manfaat sebesar-besarnya bagi khalayak. Hal itu sebagaimana juga semangat perjuangan kaum perempuan melahirkan “kebijakan sementara, kuota 30 persen”. Kebijakan kuota, membuka peluang besar bagi perempuan aktif di politik yang pada level awal dilihat dari kuantitas mereka, karena selama ini keberadaan perempuan di politik sangat minim bahkan sebagian besar wilayah Indonesia tak ada keterwakilan perempuan. Namun jumlah perempuan dalam politik yang semakin tinggi dituntut juga sumbangsih mereka bagi kesejahteraan masyarakat.

Percaya diri juga menjadi alasan perempuan untuk aktif di wilayah politik, mencalonkan diri sebagai kandidat serta tidak takut bersaing dengan siapapun. Tetapi disayangkan, kebanyakan perempuan masih belum percaya diri di wilayah politik. Kondisi mental tersebut, baik disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal diri perempuan kedua faktor tersebut ikut menyumbang ketidakpercayaan diri perempuan. Faktor internal berkaitan dengan mental subyektif mereka dan faktor eksternal adalah faktor finansial. Menariknya finansial menjadi utama karena pembiayaan ikut menentukan banyak hal dalam proses politik. Seseorang dapat timbul kepercayaan dirinya jika perempuan tersebut mempunyai 'uang yang cukup' membiayai aktivitas politik mereka. Bahkan uang yang ada mampu membuat partai politik mencalonkan perempuan tersebut. Walaupun kondisi seperti ini tidak diharapkan muncul dalam kasus perempuan.

Marissa Harque Fauzi menyatakan sebagai berikut:

“Secara umum perempuan tidak percaya diri karena mereka tak punya duit. Jadi memang sudah banyak dibicarakan selain dukungan suami, dia mampu berkompetisi terhadap kapital, dukungan dari Parpol semua, polibriti dan semua. Perempuan itu mesti jadi doktor, itu *interpersonal communication* aja. Jadi, kita bertausia berta'lim untuk mengajak mereka, *back to school*, dengan kita jadi doktor yang *respect*, orang tidak akan mengatakan kita bodoh dan minimal orang percaya kita punya otak, hanya itu, dan uang akan datang sebagai sponsor. Seperti ibu Sri Mulyani, uangnya dari sponsornya, karena dia bukan dari keluarga yang kaya. Ia punya gaji besar dari BI tapi dia bukan pencuri, awalnya. Tapi dia bisa mendatangkan, dia bisa menciptakan kesempatan itu, kenapa?”.

Lebih lanjut menurut Marissa, perempuan sangat pantas menjadi pemimpin Jakarta. Namun tuntutan perempuan dengan kualitas tertentu diperlukan untuk mampu memimpin Jakarta yang sangat kom-

pleks. Jakarta adalah kota dengan beragam persoalan, suku, etnis, kepentingan, dan juga konflik di dalamnya. Oleh karenanya perempuan yang hendak mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta haruslah orang-orang yang mempunyai kekuatan yang jelas sehingga kehadiran perempuan bermanfaat bagi masyarakat. Diperlukan beberapa hal bagi perempuan untuk layak menjadi pemimpin DKI Jakarta yaitu:

1. *Punyailmu,*
2. *Populis,*
3. *Kekuatan Finansial (uang)*
4. *Dukungan Partai Politik*

Aktivitas politik bukanlah aktivitas sederhana, melainkan aktivitas yang membutuhkan energi yang besar. Politik adalah aktivitas yang berkaitan dengan sistem demokrasi suatu negara. Oleh karena dituntut keseriusan dalam aktivitas politik. Berbicara mengenai sistem yang mendasari proses politik, artinya terdapat beragam aturan yang jelas dalam proses politik. Salah satu aturan yang sering menjadi perhatian adalah kewajiban partai politik melakukan kaderisasi agar partai politik tersebut mempunyai kader yang dihasilkan melalui proses yang bertanggung jawab, bukan hanya berpolitik sekedar aktivitas batu loncatan, atau siapa saja selama punya uang dapat menjadi kader politik walau yang bersangkutan tidak melampaui proses kaderisasi di partai politik.

Kaderisasi berkaitan juga dengan etika politik yang menegaskan bahwa semua hal harus melalui proses yang bertanggung jawab dan adil bagi setiap kader. Proses kaderisasi juga merupakan masa di mana kader-kader partai belajar untuk terjun di tengah masyarakat dengan segala persoalan di dalamnya. Kaderisasi sekaligus wahana untuk kader-kader partai belajar menerapkan strategi komunikasi dan politik yang tepat bagi khalayak atau masyarakat. Artinya kaderisasi menjadi landasan

bagi pembentukan calon pemimpin. Walaupun seseorang dapat saja mempunyai pengalaman bermasyarakat pada organisasi apapun, namun proses kaderisasi menjelaskan secara tegas berkaitan dengan dedikasi, loyalitas dan integritas seseorang terhadap partai politik, masyarakat dan program yang mereka canangkan.

Perempuan sebenarnya berani berpolitik, namun perempuan memilih apakah kehadiratan mereka dalam politik memberi kontribusi yang jelas atau tidak bagi masyarakat. Prof. Dr. Sylviana Murni, M.Si menyatakan bahwa:

“Perempuan tidak mau berkuasa dan jika mereka tidak aktif di politik seperti tidak ada perempuan dalam pilkada Jakarta 2012 karena persoalan ‘pilihan’ saja. Perempuan menentukan aktivitas apa yang mereka suka. Perempuan tidak takut tekanan namun takut dengan kemanfaatan dia di tengah masyarakat dari kepemimpinannya. Ketika perempuan menjadi seorang yang menentukan lahirnya kebijakan, pemangku kepentingan, kemudian dia merasa bahwa kebijakan tersebut tak membawa manfaat bagi banyak orang, perempuan akan lebih mempertimbangkan lagi, bisa dikatakan bahwa perempuan tersebut tidak akan mau, dia akan lebih berpikir lagi”.

Berdasarkan pandangan Sylviana Murni, perempuan lebih mempertimbangkan manfaat dari pada kekuasaan. Walaupun sebenarnya mereka sanggup bersaing dan memperoleh kekuasaan dalam politik seperti Magawati Soekarnoputri yang berani bersikap dengan tegas kepada pihak lain termasuk keluarga dan suaminya. Perempuan yang mempunyai potensi yang luar biasa akan berani bersikap, dan perempuan seperti inilah yang cocok sebagai pemimpin. Kekuasaan yang dimiliki perempuan karena potensi mereka diharapkan akan lebih banyak membangun kekuatan bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan saat ini yang bersangkutan adalah sekretaris bidang pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Peran tersebut memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi Sylviana Murni

untuk melakukan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Hal itu karena yang bersangkutan dapat berperan serta dalam proses pembuatan konsep-konsep kebijakan khususnya dalam bidang pemerintahan. Artinya kehadiran beliau tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jakarta, tanpa harus mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur. Selengkapnya pendapat Silvyana Murni sebagai berikut:

“Saya tak ingin mengelah bahwa perempuan itu takut dengan *pressure*. Kalau tekanan itu lebih bermanfaat bagi banyak orang, perempuan tidak pernah takut, perempuan lebih berani mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi banyak orang. Dia akan lebih takut mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan kegelintir orang, karena jika hanya mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan kekelompok orang, individu tertentu, artinya dia akan takut merusak harga dirinya, merusak martabat keluarganya dan ketiga: tidak ada manfaat kebijakan tersebut. Itu yang dia lebih takutkan, tidak punya manfaat bagi banyak orang.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, perempuan Jakarta adalah pribadi-pribadi yang mandiri dan cerdas. Hal itu ditandai dengan pilihan-pilihan mereka dalam menyikapi hidup, mereka memilih secara cerdas apa yang mereka inginkan dan perbuat. Perempuan secara bebas menentukan dan melakukan pilihan (*choice*) mereka dan memaknai hidup secara rasional, bukan secara emosional. Jika secara emosional mereka hanya ingin popularitas, disanjung, namun lebih karena pertimbangan manfaat atau tidak. Karena jika perempuan Jakarta cenderung emosional mereka sudah sangat banyak yang mencalonkan diri sebagai gubernur/wakil gubernur kemandirian perempuan Jakarta yang merupakan produk dari pendidikan yang juga tinggi dalam Pilkada 2012. Hal itu berarti, mereka secara independen memilih apa yang mereka inginkan dan melakukan apa yang mereka pilih secara bertanggung jawab.

Paparan di atas artinya perempuan bisa dan mampu menjadi pimpinan DKI Jakarta atau daerah lainnya. Dalam proses itu ada persoalan yang harus terus dipupuk yaitu belajar; belajar dari alam, belajar secara formal, belajar pada masyarakat dan realitas atau komponen-komponen lainnya. Bagaimanapun, perempuan harus mempunyai dan menguasai ilmu yang memadai karena dengan penguasaan ilmu akan sangat membantu kepemimpinan mereka. Artinya perempuan harus selalu belajar kembali tanpa kecuali. Peningkatan kualitas diperoleh dengan sekolah kembali. Marissa Harque Fauzi menjelaskan bahwa perempuan harus peka dengan lingkungan mereka. Pemimpin mampu membaca situasi dan mencari pemecahan masalah bagi masyarakat.

Pendapat Marissa Harque Fauzi selengkapnya:

“Perempuan harus bisa *iqra'*, *iqra'* itu kan minimal swotlah, analisis swot ataupun tahu posisi. Waktu itu aku tahu posisiku dan hatiku memang waktu itu tidak ber-PDIP, karena hantu islam buat PDIP yang agak kekiri-kirian. Perempuan itu mesti jadi doktor, itu *interpersonal communication* aja. Jadi kita bertaushiah bertal'lim untuk mengajak mereka, *back to school*, dengan kita jadi doctor yang respect, orang tak akan mengatakan kita bodoh, minimal orang percaya kita punya otak, hanya itu, dan uang akan datang sebagai sponsor. Kaya bu Sri Mulyani, uangnya dari sponsornya, melawan karena dia bukan dari keluarga yang kaya. Ialah dia punya gaji besar dari BI tapi diakan bukan pencuri, awalnya. Tapi dia bisa mendatangkan, dia bisa menciptakan kesempatan itu, kenapa? Karena dia pintar dan terjamin otaknya.

Diperlukan upaya yang sangat serius dan secara bersama-sama agar mampu memunculkan kekuatan yang mapan yang mempermudah perjuangan. Perjuangan '*tirani dan marjinalisasi*' akan lebih mudah diperjuangkan secara bersama-sama. Kekuatan perempuan harus digalang memperjuangkan isu yang sama sehingga perlawanan tersebut mem-

punyai arah yang sama bagi semua perempuan dalam perjuangan tersebut. Dalam bahasa Gramsci, perjuangan bersama adalah '*Collective will*', yaitu kebersamaan perjuangan dengan isu yang sama akan memperkuat perjuangan yang dilakukan.

Dalam bahasa Gramsci, kelompok subordinat, dalam hal ini gerakan perempuan, harus memiliki '*authonomy dan independent*' yaitu kedewasaan dan kemandirian ideologi dan politik, sehingga dapat menggerakkan ide-ide bersama melalui aliansi dengan kelompok subordinat lainnya, dan aliansi ini menumbuhkan apa yang dinamakan Gramsci sebagai '*Collective Will*'. (Stillo; Antonio Gramsci, <http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm>, 1998-1999:1-15). Perjuangan dalam menggolkan perempuan harus didukung oleh kaum perempuan dan kaum perempuan sekaligus harus bisa menciptakan kekuatan dari dukungan-dukungan kelompok lainnya di tengah masyarakat. Perempuan harus bersatu dalam perjuangan dan menjadikan isu perjuangan sebagai isu bersama bukan hanya perjuangan perempuan.

*Collective will* sangat diperlukan untuk merebut kesempatan dengan melihat kondisi yang sedang '*in*' pada saat itu. Dan isu pentingnya kuota berdasarkan rekomendasi Konferensi Perempuan di Beijing pada tahun 1995 yang menyetujui perjuangan peningkatan jumlah perempuan di legislatif, salah satu cara yang harus dilakukan ialah membangun kebersamaan (*Collective Will*) untuk melakukan perubahan, memperkuat kerjasama jaringan antar organisasi perempuan serta lembaga-lembaga lain yang terkait yang sangat diperlukan untuk mempermudah perjuangan. Kerjasama antara jaringan akan membentuk kesamaan kebutuhan dan persepsi positif tentang pentingnya keterwakilan perempuan yang proporsional dengan jumlah perempuan di birokrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai pimpinan.

Perempuan harus secara bersama sama keluar dari tekanan atau situasi yang tidak mendukung mereka selama ini dalam politik. Dalam



Pemilu DKI Jakarta tidak adanya perempuan dapat dikatakan sebagai sebuah tekanan terhadap perempuan oleh karenanya harus ada upaya yang sangat serius dari semua pihak terutama kaum perempuan dan juga kelompok masyarakat dalam perjuangan tersebut. Feminis Radikal sebagaimana dijelaskan Littlejohn (1996: 234), percaya bahwa tekanan atas perempuan adalah masalah inti yang melingkupi kehidupan mereka sepanjang pengalaman hidup mereka, baik di wilayah domestik maupun publik. Perubahan harus segera dilakukan dengan perdebatan terbuka guna menggugat ketidakadilan tersebut di segala bidang, terutama bidang politik, dan bukan hanya perubahan hukum untuk memberikan kesamaan hak pada perempuan tetapi juga pada struktur sosial yaitu sistem patriarkhal. Artinya perjuangan perempuan masih sangat panjang dan berat, diperlukan energi yang besar dan konstineu untuk membuat perjuangan perempuan DKI Jakarta mampu menjadi pemimpin Jakarta.

Dalam pemahaman feminis radikal, perempuan mengalami tekanan dari beragam aturan masyarakat didasarkan atas konstruksi realitas yang mengandung nilai marginalisasi pengalaman perempuan. Teori ini menyatakan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang ada yang dikonstruksi oleh laki-laki. Keadaan itu didukung sepenuhnya oleh struktur sosial, budaya, politik bahkan negara dan dilakukan oleh kelompok elit pada tataran individual, tataran kelompok sosial maupun politik dan juga dengan sistematis telah dilakukan oleh negara. Maka untuk merubahnya harus dilakukan redefinisi terhadap pemahaman yang selama ini tidak berpihak pada perempuan.

Sara Mills dalam bukunya *Language and Gender* (1995: 39), menyatakan bahwa bahasa yang *sexies* telah terlalu menggeneralisasikan realitas perempuan dan laki-laki, seperti memahami perempuan dengan *stereotype* tertentu, yaitu laki-laki kompetitif sedangkan perempuan cenderung kooperatif. Deborah Cameron (1994: 5), menyatakan bahwa bahasa adalah media representasi dan karenanya tidak mengejutkan jika bersifat

*sexies* dalam berbagai penggunaan konvensional. Hal ini telah terjadi dan dialami perempuan yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan sosial mereka.

Realitas perempuan yang buruk diperkuat oleh representasi melalui media massa. Media massa membahasakan perempuan dalam kategori-kategori yang justru semakin mengekalkan subordinasi mereka dari dominasi perempuan. Kekuasaan yang dimiliki media mampu mengarahkan dan membujuk bagaimana laki-laki memperlakukan perempuan, bahkan bagaimana perempuan memahami diri mereka sendiri. Media yang cenderung dikuasai oleh dominasi laki-laki mampu menciptakan makna yang juga dipengaruhi oleh kekuatan ideologi dan pemahaman laki-laki berdasarkan struktur sosial sistem patriarki.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka feminis radikal menurut Liesbet van Zoonen (1992: 37), menyarankan agar perempuan dapat keluar dari dominasi pencitraan yang dilakukan laki-laki, serta harus menciptakan pemahaman komunikasi sendiri sehingga perempuan dapat memiliki ideologi pemahaman sendiri atas realitas dan mempengaruhi kehidupan sosial tentang realitas perempuan. Hal ini setidaknya perempuan telah menciptakan alternatif ideologi dan pemahaman tentang diri mereka untuk mengcounter pemahaman berdasarkan sistem patriarkhal yang selama ini sangat merugikan perempuan.

## **C. Dukungan partai politik dan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Perempuan Dalam Politik**

Dalam sistem politik Indonesia, partai politik adalah lembaga yang mempunyai hak veto atas realitas politik kader-kader partai dalam proses seleksi mencalonkan diri sebagai pemimpin DKI Jakarta. Partai politik berkuasa penuh dalam proses seleksi terhadap calon kandidat baik legislatif maupun eksekutif. Artinya hampir tidak mungkin seorang kader

atau masyarakat dapat lolos sebagai kandidat politik jika tidak memperoleh restu dari partai politik.

Kekuatan dan peluang kaum perempuan harus didukung oleh berbagai pihak seperti keluarga, masyarakat, dan khususnya dukungan partai politik. Perempuan adalah salah satu *stakeholder* bangsa ini, karenanya sangat patut dan rasional aktivitas politik dan publik mereka yang selama ini sudah tertinggal jauh dari salah satu pihak memperoleh dukungan baik pada tataran perundang-undangan maupun pada tataran sosial kemasyarakatan. Bagaimanapun realitas sosial budaya berimplikasi kuat dalam wilayah politik yang kemudian secara integral menentukan realitas politik perempuan.

Aktivitas perempuan di wilayah politik harus memperoleh dukungan dari pihak-pihak di luar diri perempuan terutama partai politik diamini oleh Nurul Arifin, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dan Pengurus Partai Golkar, yaitu:

“Pertama, menjadi calon harus ada kekuatan serta dukungan politik dan ekonomi. Saya rasa biasanya perempuan tak kuat dukungan politik apalagi kekuatan ekonomi, kalau kekuatan sosial perempuan sudah banyak yang mempunyai kekuatan. Misalnya beberapa tokoh perempuan yang sudah mempunyai kekuatan sosial, memunculkan wacana untuk menjadi kandidat; ada Wanda Hamidah dan lain-lain. Artinya seseorang boleh saja populer, sebagai modal personal yang dimiliki, tapi kekuatan politik acapkali tidak kuat di partainya, hal tersebut sangat tergantung seberapa besar dia mempengaruhi partainya, bagaimana kekuatan perempuan dalam menghegemoni partai dan berapa banyak perempuan sanggup mendukung pembiayaan partainya. Biasanya perempuan lemah dalam soal ekonomi, karena seperti saya juga lemah dalam soal ekonomi: tidak memiliki bisnis, kita hanya pekerja politik saja”.

Aktivitas politik kaum perempuan walau sudah didukung oleh undang-undang partai politik dan undang-undang Pemilu yang menganjurkan keterwakilan perempuan didukung oleh partai politik berdasarkan kebijakan “*affirmative action*, kuota 30 persen”, akan tetapi kenyataannya persoalan berkaitan dengan aktivitas politik perempuan tetap kuat meliputi politik praktis kaum perempuan. Kebijakan tersebut tetap tidak mudah dijalankan pada awalnya karena munculnya pro dan kontra baik dalam kehidupan sosial budaya maupun politik. Tidak semua lapisan masyarakat menerima ketentuan tersebut. Dalam wilayah politik juga banyak yang kurang bahkan tidak sepakat dengan ketentuan kuota 30 persen.

Peluang besar kaum perempuan dalam politik sangat ditentukan oleh partai politik. Partai politik merupakan institusi resmi berdasarkan perundang-undangan politik Indonesia. Realitas itu dipandang banyak merugikan perempuan karena dominasi kader dan kepengurusan partai politik oleh kaum laki-laki. Di samping itu, kader-kader partai banyak kaum laki-laki dari pada perempuan. Kondisi tersebut dikarenakan proses kaderisasi yang tidak berjalan dengan baik pada tubuh partai. Penyebab lainnya adalah jumlah perempuan yang tertarik dan aktif di wilayah politik, masih sedikit sehingga tidak mungkin bersaing secara fair dengan laki-laki yang selama ini menguasai realitas politik.

Banyak alasan yang membuat partai politik masih enggan mendukung aktivitas politik perempuan. Pengalaman politik perempuan yang masih kurang lama dibandingkan kaum laki-laki menjadikan pembuktian kepada masyarakat juga terbatas. Hal itu yang memunculkan persepsi sebagian pihak bahwa perempuan masih kurang bisa dan tidak tangguh berpolitik. Padahal aktivitas politik merupakan aktivitas yang sangat melelahkan, penuh persaingan dan menuntut kecepatan dan strategi serta taktis yang tepat dengan realitas sosial politik yang ada saat itu.

Persepsi negatif berkaitan dengan kualitas perempuan di wilayah politik membuka kesempatan yang sama dengan laki-laki. Peluang perempuan yang besar dalam politik dapat dimanfaatkan oleh perempuan atau tidak, akan tetapi peluang tersebut merupakan 'modal' bagi perempuan untuk melakukan aktivitas politik semaksimal mungkin. Namun kenyataannya masih cenderung banyak pertimbangan dalam bersikap, walaupun ada saja kasus yang sudah bisa bersikap dan berpikir dengan cara yang sama dengan kaum laki-laki atas pertimbangan agar diterima oleh lingkungan mereka.

Pemahaman yang juga cukup merugikan perempuan adalah bahwa perempuan itu makhluk yang lemah dan tidak gesit. Perempuan banyak dilekatnya pada pemahaman menurut konstruksi sosial budaya terhadap kualitas perempuan. Dalam kajian gender pada tataran *nurture* atau konstruksi sosial, perempuan merupakan makhluk kelas dua, makhluk yang secara sosial budaya bahkan agama menempati posisi kedua dibandingkan laki-laki. Perempuan mengalami penistaan dan diskriminasi secara sosial budaya. Pembagian kerja secara seksual dilekatkan bagi perempuan dengan peran-peran khusus dalam wilayah privat. Perempuan lebih dipahami sebagai pendamping dan pendorong kaum laki-laki, karena keterbatasan ruang gerak perempuan. Pemahaman inilah yang merugikan aktivitas perempuan.

Pemahaman yang acapkali dilekatkan pada perempuan itulah yang memunculkan persepsi dan menimbulkan sikap serta perilaku negatif terhadap perempuan. Di samping perempuan dianggap kurang berkualitas di wilayah publik, umumnya lebih banyak diam dalam beragam forum kemasyarakatan dan memilih menerima apa yang diputuskan bagi diri mereka. Perempuan juga dipandang kurang mempunyai kekuatan finansial. Kekuatan finansial merupakan syarat utama dalam pembiayaan politik. Tanpa kekuatan finansial maka aktivitas politik dalam pembiayaan beragam kegiatan partai politik dan kader partai akan

terhambat. Hampir semua kegiatan partai politik dan kader partai membutuhkan dukungan finansial. Oleh karena itu kekuatan finansial menjadi prasyarat utama bagi perempuan yang hendak aktif di politik.

Dalam kasus pencalonan kandidat Gubernur dan Cawagub propinsi DKI Jakarta 2012 dapat terlaksana juga harus jelas dukungan finansialnya. Semua proses kampanye, pembentukan opini publik, sosialisasi, marketing politik dan lain-lain tidak mungkin dilaksanakan tanpa dukungan finansial. Dukungan finansial juga dibutuhkan oleh partai politik, karenanya kader-kader partai harus menjadi pihak yang mampu mendukung pembiayaan operasional partai. Pertimbangan ini salah satunya yang menyebabkan, perempuan sering tidak dipercaya oleh partai politik mampu menghasilkan banyak dana dikarenakan alasan-alasan di atas, yang mana umumnya perempuan masih banyak yang tak tegaan, berpikir panjang dan lebih memilih tak menggunakan kesempatan yang ada untuk mengumpulkan dana politik. Walau sekarang ini, sebagian politisi perempuan berperilaku sama saja dengan perilaku politisi laki-laki, yaitu menggunakan kesempatan mengumpulkan uang dengan berbagai cara dan tipu muslihat agar tetap diterima oleh lingkungan politik laki-laki. Rencananya akan dilaksanakan penelitian selanjutnya mengenai kasus ini.

Fenomena yang melingkupi perempuan dan berimplikasi pada aktivitas politik perempuan selama ini. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpercayaan partai politik terhadap perempuan, dan sekaligus menyebabkan *power* (kekuatan) perempuan dalam politik juga berkurang. Kehadiran perempuan dalam politik sering dipandang 'sebelah mata dan tidak cukup layak' sehingga hal itu berakibat pada kekuatan '*bargaining*' kaum perempuan dengan kaum laki-laki dalam aktivitas politik.

Pernyataan Nurul Arifin mengamini partai politik yang cenderung tidak percaya pada perempuan sebagai kandidat, sebagai berikut:

“Karena menurut partai politik, perempuan itu kurang kuat dan tidak tangguh, sebetulnya kesempatan untuk melakukan banyak hal sama dengan laki-laki. Namun perempuan banyak berpikir, dan tidak tegaan. Padahal peluang/kesempatannya sama dengan laki-laki, jika kesempatannya sama dan langsung mengambil kesempatan itu tanpa berpikir dua kali. Perempuan berpikirnya terlalu banyak, takut ini dan itu, akhirnya sifat itu menjadi kekuarangan di mata laki-laki. Artinya dari segi kesempatan memperoleh dana sama dengan laki-laki, namun perempuan tidak melakukan itu. Di samping penilaian laki-laki bahwa perempuan *kurang taft, kurang bisa akar, kurang tegaan*, kala kita bisa tega, bisa saja, kecuali perempuan sudah punya kekuatan ekonomi yang kuat kita bisa *bargaining* dan menekan yang lain-lain”.

Apapun kondisi yang dihadapi, perempuan diharapkan tetap semangat untuk berpartisipasi aktif dalam politik, tidak saja sebagai pemilih, melainkan yang lebih penting adalah menjadi bagian dari pembuat kebijakan dalam politik. Dengan kondisi tersebut, perempuan yang dapat menjadi pemimpin yang cocok untuk DKI Jakarta dan sekaligus sebagai kekuatan dan pemimpin yang baik dapat menghasilkan dukungan semua lapisan masyarakat, aktivitas perempuan itu sendiri dan dukungan secara serius dan kontinue dari partai politik.

Untuk menjadi politisi yang berkualitas tentu saja diperlukan proses pembelajaran mengenai aktivitas politik yang sedang berlangsung. Perempuan juga harus mau terus menerus belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam wilayah politik sehingga mereka mampu mnejalankan tugas dengan baik. Proses pembelajaran juga merupakan upaya untuk mampu melihat perkembangan politik, negara dan masyarakat sekarang ini. Hal itu dapat memunculkan kepercayaan diri perempuan agar mampu tampil meyakinkan dan tahu apa yang dilaksanakan.

Kenyataannya saat ini ada perempuan yang menyatakan diri bahwa mereka tertarik dengan politik. Namun tidak jarang kaum perempuan juga memperoleh kendala dari beragam sumber dan sektor. Beberapa sektor yang dapat menghambat aktivitas politik perempuan seperti menghilangkan proses pembelajaran karena mereka mempunyai kekuatan finansial dan berasal dari keluarga yang mempunyai pengaruh dalam politik. Pada dasarnya perempuan mempunyai kemampuan dan pantas menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta 2012. Persoalannya yang melingkupi perempuan sehingga mereka tidak mencalonkan diri sebagai kandidat dan kondisi perempuan itu sendiri sangat mempengaruhi aktivitas politik perempuan jika dilakukan penjangkaran oleh partai politik secara terbuka akan muncul perempuan yang dapat menjadi kandidat pemimpin untuk DKI Jakarta 2012 yang lalu.

Beberapa faktor yang menyebabkan perempuan memilih untuk tidak mencalonkan diri adalah:

1. Faktor internal yaitu faktor-faktor penghambat yang berasal dari dalam diri dan lingkungan terdekat. Perempuan kurang percaya diri atau mental, terikat dengan persoalan keluarga, tidak diijinkan oleh suaminya, mau tidak mau, suka tidak suka faktor internal.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor penghambat yang berasal dari luar diri perempuan yaitu nilai-nilai sosial budaya dan partai politik yang masih belum percaya kepada kecerdasan politik perempuan.

Dari dua faktor yang menjadi penyebab tidak adanya perempuan dalam Pemilu Jakarta 2012, maka faktor internal merupakan faktor yang sangat dominan seperti tidak percaya diri dan lingkungan keluarga termasuk 'ketaatan' terhadap suami atau perempuan memilih 'mengalah' atau menunda aktivitas di wilayah publik mereka dan memberikan ruang tersebut seluas-luasnya bagi suami mereka. Namun demikian, bukan berarti faktor sosial tidak berperan penting. Suka tidak suka, penghambat



utama eksternal adalah bagi perempuan karena *judgment sosial*. Penilaian sosial yang didasarkan pada kepentingan sosial inilah yang juga banyak menyumbang bagi minimnya perempuan dalam politik, walau menurut Silviana Murni kondisi tersebut lebih karena persoalan pilihan (*choice*) semata. Kaum perempuan dapat saja memilih berpolitik karena dukungan dan peluang yang sudah terbuka. Namun, mereka juga mempunyai hak untuk memilih tidak terjun ke politik dengan berbagai alasan yang menguatkan pilihan perempuan. Artinya sama sekali tidak ada masalah berpolitik atau tidak. Sebesar apapun kesempatan tergantung pada perempuan untuk menggunakannya atau tidak, itu hak perempuan sepenuhnya dan tidak ada seorangpun yang berhak untuk menilai apalagi menyalahkan pilihan tersebut.

Nurul Arifin memperkuat pemahaman tersebut pernyataan sebagai berikut:

“Juga suami-suami yang tak rela jika istrinya lebih maju dan berani. Banyak acuan dalam menilai gerak dan aktivitas perempuan termasuk dalam politik, artinya hambatan internal itu tidak dikonsumsi publik tetapi menjadi persoalan bagi dirinya. Saya kira kenapa banyak perempuan hebat tidak muncul, saya kira mereka lebih memilih mengurus hal-hal bersifat internal dan mungkin masalah tenggang rasa dengan pasangan”.

Kebebasan perempuan memilih aktivitas yang mereka inginkan bukan persoalan yang menjadi perdebatan dalam politik. Kebebasan itu dilindungi oleh undang-undang bagi setiap warga negaranya. Persoalan pilihan saja perempuan kemudian tidak muncul dipahami berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan mereka berhak memilih apa yang nyaman dan ‘sehat’ bagi mereka. Namun pilihan ‘nyaman’ tersebut jika diekspansi merupakan pilihan-pilihan yang diakibatkan oleh hambatan-hambatan internal. Pilihan perempuan yang mempunyai sifat lebih cenderung

pada nilai-nilai keluarga dipercaya tidak mungkin dilepaskan dari pertimbangan kepentingan lingkungan terdekat yaitu keluarga.

Nurul Arifin, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar menyatakan pandangannya mengenai kendala internal yang dialami perempuan dan menghambat aktivitas politik mereka, sebagaimana berikut ini:

“Kita tidak mempertimbangkan orang-orang di sekitar kita, itu bisa juga membuat kita tidak memilih sebuah aktivitas”.

Kondisi perempuan yang tidak nyaman dalam wilayah politik ternyata cukup menghambat partisipasi mereka di wilayah politik. Tetapi seperti apapun kondisi yang ada, peningkatan partisipasi perempuan harus diperjuangkan sehingga semakin hari semakin kecil diskriminasi politik yang mungkin dialami perempuan. Artinya harus ada upaya yang keras dari kaum perempuan dan didukung oleh semua pihak agar perempuan harus keluar dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Ketidaknyamanan kaum perempuan sebetulnya dapat saja diubah agar partisipasi dalam politik dapat terus berkurang dan hilang.

Perempuan harus membangun keberanian untuk aktif semaksimal mungkin dalam politik. Perempuan harus melakukan pilihan secara bijak agar perempuan menjadi bagian dari politik praktis yang melahikan kesejahteraan bagi masyarakat. Asumsi dasar perjuangan dan kebijakan *affirmative action*, kuota 30 persen adalah menumbuhkan kesadaran dan kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan berpartisipasi dalam politik karena semakin besar jumlah perempuan dalam politik diharapkan semakin besar pula dapat mempengaruhi kebijakan.

Perjuangan harus tetap dilakukan karena hasil yang ada sekarang baru langkah awal. Perjuangan tersebut tidak boleh berhenti dengan lahirnya keberanian untuk memilih aktivitas politik sebagai tujuan aktivitas sehari-hari mereka. Perempuan tidak hanya meleakaukan aktivitas

untuk kepentingan personal mereka, melainkan juga sangat diharapkan tertarik memperjuangkan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat dan bangsa.

Peran aktif perempuan dalam politik sekarang ini adalah sebuah kemestian, karena hal itu merupakan amanah konstitusi dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Akan tetapi bagaimanapun perempuan sebagai individu tetap mempunyai hak untuk memilih apa yang mereka inginkan. Jadi kebutuhan terhadap politisi perempuan harus dipenuhi, tanpa menyebabkan persoalan baru bagi keseimbangan perempuan itu sendiri. Artinya mereka tetap mempunyai hak memilih aktivitas yang paling nyaman bagi mereka dengan mempertimbangan kebutuhan real perempuan dan lingkungan terdekat mereka sehingga ke depannya pilihan tersebut dapat mensejahterakan diri perempuan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Selengkapnya pernyataan Nurul Arifin:

“Pilihan itu lakukan bersama-sama, egaliter itu harus dilakukan perempuan yang semakin tinggi diharapkan tidak menyebabkan masalah dan dimulai dari rumah. Secara naluri kita tidak mungkin mengorbankan keluarga untuk mengurus Jakarta, apakah anda mau bercerai hanya demi mengurus politik, oleh karena itu *support* dari rumah penting. Keputusan bersama sangat penting yang akan membuat perempuan bisa melangkah dengan sangat baik dan nyaman dalam aktivitas politik. Sangat mungkin jika situasi tidak nyaman, ada kemungkinan salah satu akan mencari jatidirinya kemudian bisa jadi dapat menimbulkan perpisahan atau konflik di tengah keluarga”.

Nadia Umar, Ketua KPU Jakarta menyatakan bahwa Solusi yang dapat diupayakan ke depannya untuk memunculkan kandidat perempuan pemimpin DKI Jakarta adalah dengan melibatkan semua pihak dan golongan ikut mendukung perjuangan yang dilakukan. Dukungan

semua pihak ini sangat diperlukan karena walau isu yang diperjuangkan adalah isu dan persoalan perempuan, namun sebenarnya perjuangan tersebut bukan hanya untuk pemberdayaan kaum perempuan, melainkan juga upaya serius dalam proses memunculkan kesadaran masyarakat sekaligus berimplikasi pada kualitas bangsa, negara, dan sistem demokrasi Indonesia. Hal itu karena sesungguhnya kaum perempuan menyadari bahwa perjuangan tersebut tidak mudah dan dapat dicapai dalam waktu yang cepat.

Perjuangan peningkatan kesadaran bagi semua pihak khususnya perempuan membutuhkan dukungan semua pihak, tidak hanya antara perempuan, melainkan juga dukungan kaum laki-laki. Perempuan harus mengupayakan isu dan persoalan tersebut menjadi masalah bersama yang harus diperjuangkan oleh semua anak bangsa tanpa terkecuali. Di tengah beragam isu dan persoalan bangsa lainnya yang juga sangat mendesak untuk diselesaikan. Salah satu strategi yang harus digunakan adalah menimbulkan kesadaran dari kaum laki-laki yang selama ini merupakan kelompok masyarakat dominan.

Dukungan pihak lain yang harus diupayakan adalah dukungan dari pihak media massa. Media massa dan *new media* merupakan sarana transformasi informasi dalam berbagai bentuk yang sangat berpengaruh. Media massa mampu menjangkau khalayak dalam waktu bersamaan dan dalam jumlah khalayak yang banyak juga dalam waktu serentak. Kekuatan media massa dan *new media* saat ini hampir tidak ada media dan saluran komunikasi politik lainnya yang mampu melawan dalam dunia global saat ini.

Isu dan perjuangan kebijakan *affirmative action*, 30 persen kuota untuk mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di wilayah politik. Media hampir tidak terpisahkan dari proses politik dan demikian juga sebaliknya aktivitas politik semakin gegap gempit karena media massa. Ketergantungan kedua elemen tersebut yaitu politik dan media massa

satu sama lain saling membutuhkan terlebih dalam era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sekarang ini.

Selengkapnya pandangan Nadia Umar mengenai pentingnya media massa dan politik, sebagai berikut:

“Media harus dimainkan. Promosi termurah saat perempuan tampil beda dan diekspos oleh media. Hal itu kadang menjadi daya tarik partai politik untuk merekrut. Jadi kalau di Indonesia, Partai Politik punya kecenderungan untuk yang lebih suka merekrut yang sudah dikenal, supaya menjadi vote gater, jika yang baik, punya potensi alangkah baik jika diajak perempuan tersebut menjadi anggota partai dan mendorong Parpol untuk merekrut dia, atau kader yang sudah ada di partai dididik dan diperkenalkan secara terencana. Karena tak mudah masuk partai politik terutama yang mempunyai potensi suara tinggi, kecuali partai politik baru. Masuk ke partai politik besar misalnya Partai Golkar, PPP, dan tidak mudah kemudian mencalonkan diri. Oleh karenanya harus ada proses kaderisasi dari partai politik, mendidik perempuan karena hal itu diperlukan dan diamanatkan oleh undang-undang, yaitu keterwakilan perempuan 30 persen. Kesadaran partai itu harus diubah. Mereka harus mengkader perempuan sehingga kader-kader perempuan yang dicalonkan berkualitas bukan hanya sekedar memenuhi ketentuan semata. Jangan asal ada perempuan sehingga menentukan kandidat yang tidak berkualitas”.

Satu segi ketentuan *affirmative action*, kuota 30 persen membuka peluang yang luas kepada perempuan untuk aktif di politik. Namun pada sisi lainnya masih agak sulit mencari perempuan-perempuan yang mempunyai kualitas dan kecerdasan yang memadai agar tertarik aktif di wilayah politik. Selama ini muncul senyalemen bahwa perempuan-perempuan yang berkualitas seperti para aktivis, pengusaha perempuan dan ilmuwan cenderung menyatakan bahwa mereka tidak tertarik (malas) berpolitik. Para perempuan ini lebih tertarik untuk melakukan hal-hal

di luar politik yang lebih menguntungkan dan pasti dibandingkan terjun ke politik yang belum jelas dan juga banyak kontroversinya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan politisi dan kader perempuan di politik maka tetap harus dimunculkan perempuan, karena pada dasarnya sistem demokrasi sudah sangat bagus dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Namun sistem yang bagus tersebut cuma tidak diterapkan pada waktu yang tepat. Sistem demokrasi Indonesia yang berubah dari sistem masa orde baru membutuhkan kesiapan publik sehingga publik siap dengan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan baru. Artinya ada proses sosial politik yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara umum. Hal itu menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan ideal dengan kekuatan praktis. Kesiapan publik harus dihitung dengan cermat agar mampu menciptakan masyarakat bangsa yang mempunyai kesadaran berpolitik yang baik.

Nurul Arifin menjelaskan mengenai sistem politik yang menyebabkan masyarakat termasuk perempuan sebenarnya belum siap dengan perubahan yang serba instant ini, selengkapnya pernyataan tersebut di bawah ini:

“Namun selama ini disayangkan, bahwa kebijakan berkaitan dengan perubahan sistem politik yang dilakukan secara buru-buru (grasak grusuk) akhirnya membuat masyarakat dan negara atau pemerintah tergegap-gegap menghadapi demokrasi langsung itu, strateginya adalah menjerat politisi dengan kekuatan uang, misalnya uang menjadi salah satu yang menggerakkan dalam proses politik. Artinya bagi yang menerima akan melakukan itu. Sedangkan sebagian perempuan tidak bisa menerima itu karena beragam pertimbangan di atas. Sekarang sistemnya sudah bagus, pilihan langsung ideal sekali, karena kita menaruh harapan pada calon yang terpilih. Dan secara personal ada hubungan sehingga dapat minta tanggung jawab

atau menanyakan apa yang mereka lakukan sebagai pemimpin”.

Tidak melalui demokrasi perwakilan yang tidak mungkin menciptakan kedekatan psikologis dengan kandidat atau pemimpin yang terpilih. Artinya hal itu bisa lebih baik bagi proses dan kehidupan demokrasi. Momentumnya yang belum tepat, ketika sebelumnya situasi represif kemudian berubah atau bertukar dengan sistem demokrasi yang bebas, kemudian dibuka krannya dan sangat besar. Jadi semuanya terjebak dalam euforia demokrasi. Harusnya demokrasi sistem seperti sekarang ini dilaksanakan setelah semua perangkat demokrasi siap teramsuk rakyat agar dewasa dalam berdemokrasi, juga para politisi dan lain-lainnya. Baru demokrasi dilaksanakan, sekarang ini masyarakat seperti diminta belajar mengenai demokrasi dan memahami sekaligus melaksanakan perubahan yang terjadi tanpa menyadari sepenuhnya apa yang mereka lakukan termasuk konsekuensi dan tanggung jawabnya, seperti negara “*autopilot*” bahwa masyarakat dapat jalan sendiri tanpa pengelolaan yang baik dari pemerintah. Pemerintah ada, namun realitasnya seperti tidak ada.

Perempuan harus berani dan mau tampil sebagai alternatif pemimpin DKI Jakarta. Perempuan dapat menjadi pemimpin yang lebih peduli, jujur, dan berorientasi pada masyarakat. Perempuan dengan segala karakteristik yang dianggap lebih peka, sensitif, dan peduli kepada yang lain dapat menjadi nilai tambah dan kekuatan perempuan dalam memimpin Jakarta. Hal itu sangat penting agar Jakarta dapat ditangani dengan baik dan seksama yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat setinggi-tingginya. Namun diperlukan usaha maksimal untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat dan partai politik menjadikan perempuan sebagai calon dan pemimpin mereka di masa mendatang. Perempuan harus mampu merebut kesempatan dan peluang dari situasi

yang ada, yang mana masyarakat sering terabaikan dan kalah oleh kepentingan dan kekuatan yang lebih kuat dan besar yaitu kapitalisme.

Kondisi perempuan di wilayah politik yang belum megebirakan karena keterbasan-keterbatasan yang ada diperlukan upaya secara terus-menerus meningkatkan kesadaran dan aktivitas politik perempuan. Perempuan harus menjadi pioner dalam politik dan menawarkan alternatif pengelolaan negara. Perempuan harus mampu menawarkan metode yang berbeda dari metode yang ada. Selama ini pemerintahan dan politisi yang ada belum mampu mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, banyak korupsi dan lain-lain. Perempuan harus menawarkan pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang lebih mensejahterakan, jauh dari korupsi dan mempunyai kreatifitas dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan sosial budaya.

Jika dalam Pemilu DKI Jakarta 2012 kandidat perempuan tidak muncul. Namun hal itu bukan berarti perempuan tidak berkualitas. Perempuan diharapkan tetap dapat memacu diri mereka untuk mengambil bagian secara aktif, namun hasrat itu pasti ada, dan tidak takut dengan persaingan dalam politik. Realitas politik yang persaingannya sangat ketat, biaya mahal, dan tidak adanya kepastian dalam proses politik diharapkan tidak mematikan semangat perempuan dalam berpolitik. Hal itu justru harus dijadikan penggerak semangat perjuangan kaum perempuan untuk menjadi bagian perjuangan politik dengan pencapaian yang jelas dan sesuai sasaran.

Perempuan harus menggalang kerja sama, atau *collective will* ini dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak lain terutama dukungan kaum perempuan itu sendiri. Perjuangan bersama akan mampu menggalang kekuatan perempuan dan mampu memunculkan perjuangan dengan kekuatan yang jelas, terarah dan mempunyai target yang jelas. Perjuangan perempuan dalam politik harus dilakukan secara bersama-sama, tidak mungkin perjuangan politik ini hanya dilakukan perempuan semata.



Perjuangan bersama akan lebih mudah mencapai tujuan perjuangan, karena kekuatan bersama dan terarah. Hal itu juga memperkecil konflik dan perbedaan pandangan di antara kaum perjuangan itu sendiri, sekaligus membangun dukungan dari pihak lain yaitu kaum laki-laki yang selama ini mendominasi wilayah politik.

Salah satu strategi perjuangan yang dapat diterapkan oleh perempuan dalam perjuangan mereka meningkatkan kesadaran dan jumlah perempuan di wilayah politik adalah pembangun dukungan finansial. Dukungan finansial yang selama ini dituding sebagai salah satu penghambat keterlibatan perempuan dalam politik dapat diatasi dengan menggalang dukungan dana dan pembiayaan dari pihak-pihak yang mempunyai dana yang cukup. Misalnya, Perempuan-perempuan pengusaha atau yang mempunyai kekuatan finansial bergerak membiayai aktivitas politisi perempuan dan saling mendukung kepetinngan perempuan dan masyarakat. Penggalangan dana (*fund rising*) dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadarn berpolitik dan dukungan bersama kaum perempuan dan pihak manapun yang bersimpati atas perjuangan perempuan.

Gerakan *collective will* juga merupakan gerakan yang dapat mengurangi konflik dan perbedaan di antara perempuan, yang mana banyak 'prasangka' selama ini dari berbagai pihak bahwa perempuan acapkali susah mendukung sesama perempuan. Perempuan harus membunuh prasangka tersebut dan bersama-sama membangun kerja bersama di antara perempuan dengan memebangun kekuatan perempuan sebagai sebuah kesatuan perjuangan perempuan di wilayah publik khususnya politik. Jalan ini diharapkan mampu memunculkan kader atau politisi perempuan khususnya perempuan di DKI Jakarta.

Perjuangan di wilayah politik kaum perempuan harus mampu memunculkan perempuan-perempuan yang berkualitas sehingga dipandang cocok untuk memimpin Jakarta., perempuan harus mempun-

yai kualitas kepemimpinan dan managerial yang kuat dan berpengalaman. Kualitas tersebut penting untuk menumbuhkan kepercayaan perempuan sekaligus kemampuan mereka dalam mengelola DKI Jakarta ke depannya. Kemampuan yang memadai juga akan memberikan kekuatan bagi perempuan dalam berkompetisi dengan kaum laki-laki yang selama ini memimpin Jakarta.

Nurul Arifin menjelaskan perempuan yang cocok dalam memimpin Jakarta, sebagai berikut:

“Menurut saya terutama dari ‘*performance*’, penampilannya meyakinkan, kedua manageable, bisa meyakinkan orang lain, seseorang yang mempunyai inovasi, satu paket, tegas, berani, dan pintar, bisa mempengaruhi orang dan percaya pada apa yang dilakukan dan diterapkan”.

Di samping perjuangan politik perempuan membutuhkan dukungan dana yang kuat, ilmu pengetahuan yang memadai, kemampuan managerial yang baik dan performance yang bagus serta berorientasi pada rakyat. Namun dukungan yang juga sangat penting dan berpengaruh adalah dukungan dari ‘partai politik’. Perjuangan perempuan untuk memperoleh kekuasaan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat akan berjalan dengan baik jika didukung oleh partai politik.

Perempuan yang cocok dan sesuai menjadi gubernur DKI Jakarta, perempuan yang mempunyai penampilan yang menarik di samping beberapa hal yang harus dimiliki oleh perempuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selama ini pemimpin Jakarta semua laki-laki. Perempuan tersebut memahami persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta yang sangat kompleks dan beragam. Perempuan juga harus mempunyai perhatian yang jelas sehingga masyarakat merasa nyaman dengan kepemimpinan yang ada dan inovatif. Inovasi menjadi syarat bagi pengembangan masyarakat terutama di era global saat ini.

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan *affirmative action*, kuota 30 persen, maka hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan partai politik. Dukungan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain hanya melalui partai politiklah, calon legislatif dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu. Partai politik adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif.

Partai politik adalah wadah di mana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah dalam politik praktis. Partai politik memiliki peranan sangat kuat berkaitan dengan Pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari partai politik sebagai instrument dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia.

Persoalan krusial muncul ketika, partai politik selama ini didominasi oleh laki-laki dalam kepengurusan, terutama pada posisi-posisi penting penentu kebijakan dan pengambil keputusan. Terjadi hegemoni kaum laki-laki dalam perpolitikan dan partai politik sebagaimana secara sosial budaya yang dipercaya memiliki kualifikasi dan kualitas untuk aktif di ruang publik adalah laki-laki. Kondisi tersebut seakan menggambarkan secara kuat dan jelas bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki dan hanya laki-laki yang pantas terjun ke politik dikarenakan sesuai dengan realitas alamiah kaum laki-laki yang secara sosial budaya dinyatakan dalam idiom-idiom seperti rasional, kuat, cerdas, dan berani bersaing.

Pemahaman nilai-nilai budaya mengenai laki-laki yang kemudian mengkristal dalam proses transformasi ide-ide dan tindakan praktis dalam masyarakat. Setiap individu adalah anggota masyarakat, keluarga, organisasi formal atau informal, bahkan menjadi sistem belief yang kemudian individu baik laki-laki maupun perempuan memahami diri mereka, dan lingkungannya dengan nilai-nilai yang lebih memberi

peluang kepada laki-laki mendominasi kaum perempuan. Kondisi real inilah, antara lainnya menjadi penyebab, kaum perempuan termarginalkan dalam kancah politik dan ruang publik lainnya. Seandainya pun ada perempuan, mereka lebih banyak berada pada level menengah dan bawah, dan bukan pada *level top manajemen*, yang menentukan kebijakan dan keputusan diambil.

Realitas minimnya kaum perempuan aktif di politik dan menjadi pengurus partai politik, tentu saja tidak fair jika hanya mempertanyakan dan menyalahkan kondisi tersebut, namun kita dapat mempertanyakan kepada partai politik yang dalam sistem politik sebagai satu-satunya sarana kaum perempuan belajar politik praktis dan partai politiklah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang mencalonkan seseorang sebagai calon legislatif. Tanpa legitimasi dari partai politik, maka seseorang tidak mungkin dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Dengan kata lain, partai politik menentukan seorang politisi dapat dicalonkan atau tidak.

Besarnya kekuasaan partai politik dalam menentukan calon legislatif, bagi kalangan perempuan menjadi kendala tersendiri. Perempuan yang realitanya sangat sedikit menjadi pengurus partai dan aktif dalam aktivitas partai secara kontinue, memungkinkan kesempatannya kecil bagi kaum perempuan jika penentuan calon legislatif hanya dilakukan oleh partai politik. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik, pada dasarnya memang penentuan calon legislatif sepenuhnya partai politik. Akan tetapi dengan adanya ketentuan kuota 30 persen yang mensyaratkan partai politik mencalonkan 30 persen perempuan sebagai calon legislatif, terbuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif di politik dan menjadi calon anggota legislatif.

Berkaitan dengan kondisi perempuan yang semakin terbuka untuk menjadi calon legislatif sebagai implikasi logis dari ketentuan kuota 30 persen, maka membutuhkan kesiapan perempuan untuk memenuhi

kuota tersebut. Pemenuhan tersebut, bukan hanya sekedar pemenuhan UU semata, namun secara serius harus dilakukan pendidikan politik kepada perempuan khususnya, agar kaum perempuan memahami pentingnya terjun aktif di politik dan partai politik.

Bagaimana dukungan partai politik? Partai politik semestinya mendukung kaum perempuan dengan program-program partai yang bisa meningkatkan kemampuan kaum perempuan sebagai politisi partai. Partai politik mempunyai kewajiban untuk membangun pemahaman politik perempuan, para anggota dan pengurus partai secara berkesinambungan. Partai politik tidak dapat lagi hanya melirik kaum perempuan pada saat tuntutan pemenuhan kuota 30 persen calon legislatif. Akan tetapi, keberpihakan terhadap perempuan sebagai pengurus dan anggota partai politik harus sudah dimulai semenjak kaum perempuan menjadi anggota partai politik.

Ketua Gerakan Perempuan Indonesia, Yuda Irla menjelaskan jika partai politik memberi alasan mengapa tidak dilakukan pendidikan politik terhadap anggota partai politik adalah karena realitanya banyak perempuan yang enggan menjadi anggota partai politik. Pendapat tersebut bahwa perempuan enggan masuk partai, namun apakah partai politik memiliki program yang jelas untuk perempuan. Partai politik cenderung tidak ramah terhadap perempuan. Partai politik sangat maskulin, sehingga menakutkan bagi perempuan.

Pernyataan Yuda Irla selengkapnya:

“Berbicara tentang pendidikan politik, bagaimana melakukan pembinaan pada perempuan? Kita tak melihat itu di lapangan, jadi, banyak hal yang harus kita cermati dan diskusikan bersama, yang penting adalah bagaimana mengajak perempuan untuk masuk *political party* sebab memang harus ada yang di dalam sistem, harus ada teman-teman yang masuk *political party* duduk dilembaga legislatif, tapi harus juga ada teman-teman yang kerja di luar sistem, sebagai balancing”.

Pendidikan partai politik oleh partai politik sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan nyata dan konsisten partai politik bagi pemahaman warga Negara terhadap politik. Sehingga diharapkan pemahaman politik yang baik akan mampu menciptakan kelas menengah partai politik dan masyarakat politik yang bertanggung jawab. Masyarakat tidak hanya memilih dikarenakan pertimbangan pragmatis karena sekedar suka, terkenal dan memberikan sejumlah dana dan bantuan tertentu. Namun masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap pilihan mereka.

Urgensi dukungan dari partai politik memang tidak mungkin dibantahkan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di politik dan calon anggota parlemen. Partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU adalah lembaga formal politik yang memiliki hak dalam penentuan calon legislatif. Oleh karenanya keberpihakan partai politik adalah sangat penting bagi peningkatan jumlah kandidat perempuan di politik. Berkaitan dengan pentingnya dukungan partai politik terhadap ketentuan kuota keterwakilan perempuan juga disampaikan oleh Hadar F. Gumay, bahwa partai politik dukungannya harus jelas dan besar kepada peningkatan peran politik perempuan dan dilakukan secara nyata dan berkesinambungan, bukan hanya pada waktu tertentu saja, dan bukan hanya *lip service* saja.

Dukungan partai politik seharusnya dalam program-program yang berkesinambungan dan nyata berdasarkan pengalaman selama ini, yang mana partai politik cenderung enggan mendukung partisipasi partai politik jika tidak terpaksa dengan adanya sanksi moral dari masyarakat dan tekanan media massa. Jika dukungan partai politik selama ini serius dan terencana maka ketika waktu penentuan calon legislatif dan harus memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan, maka partai politik terutama partai politik lama dan besar tidak sulit melakukannya karena tidak mencukupinya kandidat perempuan. Realitas tersebut menjelaskan memang selama ini pendidikan politik tidak secara kontinue

dilaksanakan oleh partai politik, sehingga partisipan atau anggota partai belum siap menghadapi pemilu legislatif.

Kondisi tersebut semakin krusial jika dikaitkan dengan karakteristik budaya politik di Indonesia. Partai-partai politik di Indonesia cenderung tidak semua partai memiliki kaderisasi anggota partai mereka, kecuali PKS, akan tetapi umumnya partisipan partai hanya bersifat eksidental semata. Jadi massa partai politik dengan sangat mudah berubah dan berpindah dari satu partai ke partai lainnya. Perpindahan tersebut juga berlangsung di level kepengurusan. Dapat dilihat, jika ada calon legislatif pada pemilihan tahun 2009 yang lalu tidak terpilih, maka terbuka kemungkinan mereka akan mencari partai baru yang kemungkinan besar memberi peluang pada pemilihan selanjutnya.

Besarnya pengaruh partai politik dalam pelaksanaan ketentuan kuota 30 persen juga diamini oleh Anie Sutjipto, menyatakan bahwa partai politik berperan betul dalam banyak proses politik perempuan dan hal itu menandakan bahwa perempuan yang bermaksud terjun ke politik harus terlebih dahulu belajar dan aktif di partai politik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keterwakilan tersebut tantangan sangat besar. Ada kecenderungan kebijakan *affirmative action* juga tidak didukung dengan sepenuh hati oleh partai politik. Namun lebih sebagai kenderaan politik saja. Kebijakan *affirmative action* banyak yang menunggangi dalam proses pemilu 2004 yang lalu. Oleh karenanya diperlukan usaha bersama dalam rangka menyakinkan perempuan-perempuan mau terjun ke politik secara sadar. Partai politik harus lebih ramah terhadap kaum perempuan dan menunjukkan bahwa mereka bersahabat dengan kaum perempuan.

Pendidikan politik kepada masyarakat juga dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil yang baik yaitu sebuah masyarakat yang memiliki kemampuan rasional dan otonom dalam berpolitik. Menciptakan masyarakat yang mandiri dan otonom sebenarnya bukan hanya tanggung jawab partai politik, namun tugas terbesar sebenarnya berada pada

Negara untuk secara terencana melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik bagi masyarakat. Yang diharapkan adalah terciptanya suatu masyarakat yang bertanggung jawab dalam berpolitik. Kedewasaan masyarakat dalam politik diperlukan agar masyarakat mampu secara rasional mengaplikasikan UU yang berkaitan dengan politik dan pemilu dengan pemahaman yang bertanggung jawab.

Wanda Hamidah sebagai aktivis Partai Politik Amanat Nasional dan Anggota DPRD DKI Jakarta 2009-2014 mengatakan secara tegas bahwa dukungan partai politik terhadap perempuan, khususnya Jakarta tidak cukup mendukung, lebih cenderung hanya memenuhi persyaratan politik semata, tidak melakukan proses pendidikan politik secara terencana dalam mendukung kandidat perempuan secara serius, sebagai sebuah program yang seharusnya dilakukan secara serius oleh partai politik. Aturan berkaitan dengan *affirmative action*, terdapat dalam UU partai politik dan UU Pemilu, maka seharusnya partai politik harus secara serius melakukan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya perempuan sehingga mereka siap terjun ke politik. Atas dasar kenyataan tersebut, kaum perempuan harus mau terjun ke kancah politik dan belajar politik di partai politik yang hal itu semua mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai politisi.

Sebenarnya diakui bahwa dukungan partai politik sangat diperlukan oleh perempuan terutama pengalaman yang disediakan secara terbuka oleh partai politik. Perempuan bukan hanya dipahami sebagai pelengkap atau pemanis partai politik, atau kesekedar mendukung kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Berdasarkan pengalaman Wanda Hamidah, pengalaman politik seorang perempuan akan mewarnai langkah perempuan tersebut, termasuk kesiapan mereka untuk berargumentasi dan bersaing secara terbuka dengan laki-laki. Realitasnya, banyak konflik yang muncul di tengah kandidat partai politik, dikarenakan ketentuan kuota 30 persen yang dipandang oleh sebagian politisi partai



(laki-laki) menutup peluang mereka memperoleh nomor urut sebagai calon legislatif.

Pernyataan Wanda Hamidah selengkapnya adalah:

“Kebijakan *affirmative action* kuota 30 persen bisa mendukung partisipasi politik perempuan bahwa berdasarkan pengalaman, kebijakan *affirmative action*, tidak signifikan membuka peluang keterlibatan perempuan terpilih sebagai anggota legislatif, karena faktanya ada banyak masalah yang harus dihadapi kaum perempuan dalam proses tersebut. Hambatan paling besar adalah resistensi dari calon pemilu laki-laki yang selama ini aktif di partai politik atau juga didukung oleh partai politik. Mereka sangat terganggu dan cenderung menggunakan banyak cara untuk mengalahkan kandidat perempuan yang meraka anggap baru, awam dalam politik dan juga keberadaan perempuan tersebut dianggap ‘mengganggu’ eksistensi mereka atau peluang mereka untuk terpilih atau terpilih kembali. Atas dasar itu semua, berdasarkan pengalaman di politik, menjadi pengurus partai dan terlibat secara aktif di politik sangat diperlukan sebelum perempuan tersebut mencalonkan diri dalam pemilu”.

Sulitnya memenuhi ketentuan kuota 30 persen dikarenakan politisi perempuan yang masih kurang, sedangkan politisi laki-laki berlimpah, diakibatkan dominasi laki-laki selama ini di partai politik adalah laki-laki dan kondisi ini dialami oleh semua partai politik. Partai politik adalah dominan dalam penentuan kandidat legislatif. Ketentuan kuota 30 persen sebagai sebuah kebijakan politik dalam proses sosialisasi dengan media, pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan, partai politik dan banyak pihak lainnya yang terlibat. Namun pelaksanaan di lapangan tidaklah mudah disebabkan pemahaman maskulin yang telah lama berlangsung dalam politik.

Dukungan partai politik terhadap ketentuan kuota 30 persen yang diberikan oleh partai politik dinyatakan oleh Neneng Hasanah, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat menjelaskan, bahwa Partai Demokrat sangat mendukung pemberdayaan perempuan berkaitan dengan ketentuan kuota 30 persen. Program-program pemberdayaan perempuan atau bentuk dukungan dari partai untuk 30 persen kuota perempuan seperti pendidikan partai politik dan ini sangat didukung oleh partai Demokrat. Dukungan Partai Demokrat di samping beragam bentuk program yang diadakan untuk perempuan partai, juga kader-kader partai politik didukung untuk melanjutkan level pendidikan mereka. Hal itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan kader partai, dalam hal ini perempuan partai sehingga siap menjadi kandidat politik yang mewakili partai demokrat.

Selengkapnya pernyataan Neneng Hasanah adalah:

“Jadi ada beberapa kader partai Demokrat yang disekolahkan, termasuk saya sendiri, mengambil ilmu politik. Untuk angkatan saya sendiri 20 orang yang sedang disekolahkan mengambil Ilmu Politik dan kebetulan baru saya yang menjadi anggota dewan, November ini diwisuda, semua dari partai Demokrat”.

Besarnya dukungan partai politik terhadap pencalonan perempuan berkaitan dengan ketentuangan kuota 30 persen dinyatakan oleh Ida Mahmudah dari PDI Perjuangan sangat merespon dan sangat mendukung terlaksanakannya aturan kuota 30 persen. Dukungan tersebut juga diberikan sepenuhnya oleh Ketua Umum PDIP, yang juga adalah perempuan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dukungan tersebut bukan hanya *lip service* semata atau dilaksanakan hanya pada waktu menjelang pemilu legislatif, namun dukungan tersebut menjadi program terencana PDIP. Namun sebesar apapun kesempatan yang diberikan, akan tidak terlalu berarti jika, kaum perempuan sendiri tidak mengambil kesempatan tersebut sebesar-besarnya. Jadi dalam rangka mendukung pem-

berdayaan perempuan berakaitan dengan ketentuan kuota dan otonomi daerah dituntut kesiapan kedua belah pihak yaitu UU dan kebijakan yang mendukung ketentuan kuota 30 persen serta dukungan dari kaum perempuan sendiri, baik di level individu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya.

Lebih jauh Ida Mahmudah menjelaskannya sebagai berikut:

“Ibu mega ini kalau saya lihat walupun beliau tak bicara secara tertulis tetapi beliau selalu sampaikan di acara sambutan, dan menganggap itu merupakan instruksi kepada bawahannya. Ia selalu mengatakan sesuatu itu perempuan. Sekali lagi bukan menunggu, itu memang karena kita berkualitas, walau mereka mengatakan ketua umumnya perempuan seperti mba tadi mengatakan perempuannya itu-itu saja bukan karena ketua umum tidak memberikan semangat atau kesempatan, tetapi karena memang perempuannya sendiri yang tidak mau mendapat kesempatan tadi. Kadang memang kembali lagi kepada kitanya yang selalu mau memposisikan dirinya bahwa saya adalah pelengkap, paradigma ini yang menjadi tanggung jawab perempuan untuk merubahnya dan menghilangkannya.”

Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga disampaikan oleh Mega Cinta, anggota DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa memang sangat mendukung dengan beragam program partai terhadap kesuksesan kuota 30% perempuan. Dukungan sangat nyata diberikan dalam pendidikan kader-kader politisi perempuan partai hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kandidat perempuan dalam politik. Hal itu penting untuk mengurangi dominasi laki-laki dalam politik. Dengan kata lain, dukungan PDIP terhadap kuota 30 persen dilakukan dengan sungguh-sungguh, walau tetap realistis melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Dukungan partai politik, bukanlah satu-satunya faktor yang membuat kandidat perempuan mampu maju sebagai calon wakil rakyat,

namun harus juga dilengkapi dengan kemampuan perempuan. Dan dalam peningkatan kemampuan perempuan, partai politik haruslah berada paling depan karena partai politiklah wadah di mana pengembangan politisi berlangsung.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan, umumnya partai politik mendukung ketentuan kuota 30 persen. Partai Demokrat, PDPI, Golkar, Hanura mendukung ketentuan kuota, bahkan calon perempuan melebihi ketentuan 30 persen. Namun PPP yang mengklaim dirinya sebagai partai Islam melalui anggota DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah menyatakan bahwa PPP merasa tidak perlu mendukung ketentuan kuota 30 persen, karena PPP melihat bahwa tidak terdapat ketimpangan atas perempuan di wilayah politik. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak diperlukan, tanpa ketentuan kuota 30 persen, PPP telah membuka peluang seluas-luasnya kepada perempuan PPP.

Menurut peneliti, ketentuan kuota sebagai kebijakan sementara masih diperlukan oleh kaum perempuan sebagai bentuk dukungan negara dan kelompok dominan lainnya terhadap pengembangan perempuan terutama di politik, bahkan ketentuan tersebut, bukan hanya berkaitan dengan kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota legislatif, akan tetapi yang harus terus diperjuangkan adalah ketentuan ini juga berlaku bagi pejabat publik lainnya, sebagai bentuk apresiasi negara kepada perempuan.

Partai politik semestinya sungguh-sungguh dalam memberi ruang kepada perempuan terutama berkaitan dengan persoalan-persoalan kewenangan partai politik yang menentukan seorang kandidat, kepengurusan partai politik dan lain-lain. Menurut Marissa Harque Fauzi (wawancara, Oktober 2012 pukul 11.00- 12.30WIB) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya yang dibangun dengan dukungan banyak perempuan. Namun disebabkan masih kuatnya dominasi kaum

laki-laki, maka diskriminasi terhadap peluang perempuan dalam politik masih sangat kuat. Partai politik yang berbasis kader dan sebagiannya adalah kaum perempuan yang mendukung partai dan membangun partai, akan tetapi sampai saat ini ternyata sulit bagi kader perempuan berkiprah dan memimpin partai PKS. Acapkali kader perempuan dikalahkan oleh kepentingan kader sesaat yaitu laki-laki yang baru saja mendaftar dan berkiprah, mereka sudah dipercaya menjadi pimpinan dan calon kuat bagi kandidat tertentu.

Harapannya bahwa partai politik lebih bijak dan mendukung aktivitas politik perempuan bukan hanya dengan alasan perempuan tersebut menguntungkan secara keuangan bagi partai politik, namun harus lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lebih substansial seperti pengembangan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Partai politik juga harus mulai melakukan kaderisasi secara terus menerus sehingga proses politik anggota partai dapat berkesinambungan. Namun yang lebih penting adalah partai politik memberikan kepercayaan kepada perempuan sebagai kader partai untuk membuktikan diri sebagai pemimpin masyarakat.



# **BAB V**

## **Penutup**

PENELITIAN mengenai “Kekuasaan Perempuan Dalam Politik yang menfokuskan pada Tidak adanya Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu pada Propinsi DKI Jakarta 2012 menggunakan paradigma kritis, pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan feminist research telah menghasilkan temuan-temuan untuk menjawab rumusan pertanyaan dan memenuhi tujuan penelitian. Temuan dan analisis data diharapkan dapat memenuhi kontribusi teoritis dan praktis yang menjadi output penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan pengamatan atas realitas politik yang ada di Indonesia maka disimpulkan bahwa perempuan Indonesia di wilayah politik masih mengalami ketidakadilan sampai hari ini. Ketidakadilan yang dialami perempuan khususnya di politik dipandang oleh kaum feminis dan

pejuang kesetaraan dan keadilan gender sebagai persoalan yang krusial dan merugikan perempuan. Kaum perempuan belum menjadi bagian aktif dari proses kerja aktif dalam mengkonstruksi peradaban. Perempuan belum menjadi penggagas sejarah (*historical bloc*), tetapi cenderung hanya menjadi bagian alamiah semata dan proses sejarah tersebut mengalami hegemonisasi oleh kaum laki-laki. Salah satu indikator yang dapat dilihat secara jelas di bidang politik, yang mana perempuan berada dalam posisi terpinggirkan, marjinal dan anti demokratis dari proses politik yang berlangsung. Hegemoni budaya patriarki yang telah berlangsung sepanjang proses sejarah kehidupan kaum perempuan sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Kondisi tersebut dengan lebih tegas diperkuat dan diteguhkan oleh negara terhadap realitas hidup kaum perempuan yang disebut penindasan sistemik.

Dalam wilayah politik, diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan dan hegemoni negara sangat faktual. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah minimnya bahkan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam pilkada DKI Jakarta 2012. Dari 6 pasangan calon yang mendaftar tidak memenuhi keterwakilan perempuan. Realitas ini menjelaskan marjinalisasi perempuan dalam politik. Kesempatan yang ada memang sudah membuka peluang kepada perempuan, namun dalam tataran praktisnya perempuan masih belum dipercaya oleh partai politik untuk berkripta h secara terbuka kecuali perempuan tersebut mempunyai kekuatan finansial, terkenal dan merupakan keturunan yang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Semua bentuk diskriminasi tersebut adalah bagian dari proses *histories* yang telah membudaya yang dalam bahasa Gramsci disebut *cultural hegemoni*.

Sistem desentralisasi menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk terus berkembang termasuk dalam politik. Realitanya adalah desentralisasi justru banyak memunculkan praktek-praktek lama yang merugikan perempuan, Dan semua itu atas nama nilai-nilai budaya yang secara



subyektif diterjemahkan oleh kaum laki-laki. Kondisi tersebut nyatanya lebih membuat perempuan mengalami dominasi oleh nilai-nilai lokal yang selama ini kurang mendapatkan tempat. Perempuan belum menjadi individu yang menarik dalam kepemimpinan DKI Jakarta padahal perempuan-perempuan DKI Jakarta diyakini lebih banyak yang kualitas dan layak mencalonkan diri sebagai cagub/cawagub DKI Jakarta. DKI Jakarta yang merupakan propinsi yang berstatus daerah khusus, sebagai ibukota adalah pusat negara Indonesia, kota metropolitan dengan tingkat pendidikan yang paling maju. Tingkat kualitas hidup yang baik, dan pengembangan masyarakat yang pesat. Namun kenyataannya, sampai pemilu daerah pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yang baru berlangsung, dari enam calon pasangan calon yang mendaftarkan diri tidak ada satupun dari pasangan cagub/cawagub yang diusung oleh partai terdapat kandidat perempuan. Perempuan tidak ada yang mendapat kepercayaan dari partai politik kandidat.

Gramsci menyatakan bahwa kelompok subordinat bahkan membantu memelihara status quo kelompok dominan atau penguasa serta tidak berusaha melawan kondisi dominan yang mengakibatkan, apa yang Marxist sebut sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Kaum perempuan di politik lebih banyak dijadikan partisipan pasif, penggembara dalam kampanye dan aset untuk meraih jumlah suara ketika pemilu berlangsung. Perempuan, dalam konteks ini adalah kelompok subordinat, merupakan bagian masyarakat sipil yang dalam tataran konseptual dan praktisnya sangat di dominasi oleh pemikiran atau konsep kelompok dominan.

Politik sebagai ruang publik dinyatakan sebagai aktivitas yang tidak tepat bagi perempuan karena dianggap kotor, kasar, tabu dan aktivitas yang tidak cocok untuk perempuan. Konstruksi budaya atas realitas perempuan sangat seksies. Pemilihan peran dan kerja cenderung ber-

langsung karena pertimbangan seksual. Sistem Patriarkhi memunculkan relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki karena pemahaman yang berbeda atas realitas laki-laki dan perempuan. Pemahaman yang berbeda tersebut mengkonstruksikan *stereotype* atas perempuan sebagaimana perspektif kelompok dominan.

Marjinalisasi dan kekerasan negara yang dialami oleh perempuan dalam segala bidang, khususnya di politik, salah satunya merupakan hasil dukungan persepsi budaya sebagaimana diterangkan diatas. Perempuan merasa bahwa pemahaman budaya itulah yang lazim dan sesuai untuk mereka, sehingga kondisi partisipasi perempuan dalam politik menjadi kecil, inilah yang terus dijaga oleh kelompok dominan dan penguasa sehingga perempuan selalu berada dalam kondisi marjinal dalam politik. Pemahaman budaya itu jugalah yang mau tidak mau 'memaksa' perempuan untuk berpikir, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati oleh kelompok dominan terhadap mereka.

Dalam bidang politik, Marjinalisasi yang terjadi kontrol di tubuh partai politik menyebabkan aktris politik perempuan kesulitan menembus level-level strategis di kepengurusan partai yang lalu berimbas pada sulitnya mereka menjadi kandidat legislatif. Pemahaman terhadap pembagian ruang privat dan publik beserta implikasi realnya sudah dimulai semenjak anak dikandung dan berlanjut pada saat lahir dan tumbuh. Semua proses berlangsung berdasarkan pembagian dua ruang tersebut secara jelas. Konstruksi tersebut terus berlanjut dikeluarga, walau memang tergantung dari pemahaman keluarga tersebut atas ruang publik dan privat. Pembagian ruang ini berpengaruh bahkan menentukan proses perempuan di ruang publik. Aktivitas perempuan di ruang publik tidaklah semudah laki-laki.

Pemahaman bahwa politik adalah aktivitas yang tabu bagi perempuan, kotor, kasan dan tidak cocok karena aktivitasnya dilakukan

di ruang publik. Persepsi tersebut merupakan hasil dari konstruksi dan kampanye bahwa politik adalah dunia yang kotor dan berlangsung di ruang publik, yaitu ruang yang tepat dan diperuntukkan bagi laki-laki. Politik dikonstruksikan bukan wilayah yang layak atau sesuai bagi perempuan, dan sekaligus membentuk pemahaman bahwa politik tidak penting bagi perempuan.

Dalam Pandangan feminis radikal, negara secara struktural melakukan marjinalisasi dan penindasan terhadap perempuan. Contoh nyata adalah UU Perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai pekerja tambahan penghasilan keluarga sedangkan suami berperan sebagai pencari nafkah utama. Kondisi-kondisi ini melemahkan daya kompetisi perempuan untuk menemukan sosok diri mereka sebagai manusia dan secara sistematis lalu tergantung secara social, ekonomi dan politik kepada laki-laki.

Diskriminasi dalam politik adalah persoalan yang krusial karena kondisinya sangat sulit dan kritis. Penolakan diskriminasi sebenarnya bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Hal ini berarti, negara atau siapapun dan atas nama apapun, seharusnya tidak boleh mendiskriminasikan hak-hak politik perempuan, karena hak-hak politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia (HAM). Namun dalam tataran praktis, diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlangsung, bahkan dilegalkan dalam UU seperti UU perkawinan, KUHP dll.

Minimnya perempuan di posisi strategis dan jabatan publik, yang memungkinkan perempuan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, tidak hanya terjadi di DPR Pusat, tapi kondisi lebih parah terjadi di DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di lembaga-lembaga publik dan politik lainnya. Keterwakilan perempuan yang rendah ini pada akhirnya sangat membatasi peran mereka untuk mempengaruhi kebijakan agar lebih

*sensitifgender*. Berdasar situasi diatas, maka ketentuan kuota 30 % bagi perempuan di legislatif bukanlah merupakan sebuah tujuan, melainkan hanya berperan sebagai instrumen menuju tataran tujuan perjuangan selanjutnya, yaitu kesetaraan dan keadilan antara laki laki dan perempuan.

Melawan dominasi hegemoni dan ideologi negara dan kelas penguasa mungkin sekali dilakukan, karena menurut Gramsci (1979:24), negara bukanlah suatu institusi kekal, melainkan institusi yang tidak kekal (*transitory institution*). Menurut Gramsci, selalu ada masa atau periode dimana kekuasaan dan dominasi negara dan kelas penguasa menjadi lemah. Namun yang diperlukan bukan hanya keterwakilan perempuan di Parlemen, yang juga belum terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitas, melainkan keterwakilkan perempuan di eksekutif dan juga yudikatif. Keterwakilan perempuan di eksekutif dalam hal ini sudah mulai muncul di beberapa daerah, namun untuk daerah DKI Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia dengan kelebihankelebihan yang dimiliki Jakarta ternyata belum bisa melahirkan perempuan-perempuan sebagai kandidat pemimpin Jakarta.

Perempuan tidak memiliki otonomi subyektif terhadap kondisi yang berlangsung sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan karena dominasi negara dan kelompok dominan yang sangat kuat. Namun sebagaimana dinyatakan oleh Gramsci dalam konsep negara, bahwa negara bukanlah suatu yang abadi, namun dapat berubah kapan saja. Maka konsensus yang diperoleh oleh negara atas perempuan juga tidak bersifat selalu damai tanpa konflik disebabkan proses perolehan konsensus yang tidak melalui kesepakatan alamiah kedua belah pihak, yaitu perempuan sebagai masyarakat sipil serta negara dan perangkatnya sebagai masyarakat politik, namun melalui kekuatan dominasi ideology dan hegemoni negara atas perempuan.

Banyak muncul kandidat legislatif baik tingkat daerah maupun pusat yang kemudian mereka berkiprah secara aktif dalam politik sebagai anggota legislative dan pengurus partai. Kesempatan semakin terbuka bagi perempuan untuk aktif di ruang publik yang ditandai dengan semakin banyaknya perempuan yang tertarik dengan politik dan memilih aktivitas politik sebagai pilihan karir mereka. Banyak perempuan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah tingkat propinsi dan Kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai pemilu pada 2012 kepada seluruh masyarakat, KPU DKI Jakarta sangat menyadari bahwa dibutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. menjadi sasaran obyek semata dalam pemilu. Artinya perempuan merupakan publik pasif dalam proses politik, dimana partisipasi politik mereka cenderung banyak dipengaruhi dan terkooptasi oleh individu dan kelompok di luar diri perempuan. Hal tersebut kemudian dalam proses pengambilan keputusan, para perempuan cenderung menjadi penggembira politik semata. Kondisi tersebut pada hakekatnya banyak merugikan perempuan karena aktivitas politik yang berlangsung bukan atas dasar kesadaran diri perempuan.

Masyarakat cenderung tidak mempersoalkan masalah “gender” laki-laki atau perempuan, melainkan pertimbangannya lebih pada prestasi dan rekam jejak kandidat tersebut diterima dan disukai masyarakat atau tidak. Perempuan secara umum sudah sangat diterima di ranah politik Propinsi DKI Jakarta, namun penerimaan ini tentu saja tidak mudah dan membutuhkan perjuangan keras agar tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat terutama dari partai politik. Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kekuasaan politik perempuan di DKI Jakarta masih minim dibandingkan jumlah pemilih perempuan yang sama jumlahnya dan pemilih aktif yang memberikan hak suara perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kapabilitas perempuan para politisi perempuan yang

duduk menjadi anggota dewan DPRD DKI Jakarta belum terpenuhi ketentuan *affirmative action*, kuota 30 persen. Anggota perempuan sudah sanggup bersaing dengan anggota laki-laki. Bukti dapat dilihat dari keadaan DPRD Jakarta periode 2009-2014 bahwa jumlah anggota perempuan adalah 22 orang dari 100 orang anggota. Di wilayah legislatif baru kita 20 persen perempuan yang menempati posisi relevan dan mempunyai kewenangan ikut memberi kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini masih kurang dibandingkan dengan sumber daya perempuan propinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat pendidikan, demokrasi, keterbukaan dan perubahan, termasuk pusat ekonomi.

Kebijakan kuota 30 persen berdasarkan UU Partai Politik dan UU Pemilu hanya menganjurkan pada pemenuhan kuota bagi pemilihan legislatif dan kepengurusan partai politik, namun belum ada ketentuan bagi keterwakilan perempuan sebagai kandidat pemimpin DKI Jakarta.

2. Dalam pemilu pada Propinsi DKI Jakarta 2012 dari enam (6) pasangan calon yang dicalonkan partai politik yang ada ternyata tidak ada satupun dari pasangan tersebut baik cagub maupun cawagub memenuhi keterwakilan perempuan. Artinya tidak ada representasi perempuan dalam pilkada DKI Jakarta 2012. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang tidak baik bagi keterwakilan perempuan di wilayah politik, terutama sebagianya masih terjadi marginalisasi perempuan dalam politik. Perempuan juga belum terlalu nyaman menjadi bagian dari proses politik pemilu pada DKI Jakarta karena Jakarta adalah kota dengan persoalan yang kompleks. Perempuan belum terlalu berani mencalonkan diri karena kemampuan personal dan finansial yang terbatas. Selama ini politik senantiasa membutuhkan dukungan dana yang kuat untuk melakukan pembiayaan kegiatan politik.

Realitas ini ironis bagi perempuan Jakarta yang dilihat dari kualitas pendidikan dan ekonomi serta pengalaman sosial budaya dan politik lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Nmaun kenyataannya para perempuan Jakarta lebih memilih tidak terjun ke politik senagai calon gubernur dan wakil gubernur karena memilih kehidupan yang lebih nyaman dan menganggap aktivitas politik mereka belum bermanfaat karena mereka belum mampu melawan 'tekanan' dan dominasi kaum laki-laki. Perempuan dipandang bukan pihak yang cocok untuk memimpin Jakarta, untuk memimpin Jakarta dibutuhkan tokoh-tokoh yang kuat dan mandiri serta berani menghadapi beragam persoalan yang ada di Jakarta. Agar ke depannya mampu bersaing dengan kaum laki-laki, hingga uan harus mempunyai pengalaman politik dan melakukan sosialisasi, publikasi dan pembentukan image dan opini publik secara maksimal dan konstinyu sehingga mereka dikenal oleh publik sebagai tokoh yang layak dipilih dan dipercaya untuk memimpin Jakarta. Pemanfatan Media massa merupakan salah satu strategi yang harus dimanfaatkan dalam proses tersebut.

3. Partai politik selama ini belum bisa dikatakan mendukung kaum perempuan dalam proses politik terutama dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin DKI Jakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada satupun kandidat pasangan calon merupakan perempuan. Wacana mengenai calon pevilianai dan Hasnaini, namun khususnya kasus wanda Hamidah, partai PAN belum percaya bahwa wanda Hamidah mampu menjadi pioner partai PAN dna PAN lebih memilih pasangan FOKR-NARA sebagai kandidat yang diusung.

Partai politik merupakan satu-satunya instutusi yang dapat menyatakan lolos-tidak lolosnya pasangan calon kandidat pemimpin Jakarta. Dan untuk memenanmgkan dukungan partai politik perempuan harus mempunyai kekuasaan dan kekuatanb

sosial politik dan sekaligus kekuatan finansial yang diminta partai politik bagi pembiayaan proses politik calon tersebut.

Kondisi ini merupakan malapetaka bagi perempuan karena penguasaan finansial banyak pada tangan laki-laki karena secara sosial budaya ekonomi laki-laki merupakan pijhak yang selama ini melkaskan aktivitas publik termasuk dalam bidanng ekonomi, jadi perempuan tidak akan mampu menjadi kandidat jika pertimbangan hanya kekuatan finansial.

Partai politik harus mengubah pola kaderisasi mereka secara lebih bertanggung jawab dan melihat substansi politik, bahwa kekuatan kader bukan hanya pada finansial, melainkan juga pada kekuatan lainnya sehingga partai politik diharapkan mendukung pancalonan perempuan sbagai kandidat pemimpin Jakarta.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah :

### **Saran Teoritis**

1. Untuk pengembangan dan pengembangan teori sekaligus menghasilkan konsep dan mungkin teori baru maka dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan konsep-konsep dan teori yang sama atau melakukan pengembangan teori lainnya untuk memperkaya fokus penelitian. Penelitian dapat dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif dan menggunakan metode penelitian lainnya, atau dapat juga menggunakan paradigma yang berbeda dalam penelitian mendatang., Hal itu diharapkan dapat memberikan alternatif temuan dna pemamahan dalam kasus yang sama.



## Saran Praktis

1. Kaum perempuan harus lebih bersatu dalam perjuangan politik yang dilakukan, mempunyai strategi yang jelas dan konsisten dengan perjuangan yang dilakukan agar tujuan perjuangan yang sesungguhnya tercapai, bukan perjuangan hanya untuk kepentingan pribadi-pribadi saja, melainkan untuk kepentingan perempuan dan masyarakat. Kaum perempuan harus lebih cerdas melihat kondisi dan menentukan isu perjuangan mereka dan menggalang kekuatan yang mampu menciptakan 'kekuasaan' bagi mereka. Perempuan harus mau belajar, mengikuti proses politik, berani, konsisten dan mandiri. Hal itu diperlukan agar DKI Jakarta dalam periode mendatang memiliki calon perempuan sebagai pemimpin, dan perempuan tidak hanya memilih 'zona' zaman bagi mereka walau 'itu sah saja sebagai individu', namun sebagai sebuah auto kritik dalam perspektif kritis maka hal itu tidak dibenarkan, justru akan mematikan perjuangan perempuan.
2. DPRD Propinsi DKI Jakarta, mengupayakan adanya ketentuan khusus sebagai dukungan moral kepada perempuan baik di level eksekutif maupun pada level yudikatif guna keterwakilan perempuan sebagaimana juga adanya aturan keterwakilan perempuan di level legislatif. Dukungan pada tahap awal diperlukan untuk membuka selebar-lebarnya peluang bagi perempuan di wilayah politik.
3. Partai Politik, sebagai satu-satunya pintu masuknya kader partai yang mencalonkan diri sebagai pemimpin Jakarta, maka partai politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki seharusnya mendukung aktivitas politik perempuan secara maksimal agar perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki yang selama ini. Partai politik tidak hanya mendukung kader berdasarkan alasan kekuatan finansial, kader dengan keturunan yang mempunyai pengaruh dan dikenal, namun partai politik juga mempunyai pro-

gram membangun ketokohan perempuan berdasarkan kualitas perempuan. Partai politik tidak hanya berlaku sebagai 'bos besar' yang menjadi tempat setor dana politik para kader.

4. Pemerintah, pemerintah diharapkan memberi ruang yang lebih nymana dalam wilayah eksekutif terhadap keterwakilan perempuan. Hal tersebut diperlukan agar perempuan dapat semaksimal mungkin berkarya bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menjadi pioner dalam pengembangan nmkelompok marginal di tengah masyarakat.
5. Masyarakat, masyarakat khususnya perempuan lebih menggalang kebersamaan dna kepercayaan kepada aktivitas spolitik perempuan. Perempuan juga harus menawarkan pola pendekatan dan pelayanan yang berbeda dibandingkan dibandingkan laki-laki agar kehadiran kaum perempuan disukai dan dikehendaki sebagai pemimpin di tengah masyarakat.

# Daftar Pustaka

## Buku

- Almond, Gabriel A and G. Bingham Powell Jr. 1966. *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston: Little, Brown & Company.
- Arivia, Gadis. 1999. *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN*. International IDEA dan Yayasan Jurnal Perempuan.
- Bainar (ed.). 1998. *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. PT. Pustaka Cidesindo.
- Ball, Alan R. and B. Guy Peters. 2000. *Modern Politics and Government*. Macmillan Press.

- Baran, Stanley J. and Dennis K. Davis. 1995. *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future*. Wadsworth Publishing Company.
- Berger, Arthur Asa. 2005. *Media Analysis Techniques*. Sage Publications.
- Berger, Peter L. and T. Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Bergvall, Victoria (et al.). 1996. *Rethinking Language and Gender Research: Theory and Practice*. Routledge.
- Bryman, Alan. 2001. *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Cameron, Deborah. 1992. *Feminism and Linguistic Theory*. Palgrave Macmillan
- Cantor, Dorothy, W (et al.). 1998. *Women in Power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Carey, James W. 1992. *Communication as Culture, Revised Edition: Essays on Media and Society (Media and Popular Culture)*. New York: Routledge.
- Cavalcanti, Pedro (ed.). 1975. *History, Philosophy and Culture in the Young Gramsci*. Telos Press.
- Cunningham, Frank. 2002. *Theories of Democracy: A Critical Introduction*. Routledge.
- Curran, James and Michael Gurevitch (eds.). 1992. *Mass Media and Society*. Bloomsbury USA.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln (eds.). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- Dolan, Kathleen. 2001. *Electoral Context, Issues, and Voting for Women in the 1990s*. Jurnal Women and Politics.
- Dowding, Keith M. 1996. *Power*. Open University Press.

- Gauntlett, David. 2002. *Media, Gender, and Identity: An Introduction*. London: Routledge.
- Golding, Peter, Graham Murdock and Philip Schlesinger (eds.). 1986. *Communicating Politics: Mass Communications and the Political Process*. Continuum International Publishing Group.
- Gramsci, Antonio. 1977. *Antonio Gramsci: Selections from Political Writings: 1910-1920*. International Publishers.
- Gudykunst, William B. (ed.). 2001. *Communication Yearbook 25: Volume 25*. London: Routledge.
- Halford, Susan and Pauline Leonard. 2001. *Gender, power, and organisations :An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Haugaards, Mark. 2002. *Power: A Reader*. Manchester University Press.
- Halliday, M. A. K. 1978. *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Arnold.
- Harris, David. 1993. *From Class Struggle to the Politics of Pleasure: The Effects of Gramscianism on Cultural Studies*. London: Routledge.
- Jones, Marsha and Emma Jones. 1999. *Mass Media (Skills-Based Sociology)*. Palgrave Macmillan.
- Kavanagh, Dennis. 1995. *Election Campaigning: The New Marketing of Politics*. Blackwell.
- Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Verso.
- Levy, Dena, Charles Tien and Rachelle Aved. 2001. *Do Differences Matter? Women Members of Congress and the Hyde Amendment*. *Journal of Women Politics & Policy*.
- Littlejohn, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication*. Wadsworth Publishing Company.

- Lorimer, Rowland and Paddy Scannell. 1994. *Mass Communications: A Comparative Introduction*. Manchester University Press.
- Lovenduski, Joni (et al.). 2002. *Women, Public Life and Democracy: Changing Commonwealth Parliamentary Perspectives*. Commonwealth Parliamentary Association in Association with Pluto Press.
- Katjasungkana, Nursyahbani (et al.). 2001. *Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*. Diterbitkan atas kerjasama PSW, UMY dengan Pustaka Pelajar
- Kellner, Douglas. 1989. *Critical Theory, Marxism, and Modernity*. Johns Hopkins University Press.
- McNair, Brian. 1995. *An Introduction to Political Communication*. Routledge.
- Mills, Sara (ed.). 1995. *Language and Gender*. London: Longman.
- Mouffe, Chantal. 1979. *Gramsci and Marxist Theory*. Routledge & Kegan Paul.
- Murniati, A Nunuk P. 2004. *Getar Gender (Buku Pertama): Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Magelang: Indonesia Tera.
- Nemeth, Thomas. 1980. *Gramsci's Philosophy: A Critical Study*. Humanities Press.
- Neuman, William Lawrence. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.
- Newman, Bruce L. 1997. *The Mass Marketing of Politics*. Sage.
- Nimmo, Dan D. 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*. Goodyear Publishing Company.
- Norris, Pippa. 1997. *Women, Media and Politics*. Oxford University Press.

- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patton, Michael Quinn. 2001. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Perry, David K. 2002. *Theory and Research in Mass Communication: Contexts and Consequences*. Routledge.
- Philo, Greg (ed.). 1999. *Message Received: Glasgow Media Group Research 1993-1998*. Longman.
- Piliang, Yasraf Amir. 2001. *Sebuah Dunia yang Menakutkan: Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagat Raya Chaos*. Mizan.
- Rivers, William S. (et al.). 2003. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Prenada Media Group.
- Salami, Leonardo. 1981. *The Sociology of Political Praxis: An Introduction to Gramsci's Theory*. Routledge & Kegan Paul.
- Scannell, Paddy (ed.). 1992. *Culture and Power: A Media, Culture & Society Reader*. Sage Publications.
- Schudson, Michael. 1996. *The Power of News*. Harvard University Press.
- Severin, Werner J. and James W. Tankard, Jr. 2001. *Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media*. New York: Addison Wesley Longman.
- Simon, Roger. 1999. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Spender, Dale. 1983. *Man Mad Language*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Squires, Judith. 2000. *Gender in Political Theory*. Polity.

- Subono, Nur Iman. 2005. *Negara & Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, A. Budi. 1992. *Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Taylor, Steve. 1999. *Sociology: Issues and Debates*. Palgrave Macmillan.
- Taylor, Steven J. and Robert Bogdan. 1998. *Introduction to Qualitative Research Methods*. John Wiley & Sons.
- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Press.
- Townsend, Janet G. 1999. *Women and Power: Fighting Patriarchy and Poverty*. Zed Books.
- Ward, Ian. 1995. *Politics of the Media*. Macmillan.
- Westwood, Sallie. 2002. *Power and the Social*. Routledge.
- Whitaker, Lois Duke. 1999. *Women in Politics: Outsiders or Insiders?*. Longman.
- Wijaksana, M. B. 2006. *Modul Perempuan untuk Politik: Sebuah Panduan Tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Wimmer, Roger D. and Joseph R. Dominick. 2000. *Mass Media Research: An Introduction*. Wadsworth Publishing.
- Yin, Robert K. 2008. *Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods)*. Sage Publications.
- Zayd, Gehan Abu. 1998. "In Search of Political Power: Women in Parliament in Egypt, Jordan and Lebanon" dalam *Women in Parliament: Beyond Numbers*, International IDEA.



## Internet

Soin, Kanwaljit. "Why Women, What Politics". <http://www.capwip.org/resources/soin/SoinPaper.html>.

Wikipedia. "Antonio Gramsci". [http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio\\_Gramsci](http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci)

Wikipedia. "Hegemony". <http://en.wikipedia.org/wiki/Hegemony>

Wikipedia. "Cultural Hegemony". [http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural\\_hegemony](http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_hegemony)

Stillo, Monica. "Antonio Gramsci". <http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm#life>

Philip, Marying. "Qualitative Content Analysis". <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2385%63E>



## Biografi Penulis



Dr. Umaimah Wahid, M.Si., lahir di Meureudu, 3 Februari 1971. Dosen Fikom Universitas Budi Luhur Jakarta (bergabung pada tahun 2011). Lulusan Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (2006). Mengajar S1, S2 dan S3 dengan mata kuliah: Perspektif dan teori Komunikasi, Perspektif dan Teori Komunikasi Massa, Metodologi Penelitian Komunikasi, Filsafat Komunikasi, dan Ekonomi Politik Media. Fokus pada kajian komunikasi politik dan perempuan, dengan beberapa penelitian seperti pembiayaan Dikti 2009 dan 2010, Yayasan Budi Luhur Cakti,

UIN, dan lain-lain. Menjadi Sekretaris Dewan Pengarah BRR Aceh-Nias dan Peneliti Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh pada masa Presiden B.J. Habibie. Menulis artikel ilmiah di berbagai Jurnal seperti ICW, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta), Jurnal Ilmu Komunikasi S2 Sahid dan Mercu Buana, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Veteran Yogyakarta (UPN), Jurnal Sosiohumaniora Unpad Bandung, Journal of Human Capital Development 2012 dan 2013, Malaysian Journal of Communication dan UKM. Beberapa buku yang telah ditulis: *Komunikasi Masa Depan: Peluang dan Tantangan* (Puskombis, 2011), *Komunikasi Politik: Teori dan Praktek* (2012), *Islam dan Komunikasi Antar Budaya* (Fidkom UIN Jakarta, 2013) dan *Risalah Politik Perempuan* (Empat Pena Publishing, 2014). Mengikuti berbagai seminar dan *call for paper*: ADIC-UIIM, AMIC, Unpad, UI, UP, UPH, UMB, Unsoed, dan lain-lain. Menulis di berbagai surat kabar nasional dan daerah: Media Indonesia, Sindo, Radar Tangerang, dan lain-lain. Aktif di berbagai organisasi seperti Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (IMAPA), Taman Iskandar Muda (TIM), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI). Penulis dapat dihubungi via email: [nyakmah@yahoo.com](mailto:nyakmah@yahoo.com). ■

# Catatan

